

Perkara Korupsi DKP Naik ke Jaksa

ARI/EB
KASUS
LAHAN:
Kajari
Kepahiang
Ridwan, SH
didampingi
sejumlah
jaksa saat
menyampaik-
kan keteran-
gan pers.



Kejari Kepahiang Sita Tiga Lahan

BENGKULU - Setelah hampir dua tahun disidik Polres Bengkulu, akhirnya perkara korupsi rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu tahun 2018, naik ke Kejaksaan. Ditandai dengan dilimpahkannya berkas perkara (BP) tersangka, DI (43) Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama, dari Polres Bengkulu ke Kejari Bengkulu, kemarin (23/12).

Kajari Bengkulu, Irene Putrie, SH, M.Hum membenarkan BP dari Tim Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bengkulu telah

diterima. "Hari ini kita terima satu berkas perkara dari kepolisian. Prosesnya nanti akan ditunjuk jaksa yang akan mengikuti perkembangan penyidikan tersebut. Berkas perkara yang kita terima yakni perkara tipikor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu," ungkap Kajari.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Bengkulu, Halidiman, SH, MH mengatakan, jaksa peneliti memiliki waktu selama tujuh hari kerja untuk mempelajari berkas perkara. Jika terdapat kekurangan maka akan segera dikembalikan ke penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

► Baca PERKARA...Hal 7

Cab. Bandung

Aromania
perfumery
Refill Parfume

TIDAK TERBIT

Pembaca Budiman

Hari Jumat, 25 Desember 2020 merupakan **Peringatan Hari Natal**. Pada hari libur nasional tersebut Harian Rakyat Bengkulu tidak terbit. Kami akan kembali hadir menemui pembaca pada hari Sabtu, 26 Desember 2020.

Terima kasih

Tim Agusrin-Imron Masih Lengkapi APL

65.543 Suara Tak Sah



DARLINSYAH

masih dalam proses. Ditargetkan Senin (28/12) APL selesai.

► Baca TIM...Hal 7

BENGKULU - Usai gugatannya teregister dengan nomor gugatan 79. PAN. MK/AP3/12/2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), tim hukum pasangan calon nomor urut 3 Agusrin-Imron saat ini masih mempersiapkan persyaratan administrasi untuk Akta Permohonan Lengkap (APL). Disampaikan oleh salah satu tim hukum Agusrin-Imron, M. Zetriansyah kepada RB, tahapan tersebut

Prokes Jangan Kendor

Bertambah 31 Kasus Baru



HERWAN ANTONI

Herwan Antoni, SKM, M. Kes mengatakan penambahan kasus baru ini berasal dari 93 sampel swab usai pemeriksaan laboratorium.

► Baca PROKES...Hal 7

BENGKULU - Jumlah kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu masih bertambah. Per Rabu (23/12) terdapat penambahan kasus baru sebanyak 31 orang. Penambahan ini berasal, 4 orang di Kota Bengkulu, 2 orang di Kabupaten Lebong, 6 orang di Kabupaten Bengkulu Selatan, 3 orang dari Seluma, dan Mukomuko sebanyak 16 orang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu



Kerusakan DAS, Pemicu Banjir

Perusahaan Wajib Lakukan Reklamasi

BENGKULU - Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat menjadi penyebab bencana banjir besar seperti yang melanda Kota Bengkulu dan beberapa kabupaten tahun lalu. Untuk itu perlu komitmen bersama termasuk melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengatasi permasalahan DAS.

► Baca PERUSAHAAN...Hal 7

KOORDINASI: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah bersama Kajati Bengkulu, Andi Muhammad Taufik dan Ketua Forum DAS Bengkulu, Joni Irawan di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, kemarin (23/12).

Laporan Keuangan, Unib Peringkat Pertama Terbaik



PENGHARGAAN: Rektor Unib Ridwan Nurazi (memegang piagam), bersama Wakil Rektor, Kepala Biro serta pejabat di Bagian Keuangan Unib dan Kakanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra.

BENGKULU - Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Universitas Bengkulu (Unib) tahun 2019 mendapat penghargaan peringkat pertama terbaik tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UUPPA-W). Piagam penghargaan diserahkan Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra, SE, MM kepada Rektor Unib Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE, MSc, Ak, Selasa (22/12).

Penyerahan piagam penghargaan berlangsung di ruang rapat tiga gedung Rektorat Unib, dihadiri para wakil rektor, kepala biro serta pejabat di bagian keuangan Unib.

► Baca LAPORAN...Hal 7

LET'S GO TOYOTA | BEYOND

Agung TOYOTA

INDULGE IN THE THRILL | IN CHARGE OF BETTER FUTURE

THE COROLLA CROSS | TWO SIDES OF THE FINEST

GASOLINE

HUBUNGI : **AGUNG TOYOTA**
BENGKULU - Jl. P. Natadirdja No.103 Telp. 0736 - 21127
HOTLINE BENGKEL : 0736 - 23036
BOOKING SERVIS : 08537776873

Patuhi Protokol Kesehatan
#DENGAN
SELALU GUNAKAN MASKER

Salurkan Bansos Akhir dan Awal Tahun

Tugas Awal Risma Sebagai Mensos

JAKARTA – Tri Rismaharini dan Sandiaga Salahuddin Uno merupakan dua nama yang paling banyak dibicarakan jelang pengumuman reshuffle kabinet selasa (22/12) lalu. Kini, publik menunggu sentuhan dari keduanya di kementerian masing-masing. Apakah mampu memperbaiki atau justru memperparah kondisi.

Kemarin (23/12) kedua sosok tersebut dilantik di Istana Negara Jakarta bersama empat menteri lainnya. Juga lima wakil menteri dan dua kepala badan. Mereka diambil sumpah oleh Presiden Joko Widodo. "Bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap para pejabat baru itu.

Risma bercerita sedikit mengenai penunjukannya sebagai mensos. Senin (21/12) lalu dia dihubungi oleh Mensesneg Pratikno. "Sekitar jam 15.00 karena saya saat itu sedang webinar hari ibu," terangnya usai dilantik.

Pratikno hanya menyampaikan bahwa besoknya (22/12) Risma diminta menghadap ke Istana. Risma baru tiba di Jakarta selasa pagi, dan mendapatkan pemberitahuan bahwa pertemuan dengan presiden dijadwalkan pukul 15.00 WIB.

Hampir sama, penunjukan Sandiaga juga terbilang singkat. Sandiaga mengatakan, dia sedang berfokus pada pemulihan kesehatannya pascaterkena Covid-19. Dia menyempatkan diri membuka pesan-pesan dari koleganya yang mendoakan kesembuhannya. Ternyata, di antara sekian banyak pesan itu, terselip satu nomor milik Pratikno tertanggal 18 Desember lalu.

"Singkat saja pesannya, yaitu, Bismillah mas," ujar Sandiaga menirukan pesan tersebut. Saat itu, Sandiaga mengira kalau itu adalah pesan yang sama seperti koleganya yang lain mendoakan kesembuhannya. "Saya jawab, Bismillah pak," lanjutnya.

Setelah momen berbalas pesan dengan Pratikno, muncul pesan lainnya dari sejumlah kawannya di kabinet. Seperti Budi Gunawan dan Erick Thohir. Dan Sandiaga juga masih mengira itu pesan yang sama seperti sebelumnya. "Konfirmasi yang firm baru hari Senin dari pak Pratik, mengabarkan kemungkinan akan diminta menghadap hari Senin sore atau Selasa," tuturnya.

Kemudian, Selasa pagi dia mendapatkan pemberitahuan untuk hadir pukul 15.00 WIB dengan mengenakan baju putih. Belum diberitahu kalau dia akan ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Penunjukan Sandiaga lantas menjadi bahan perbincangan yang luas. Erick Thohir, sahabat Sandi-

aga yang juga Menteri BUMN langsung memosting foto lawas yang diambil di Amerika Serikat pada 1989, di foto itu ada Erick, Sandiaga, Mendag M Lutfi, dan Nurasia Uno, istri Sandiaga. Mereka sama-sama kuliah di AS.

"Dulu nongkrong bareng, berkarya bareng, sekarang bareng-bareng membantu pak @jokowi," tulis Erick dalam keterangan fotonya.

Kemudian, kemarin Erick memposting foto terbaru mereka bertiga di kantornya, kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut berfoto bersama mereka di posisi Nurasia.

Usai pelantikan kemarin, masing-masing Menteri memberikan keterangan. Risma misalnya, fokus pertama dia di Kemensos adalah realisasi bansos Covid-19. Sisa bansos untuk 2020 harus tuntas tersalurkan pada pekan keempat. Kemudian, langsung tancap gas penyaluran bansos 2021 di pekan pertama Januari. "Minggu pertama harus bisa keluar karena ini berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional," terangnya.

Setelah itu, dia akan menyambungnya dengan program pemberdayaan. Bagaimana agar bantuan yang sudah diberikan memiliki dampak langsung yang terukur pada para penerimanya. Dalam hal ini, dia akan bekerja sama dengan perguruan tinggi di masing-masing daerah.

Program pemberdayaan tidak hanya menasar keluarga miskin. Anak-anak terlantar juga akan mendapatkan porsi. Targetnya, anak-anak terlantar bisa mandiri. Mereka harus mendapatkan akses Pendidikan dan Kesehatan yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Dia akan bekerja sama dengan kementerian untuk pelayanan kesehatan khusus penyandang masalah keajahteraan sosial.

Selain itu, Risma berjanji membenahi data yang ada di kemensos. Dia menggandeng Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk memastikan pendataan penerima bantuan terus ter-update.

"Pasti ada selisih, karena hari ini di-update mungkin hari ini pula ada yang meninggal, pindah, dan sebagainya," tutur mantan wali kota Surabaya itu. Karenanya, penanganan pendataan akan dilakukan day to day.

Berikutnya, Kemensos akan bekerja sama dengan sejumlah kementerian untuk pemberdayaan para ibu rumah tangga. "Membentuk koperasi, bisa di tingkat kecamatan atau kelurahan," jelas Risma.

Nanti programnya akan menyesuaikan karakter masing-masing daerah. Poin lainnya adalah meningkatkan income dan mengurangi pengeluaran. Misalnya dengan program pertanian sederhana sehingga pengeluaran rumah tangga untuk makanan bisa berkurang. Seluruh program yang ada akan di-

integrasikan dengan kementerian-kementerian teknis lain.

Sementara, Sandiaga memaparkan tiga gagasan utama dia untuk diterapkan di kementerian. Pertama adalah inovasi. "Satu tahun ini harus ada quick wins, perubahan yang mendasar pada saat kita berbenah terhadap lima destinasi super prioritas," terangnya. Mulai dari busana, tarian, infrastruyktur, dan hal lain yang terkait pariwisata dan ekonomi kreatif.

Gagasan berikutnya adalah adaptasi terhadap pandemi Covid-19. Dimulai dari penerapan standar CHSE (clean, health, safety, environment) untuk memastikan lokasi-lokasi wisata benar-benar aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Terakhir adalah kolaborasi dengan semua pihak. "(ada) jutaan lapangan pekerjaan yang terdampak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," lanjut politikus partai Gerindra itu.

Dia berjanji mempertahankan dan mengembangkan pemberdayaan di sektor tersebut. Agar mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Selain melantik menteri, kemarin Jokowi juga melantik lima wakil menteri dan dua kepala badan. Mereka adalah Kasum TNI Letjen TNI Muhammad Herindra yang menggantikan posisi Sakti Wahyu Trenggono sebagai wakil menteri pertahanan. Kemudian guru besar UGM, Edward Omar Syarif Hiariej yang diplot sebagai wakil Menteri Hukum dan HAM.

Ketiga, ada nama Dante Saksiono Harbuwono. Pakar molekuler diabetes itu akan mendampingi Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil Menteri Kesehatan. Berikutnya, Mendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Harvick Hasnul Qolbi yang ditunjuk menjadi wakil Menteri Pertanian.

Terakhir ada nama Dirut Bank BTN, Pahala Nugraha Mansury yang ditugaskan sebagai wakil Menteri BUMN I.

Kemudian, dua kepala badan adalah mantan Kapolda Bali Irjen Polisi Petrus Reinhard Golose yang menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. Sekretaris Badan Restorasi Gambut Hartono Prawiraatmadja yang dipromosikan menjadi kepala di instansi itu.

Dengan pelantikan lima wamen, secara keseluruhan jumlah kementerian yang memiliki jabatan wamen bertambah 3, menjadi 14. Selain lima kementerian itu, ada Kemlu, Kemenkeu, Kemenag, Kemendag, dan Kementerian PUPR. Juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa PDT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Kemenparekraf.

Usai pelantikan di istana, proses sertijab langsung dilaksanakan di sejumlah kantor kementerian. (**byu/mia/lyn**)

akan dipilihnya," sebut Darlin.

Untuk diketahui, dari 10 kabupaten/kota, suara tidak sah paling banyak di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) mencapai 12.703 suara. Namun perlu diingat bahwa DPT Kabupaten BU itu memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan DPT kabupaten lainnya.

"Karena DPT di BU itu tinggi. Jadi meskipun suara tidak sah mencapai 12 ribu lebih, secara persentase tingkat partisipasi pemilihnya cukup tinggi. Bahkan tingkat nasional, partisipasi pemilih di Pilkada Provinsi Bengkulu di atas rata-rata," tukasnya.

Untuk diketahui, suara tidak sah ini bukan hanya terjadi kali ini, namun pada pilkada dan pemilu sebelumnya. Bahkan saat pemilu legislatif lalu itu tidak sedikit suara tidak sah. Hal itu mungkin karena calonnya sangat banyak sehingga masyarakat bingung memberikan pilihannya.

"Intinya dari total jumlah DPT kita saat Pilgub dengan jumlah suara tidak sah 65 ribuan, itu masih rasional," pungkas Darlin. (**war**)

Bengkulu yang telah memberikan penghargaan LK terbaik kepada Unib. Prestasi ini kata Rektor merupakan implementasi komitmen yang tinggi dari semua pihak di Unib yang terus berupaya menciptakan manajemen keuangan yang baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dengan penghargaan ini diharapkan menjadi pemacu semangat semua pihak terkait agar penyusunan laporan keuangan pada tahun 2020 dan tahun-tahun akan datang menjadi lebih baik lagi, transparan dan akuntable," ujarnya seraya berharap Kanwil DJPb senantiasa memberikan dukungan dan bersinergi agar setiap proses pelaporan keuangan dapat memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan. (**prw/hms-unib/van**)

Perkara Korupsi DKP Naik ke Jaksa

Sambungan dari halaman 1

"Nanti Kajari akan menunjuk jaksa peneliti. Nanti kita akan menentukan sikap apakah akan P18 dalam artian berkas tersebut tidak lengkap atau kalau pun berkas tersebut sudah lengkap kita langsung nyatakan P21," pungkasnya.

Tsk Bakal Bertambah

Di tempat terpisah, dalam perkara korupsi berbeda, Kejaksaan Negeri Kepahiang saat ini masih melengkapi berkas perkara tipikor pengadaan lahan eks kantor camat Tebat Karai tahun 2015. Jika tidak ada kendala, awal tahun 2021 mendatang perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu.

Selain itu, kendati sudah menetapkan 2 orang tersangka yakni Ahmad Rizal, selaku pemilik lahan dan mantan anggota DPRD Kepahiang periode 2014-2019 dan Agus Supriyanto, seorang ASN di Setdakab Kepahiang yang sebelumnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam perkara pengadaan lahan tersebut, namun peluang untuk penambahan tersangka lainnya masih terbuka lebar.

Hal ini disampaikan Kajari Kepahiang, Ridwan, SH. Dia menyebutkan penambahan tersangka sangat memungkinkan. Namun demikian, pihaknya masih menunggu fakta-fakta yang ada dari persidangan yang menghadirkan kedua tersangka ini nantinya. "Kita lihat dulu seperti apa fakta-fakta yang muncul di persidangan nanti," jelasnya.

Kejari Kepahiang katanya, juga sudah menyita tiga lahan milik tersangka Ahmad Rizal yang berada di Kelurahan Padang (2 lahan) dan Desa Westkust (1 lahan). Saat ini lahan tersebut sedang dihitung luas dan harganya oleh auditor publik, guna mengetahui kesesuaian harga sebagai pengganti kerugian negara yang ditimbulkan dari perkara ini.

"Untuk kerugian negara mencapai Rp 281 juta dari pagu anggaran Rp 1,2 miliar. Jadi kita hitung dulu lahan yang kita sita itu, apakah mencukupi untuk pengembalian kerugian negara atau tidak. Makanya masih kita lakukan penghitungan dengan melibatkan jasa auditor publik," demikian Ridwan.

Sebagaimana diwartakan RB sebelumnya, setelah menjalani tahapan penyidikan yang panjang yakni dari November 2019, akhirnya Kejari Kepahiang

menetapkan 2 orang tersangka. Banyak fakta yang didapat dari masa penyidikan selama 1 tahun tersebut. Salah satunya, dalam pengadaan lahan eks kantor camat tersebut, sama sekali belum pernah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Padahal secara aturan yang berlaku dijelaskan bahwa dalam pengadaan lahan atau tanah, sebelum dilakukan pembayaran harus terlebih dahulu dinilai oleh penguji publik.

Dari penyidikan yang telah dilakukan dengan memeriksa 35 saksi diketahui bahwa total anggaran yang dialokasikan APBD Kabupaten Kepahiang TA 2015 sebesar Rp 1,1 miliar untuk pengadaan lahan. Hasil penghitungan yang dilakukan Kejari Kepahiang dengan melibatkan penilai publik, diketahui harga lahan tersebut hanya Rp 787 juta. Artinya lahan dibayar dengan harga lebih mahal dari semestinya tanpa penilai KJPP.

Jadi total kerugian negara yang ditimbulkan atas perkara ini mencapai Rp 281 juta. Adapun modus operandinya yakni Pembak membeli tanah yang seolah-olah sudah dinilai oleh KJPP kepada tersangka Ahmad Rizal. Padahal KJPP yang ditunjuk sama sekali belum melakukan penilaian, hanya seolah-olah telah melakukan penilaian.

Dijelaskan Kajari, kronologis awal mula pengadaan lahan tersebut dimulai pada 25 Maret 2015 lalu, tersangka Ahmad Rizal menawarkan tanahnya yang terletak di Desa Taba Saling Kecamatan Tebat Karai kepada Bupati Kepahiang melalui SY (almarhum) selaku Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Kepahiang.

Kemudian pada 2 September 2015, tersangka Ahmad Rizal selaku anggota DPRD Kabupaten Kepahiang mengusulkan pembelian lahan kantor Camat Tebat Karai dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) TA 2015.

Pada September 2015, dalam rapat lanjutan pembahasan KUA-P dan PPAS-P, pengadaan lahan Kantor Camat Tebat Karai menjadi persyaratan kesepakatan KUA-P dan PPAS-P TA 2015 yang disetujui TAPD dan Banggar.

Pada bulan Oktober 2015, SY secara melawan hukum meminta Agus Supriyanto selaku PPTK menyusun SK Bupati Penetapan Lokasi Tanah untuk Kantor Camat Tebat Karai sebelum adanya

survei lokasi dan tanpa adanya Kajian Tata Ruang.

Selanjutnya pada 9 November 2015, SY dan Penilai Publik Aksa Nurdin secara melawan hukum seolah-olah melakukan penilaian harga tanah milik Ahmad Rizal untuk persiapan pembelian lahan Kantor Camat Tebat Karai. Diikuti pada 21 Desember 2015, pihak Aksa Nurdin melalui stafnya Saprudin mengirimkan dokumen hasil perhitungan pra penilaian harga tanah sebesar Rp 1.121.400.000 kepada SY melalui Agus Supriyanto.

Setelah menerima dokumen Pra Penilaian, SY secara melawan hukum meminta Agus Supriyanto menyusun SK Bupati Penetapan Harga Tanah Lahan Kantor Camat Tebat Karai sebesar Rp 1.125.000.000, yang kemudian dijadikan dasar pembayaran. Berikutnya pada 21 Desember 2015, SY juga secara melawan hukum menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk melakukan pembayaran penggantian lahan milik Ahmad Rizal sebesar Rp 1.125.000.000. dan pada 23 Desember 2015, sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SKM 0217/SPM-LS/BAG.1/KPH/2015 ke rekening pemilik tanah dengan nilai Rp 1.068.750.000, setelah dipotong PPh Rp 56.250.000.

Kemudian pada 29 Desember 2015, Ahmad Rizal sempat melakukan penarikan tunai sebesar Rp 100.000.000. dan selanjutnya pada 4 Januari 2019 kembali melakukan penarikan uang dari rekening sebesar Rp. 168.000.000. terakhir sisa uang di rekening tersebut, kemudian didepositokan sejumlah Rp. 800.000.000.

"Jadi sebenarnya ada 3 tersangka dalam perkara ini, yakni SY, AR (Ahmad Rizal), dan AS (Agus Supriyanto). Namun karena SY sudah meninggal dunia beberapa waktu lalu, sehingga hanya dua tersangka yang kita tetapkan dalam perkara ini," ujar Kajari Kepahiang, waktu itu.

Kajari juga mengatakan, dalam masa penyidikan pihaknya selain memeriksa 35 orang saksi, juga ada 3 orang ahli. Adalah 2 orang penilai publik sebagai ahli penilai tanah dan 1 orang ahli pengadaan tanah dari Kantor ATR/BPN Kabupaten Kepahiang. Selain itu juga pihaknya pun sudah menyita sebanyak 2 eksemplar berupa laporan penilaian kewajaran harga tanah dan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, serta sebanyak 128 dokumen sebagai bukti petunjuk. (**sly/tok**)

Tim Agusrin-Imron Masih Lengkapi APL

Sambungan dari halaman 1

"Lagi melengkapi, masih ada yang kurang. Hari terakhir itu kan 29 Desember. Karena besok (hari ini, red) kan libur juga. Ini masih ada bukti bukti yang belum di registrasi ya. Insyaa Allah tuntas," kata Zetriansyah, Rabu (23/12).

Sebelumnya, ia menyatakan telah siap dengan bukti-bukti yang memperkuat gugatan kliennya di MK. Dalam gugatan itu ada dua poin besar. Pertama, pihaknya mendalilkan ada seratus ribu pengelambungan suara diduga oleh salah satu pasangan calon (paslon). Serta pihaknya juga menduga ada enam puluh ribu lebih suara untuk paslon nomor urut 3 Agusrin-Imron, yang dirusak.

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu melalui Anggota KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto, SPM.Si menyampaikan pihaknya siap menghadapi gugatan itu. Pasalnya, mengajukan gugatan sengketa pilkada ini memang merupakan hak paslon jika tidak puas dengan

hasil rekapitulasi perhitungan suara. "Prinsipnya kita siap," tegasnya.

Penyebab Suara Tak Sah

Dibagian lain, sebanyak 65.543 suara yang dinyatakan tidak sah atau batal. Sebagaimana hasil pleno rekapitulasi perolehan suara dalam Pilkada Gubernur (Pilgub) Bengkulu tahun 2020 pada 17 Desember lalu. Anggota Divisi Sosialisasi, SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Bengkulu, Darlinsyah S.Pd, M.Si menyampaikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi suara yang tidak sah. Diantaranya banyak pemilih yang mencoblos lebih dari satu foto paslon.

"Dari laporan KPPS ketika dikonfirmasi terkait suara tidak sah, bahwa ada yang coblos semua foto paslon di surat suara," ujarnya.

Kendati demikian, untuk faktor sosialisasi, pihaknya telah melakukan sangat masif dan kontinyu. "Sosialisasi lebih dari cukup, agar pemilih datang ke TPS dan memilih mengetahui siapa-siapa calon yang

katkan kinerja dan prestasi pada penyusunan laporan keuangan tahun 2020. Sebab, dibanding tahun 2019, penyusunan laporan keuangan 2020 lebih banyak tantangan dan dinamikanya karena harus menyesuaikan dengan berbagai perubahan anggaran terkait bencana kesehatan Covid-19.

Namun demikian kata Ismed, pihaknya siap memberikan dukungan kepada Unib agar penyusunan laporan keuangan 2020 kembali menjadi yang terbaik. "Kita akan dukung dan siap bersinergi agar laporan keuangan 2020 memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan kembali menjadi yang terbaik," ujarnya.

Ridwan Nurazi menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Kanwil DJPb Provinsi

Laporan Keuangan, Unib Peringkat..

Sambungan dari halaman 1

Kakanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra, mengatakan proses penilaian dan pemerinkatan sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Namun, pemberian piagam penghargaan baru bisa dilaksanakan saat ini.

Penghargaan ini diberikan karena pada 2019 Unib berhasil menjadi yang terbaik dalam penilaian penyusunan laporan keuangan di tingkat UUPPA-W Kategori Kecil. Penghargaan ini merupakan prestasi atas profesionalisme penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada standarisasi yang telah ditetapkan.

Ismed berharap dengan penghargaan ini Unib dapat mening-

Perusahaan Wajib Lakukan Reklamasi

Sambungan dari halaman 1

Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah dan Kajati Bengkulu Andi Muhammad Taufik memimpin rapat koordinasi kemarin (23/12) di Gedung Daerah Balai Raya Semarang Bengkulu, menyampaikan komitmen bersama.

Mengetaskan permasalahan kerusakan DAS. Koordinasi dan kerja sama antar daerah serta lintas sektoral dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan DAS. Baik permasalahan dibagian hulu, tengah maupun hilir.

"Dari semua DAS yang ada di Provinsi Bengkulu, yang berpotensi menimbulkan banjir itu DAS Bengkulu. Perlu kerja sama dua daerah, yaitu Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah," kata Rohidin.

Penyebab banjir selain adanya penggundulan hutan di bagian hulu, juga terjadi penyempitan di bagian tengah dan pendangkalan di bagian hilir DAS. Maka dari itu seluruh permasalahan ini harus diatasi secara bersama dengan memastikan kewajiban reklamasi oleh perusahaan ada dibagian hulu dilaksanakan. Sementara di bagian tengah karena berhubungan dengan masyarakat, pemda setempat jangan lagi memberikan izin perumahan di sepanjang sungai.

"DAS bagian hulu gundul, DAS bagian tengah pasti ada penyempitan. Kemudian DAS bagian hilir pasti ada penyumbatan. Ketiga inilah yang mengakibatkan Kota Bengkulu banjir," tegas Rohidin dalam sosialisasi koordinasi dan konsolidasi yang juga melibatkan Forum DAS Bengkulu.

Untuk memperbaiki kawasan hulu tersebut, sambungannya, meminta komitmen tiga perusahaan besar yang berada di hulu DAS Bengkulu. Keterlibatan pihak kepolisian, jakkasaan dibutuhkan untuk memastikan komitmen perusahaan dilaksanakan. Sedangkan permasalahan dibagian hilir, dengan mencari solusi mengatasi pendangkalan melalui APBN dan masuk program pemerintah pusat.

"Harus melalui APBN karena membutuhkan anggaran besar untuk mengatasi pendangkalan ini. Klau nanti dibutuhkan dana sharing maka kota, Pemprov menganggarkan," terangnya.

Selain perbaikan-perbaikan seluruh bagian DAS, sambung Rohidin, penting juga agar pemkot menertibkan rencana tata ruang. Seperti memperketat izin pembangunan kompleks perumahan. Memastikan pengembangan perumahan membangun drainase yang terhubung dengan drainase perkotaan agar ketika hujan turun

maka air bisa mengalir dengan lancar.

"Penyebab banjir lainnya penebanaan kota. Jika kota tidak menertibkan rencana tata ruang, izin komplek diperketat moratorium maka air akan tergenang di mana-mana saat hujan turun," bebernya.

Rohidin menerangkan dengan memperbaiki DAS banyak mafaat akan dirasakan. Pertama menghindari bencana banjir. Kedua intake PDAM terjaga dan terpenuhi kebutuhannya. Ketiga juga terjaga kelestarian flora dan fauna sepanjang DAS. "Perlu komitmen bersama dalam mengatasi permasalahan ini," tukasnya.

Ketua Forum DAS Bengkulu, Joni Irawan mengatakan, kerusakan DAS Bengkulu adalah terparah dibanding DAS lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Sudah tidak mampu lagi menampung air hujan maupun air kiriman dari bagian hulu. Sehingga setiap hujan deras akan timbul kekhawatiran masyarakat Kota Bengkulu akan terjadi banjir.

"Indikator DAS rusak itu lihat ketika hujan. Kalau keruh artinya bagian hulu sudah rusak. DAS Bengkulu terparah, sepanjang tahun keruh terus, belum lagi pencemaran. Sekarang banjir dulu kita tahunya di Tanjung Agung saja, sekarang sudah meluas," pungkas Joni. (**key**)

Prokes Jangan Kendor

Sambungan dari halaman 1

Diantara sampel keluar hasil ini, 31 orang dinyatakan terkonfirmasi Covid-19. Sehingga total kasus positif di Provinsi Bengkulu menjadi 3.181 kasus. "Selain penambahan kasus positif baru, juga ada penambahan kasus sembuh sebanyak 27 orang. Jadi total kasus sembuh menjadi 2.089 orang dari jumlah kasus positif," ujar Herwan.

Sambung Herwan, juga terdapat penambahan kasus meninggal dunia sebanyak 2 orang. Meliputi kasus nomor 3.174 asal Mukomuko dan kasus nomor 3.181 warga Bengkulu Selatan.

Total kasus meninggal dunia sejak pandemi Covid di Bengkulu hingga kemarin, mencapai 110 orang. Dengan masih terus bertambahnya kasus Covid-19 ini, Herwan mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan protokol kesehatan.

"Jangan kendor menerapkan prokes. Senantiasa menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun serta menjaga jarak. Hindari kerumunan orang, serta terapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menjaga daya tahan tubuh," imbuhnya.

Bagi kasus positif yang memilih untuk melakukan isolasi mandiri

karena tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan, Herwan meminta untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Mengisolasi diri dengan tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan kontak langsung dengan orang lain. Tujuannya, agar virus ini tidak menyebar kepada orang lain.

"Rumah sakit kita tujuan untuk kasus berat atau yang membutuhkan perawatan, dan rumah sakit darurat masih dalam persiapan untuk kasus gejala ringan dan sedang. Jadi untuk orang tanpa gejala prosesnya melakukan isolasi mandiri, tidak boleh berkeliaran," pungkas Herwan. (**key**)

PILKADA

KAMIS, 24 DESEMBER TAHUN 2020 | HALAMAN 2

Denny Indrayana Bawa 177 Bukti

JAKARTA - Pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana-Difriadi akhirnya menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pilkada (PHP) secara langsung ke MK kemarin (22/12). Denny didampingi kuasa hukum yang juga mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Denny mengatakan, PHP yang diajukan tak hanya terkait menang dan kalah. Namun, yang lebih utama adalah memastikan proses pilkada di Kalsel berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. "Harus kita kawal agar tidak bergeser," ujarnya saat memberikan keterangan pers di Jakarta kemarin (22/12).

Mantan wakil menteri hukum dan HAM itu menilai, selama pelaksanaan pilkada, ada banyak dugaan kecurangan yang dilakukan lawan politik. Terlebih, yang bersangkutan berstatus incumbent.

Dia memastikan hal itu bukan tuduhan, tetapi disertai bukti yang valid. Berbagai kecurangan tersebut sudah berhasil dikumpulkan dan didokumentasikan. "Dengan 177 bukti yang kita punya," tuturnya.

Terkait detailnya, Denny meminta untuk menunggu proses persidangan PHP di MK. Sebab, jika dibuka detail saat ini, dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan para saksi. "Pada saatnya akan kita buka," kata pria kelahiran Kotabaru tersebut.

Kuasa hukum Febri Diansyah menambahkan, secara umum bukti PHP yang dikumpulkan memiliki jenis yang beragam. Mulai dokumen, selebaran, rekaman pembicaraan, hingga video. Termasuk dokumentasi dugaan pemanfaatan bantuan sosial Covid-19 untuk kepentingan elektoral. "Ada plastik beras yang ada gambar paslon," ujarnya.

Febri menyebut, berbagai bukti dan dugaan pelanggaran sudah berupaya diadukan melalui Badan Pengawas Pemilu. Namun sayangnya, proses penegakan hukum pilkada di Bawaslu tidak berjalan maksimal. Karena itu, dirasa perlu membawa ke Mahkamah Konstitusi.

Dia juga menuturkan, jumlah bukti masih berpotensi bertambah. Saat ini, proses pencarian masih berlangsung. Termasuk mengkomodasi temuan masyarakat. "Bagi masyarakat, silakan menyampaikan kalau ada dugaan temuan baru," terangnya.

Jika berbagai kecurangan tidak terjadi, Febri meyakini kliennya memiliki kans untuk memenangkan persaingan. Apalagi, berdasar hasil rekapitulasi KPU, paslon Denny-Difriadi hanya selisih 8.127 suara atau 0,6 persen dari incumbent.

Sementara itu, jumlah perkara di MK hingga pukul 19.00 WIB tadi malam mencapai 128 permohonan. Terdiri atas 3 gugatan pemilihan gubernur, 13 pemilihan wali kota, dan 112 pemilihan bupati.

Jelang pelaksanaan persidangan, MK sendiri terus mempersiapkan kebutuhan teknis. Kemarin MK melantik tim gugus tugas yang memberi dukungan pelaksanaan sidang perselisihan hasil pilkada. Khususnya dalam memastikan pelaksanaan protokol kesehatan. (far/c17/bay)

DPR Ingatkan Pemerintah

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi puncak arus libur pada masa Natal dan Tahun Baru 2021, khususnya di bandara.

Ia mendesak Kementerian Perhubungan dan operator mengantisipasi kemungkinan membludaknya calon penumpang yang akan melakukan rapid dan swab test.

"Sudah beberapa hari masih terjadi antrean panjang calon penumpang yang melakukan tes swab dan rapid antigen di bandara, dan puncak arus mudik diperkirakan tanggal 23-24 Desember," kata Sigit dalam keterangannya, Rabu (23/12).

Ia menegaskan, hal itu harus benar-benar dipersiapkan dan diantisipasi agar jangan sampai malah makin membludak dan melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi.

Sigit menyayangkan lambannya penanganan antrean tes swab yang sudah berlangsung sejak beberapa hari terakhir.

Menurut Sigit, seharusnya Kementerian Perhubungan sebagai regulator menegur pihak PT Angkasa Pura (Persero) selaku operator untuk memperbaiki prosedur pendaftaran dan antrean tes rapid dan swab di bandara.

Untuk itu, Sigit menagih komitmen pemerintah untuk mengawal pergerakan orang selama libur panjang Natal dan Tahun Baru nanti dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Selama Masa Libur Natal dan Tahun Baru Dalam Masa Pandemi Covid-19. (riz/fin)

JAKARTA - Tahun 2021 akan menjadi saat-saat yang berat bagi pemerintah daerah. Pasangan calon terpilih pada Pilkada 2020 diharapkan mempercepat adaptasi. Khususnya sosok yang baru masuk dunia politik dan birokrasi.

Direktur Eksekutif Komite Pemantapan Pelaksana Otonomi Daerah (KPOD) Robert Endi Jaweng menyatakan, ada dua tantangan berat yang dihadapi pemda. Pertama, tekanan fiskal akibat menurunnya aktivitas ekonomi. Dampak fiskal dari kegiatan ekonomi yang menurun tahun ini baru terasa

tahun depan. "Pajak akan sulit. Retribusi tidak akan seoptimal tahun-tahun sebelumnya," ujarnya dalam diskusi kemarin (23/12).

Imbasnya, alokasi dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tersedia akan menurun. Dengan penurunan pendapatan, lanjut Endi, kepala daerah dituntut memutar otak guna memastikan kebutuhan rutin, pelayanan publik, dan program-program prioritas berjalan maksimal. Kebijakan penanganan pandemi yang semakin berbasis lokal menjadi tantan-

gan kedua. Dengan pendekatan tersebut, penanganan pandemi lebih menuntut kiprah pemda.

"Pemda menghadapi situasi ketika kepala daerah harus bertindak cepat karena sudah berbasis lokal. Di sisi lain, pelurunya tidak banyak. Peluru dalam artian fiskalnya itu tidak kuat," imbuhnya.

Karena itu, Endi menyarankan untuk mulai mencari solusi atas tantangan tersebut. Dalam hal APBD anjlok, misalnya, paslon terpilih perlu menyiapkan langkah strategis dengan mencari sumber pembiayaan baru. Di antaranya, KPBU,

CRS, obligasi, dan pinjaman daerah. "Kalau kepala daerah bermental tukang belanja, artinya dia membelanjakan uang dan uang itu menunggu transfer dari pusat, mati daerah itu," ungkapnya.

Endi merekomendasikan paslon kepala daerah yang terpilih mulai menyiapkan diri secara maksimal. Sebelum pelantikan, masih ada waktu untuk belajar dan menyiapkan diri. Dengan begitu, adaptasi tidak membutuhkan waktu lama. "Pemerintah pusat memfasilitasi penguatan kapasitas, transfer pengetahuan, dan sebagainya," tuturnya.

Direktur Institut Otonomi Daerah (IOD) Djohermansyah Djohan menambahkan, ke depan, kepala daerah harus punya banyak akal. "Kalau dia tidak kreatif, tidak inovatif, tidak menggunakan pendekatan kolaboratif, ya game is over," kata mantan Dirjen Otda Kemendagri tersebut. Khusus kepala daerah baru, pria yang akrab disapa Prof Djo itu menyarankan untuk melakukan banyak kolaborasi. Birokrasi, kelompok masyarakat, hingga perguruan tinggi perlu diajak bicara untuk membantu mengambil kebijakan. (far/c19/bay)



SUKSES: DPD RI mengapresiasi KPU dan Bawaslu Provinsi Bengkulu yang sukses melaksanakan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19.

Pastikan Penyelenggara Pilkada Nihil Covid-19

BENGKULU - Usai penyelenggaraan pilkada ini, diketahui tambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 terus meningkat. Kendati demikian, belum dapat dipastikan apakah berkaitan dengan penyelenggaraan pesta demokrasi itu. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu, H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes menyebutkan hingga kemarin (23/12) ada tambahan 93 kasus. Sehingga jumlah total kasus mencapai 3.181 kasus.

"Jadi semua kemungkinan bisa ter-

jadi, namun kita belum bisa melihat apakah ini karena kluster pilkada atau tidak," jelasnya.

Ia mengakui salah satu faktor penyebab terjadinya peningkatan kasus ini pihaknya belum dapat memastikan. Palsunya terinfeksi Covid-19 bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya kontak dengan orang tanpa gejala (OTG) atau pasien konfirmasi, atau terjadi pada orang-orang dengan tingkat imunitas yang rendah.

Menurutnya, dalam melakukan

penanganan kasus, pihaknya gencar melakukan upaya 3T. Yakni tracing, testing, treatment yang dilakukan pada setiap kasus konfirmasi positif Covid-19.

Selain itu, Herwan juga mengimbau agar selalu menjaga kebersihan diri yang memang harus dilakukan pada pandemi Covid-19 ini. Minimal dengan penggunaan masker dan mencuci tangan sesering mungkin. "Ini perilaku yang simpel, dengan cuci tangan pakai sabun dapat meminimalisir penyebaran virus," imbau

Herwan.

Komisioner KPU Bengkulu Divisi Hukum dan Pengawasan, Eko Sugianto, SP M.Si menyampaikan pihaknya belum menerima laporan adanya penyelenggara pilkada yang terpapar Covid-19. "Kalau ada yang terpapar harus diteliti kembali. Apakah terpapar saat penyelenggaraan pilkada atau terpapar dalam kesempatan yang lainnya. Dan sejauh ini kita belum menerima laporan, menurut catatan kita itu aman," jelas Eko. (war)

Pertarungan Terakhir Pilkada

JAKARTA - Tugas penyelenggara Pilkada Serentak 2020 belum rampung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, ada 123 Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (PHPKada 2020) yang diajukan para pasangan calon. Semuanya, akan diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menghadapi PHPKada 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pengucapan sumpah gugus tugas dukungan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Berdasarkan petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 312 Tahun 2020 Tanggal 6 Desember 2020 tentang Gugus Tugas, seluruh pegawai yang termasuk dalam gugus tugas tersebut akan menjalankan tugas sejak 10 Desember 2020 hingga 10 April 2021.

Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah menegaskan, perlunya para pegawai khususnya yang telah mengucapkan sumpah gugus tugas untuk menjaga protokol kesehatan sangat ketat dalam menjalankan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19.

"Dengan menjaga protokol kesehatan, InsyaAllah kita bisa terhindar dari Covid-19. Mau tidak mau kita menjalankan tugas tentu dengan protokol kesehatan sajalah

optimisme kita menjalankan pekerjaan di tengah pandemi," imbuhnya.

Kemudian, sambung Guntur, demi menjaga protokol kesehatan yang ketat, ketika persidangan nantinya seluruh pihak yang masuk ke ruang sidang MK harus melakukan swab antigen. Jika ada pihak yang hendak bersidang tidak memiliki surat keterangan telah melakukan swab antigen, maka MK akan menyediakannya di halaman Gedung MK. "Hal ini karena pihak yang bersidang akan berhadapan dengan Majelis Hakim, maka protokol kesehatan harus lebih ketat," ujar Guntur.

Terpisah, Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari merinci, dari 123 permohonan, ada satu PPHU pemilihan gubernur, 13 pemilihan wali kota, 109 pemilihan bupati. Selanjutnya, ada penambahan 36 permohonan perselisihan hasil pemilu yang masuk sehari terakhir. Pada Senin dini hari jumlah PPHU yang diajukan sebanyak 87 permohonan.

Hasyim mengklaim, jika pihaknya telah mempersiapkan kemungkinan PHPKada 2020 di Mahkamah Konstitusi. "KPU telah melakukan serangkaian rapat koordinasi dan bimbingan teknis dalam persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilu MK," kata Hasyim, Selasa

(22/12).

Menurut dia KPU telah mengadakan rapat koordinasi secara internal dengan KPU daerah maupun eksternal dengan MK untuk mempersiapkan kemungkinan gugatan perselisihan hasil pemilu tersebut.

"Bimtek internal dilaksanakan oleh KPU dengan peserta KPU provinsi kabupaten kota penyelenggara pilkada. Bimtek eksternal oleh MK dengan peserta KPU provinsi kabupaten kota penyelenggara pilkada," katanya.

Dalam menghadapi PPHU di MK, kata dia KPU mengkoordinasikan soal penyediaan jawaban dan penyerahan alat bukti ke MK, supaya dapat berjalan satu pintu dan dapat dikendalikan oleh KPU Pusat. "Advokat atau kuasa hukum disiapkan oleh masing-masing KPU provinsi kabupaten kota penyelenggara pilkada," katanya.

Hasyim mengatakan sesuai tahapan, jadwal pengajuan permohonan PPHU ke MK adalah 3 kali 24 jam terhitung sejak tanggal dan jam penetapan hasil penghitungan suara pilkada.

Sementara untuk penetapan calon kepala daerah terpilih baru akan ditetapkan paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitakan permohonan yang terregistrasi. (khf/fin)

Banyak Aduan Terkait Politik Uang

JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan politik uang dalam Pilkada serentak 2020 tergolong tinggi.

Dari data penanganan dugaan pelanggaran politik uang yang berjumlah 262 kasus yang telah sampai pengkajian dan penyidikan, terdapat 197 laporan masyarakat dan 65 kasus merupakan temuan Bawaslu. Angka penanganan politik uang tersebut dikumpulkan hingga 17 Desember 2020.

"Ternyata politik uang lebih banyak laporan dari pada temuan," ujar Dewi dalam keterangannya.

Dewi menyebutkan sudah ada enam putusan tindak pidana politik uang dan semuanya dinyatakan bersalah. Putusan itu tersebar di Kota Tarakan Kalimantan Utara, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah, Kota Tangerang Selatan Banten, Kota Cianjur Jawa Barat masing-masing mendapatkan vonis 36 bulan dan vonis 200 juta rupiah. Sementara di Kabupaten Pelalawan Riau mendapatkan vonis enam bulan percobaan dan vonis 200 juta rupiah. "Ini satu hal yang baik dalam

proses penanganan pelanggaran mudah-mudahan dapat memberi efek jera," katanya.

Sebagai informasi UU Pilkada Pasal 187A ayat satu (1) disebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Ayat dua (2) pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (jpg)

Kepala Daerah Baru Dituntut Cepat Adaptasi

JAKARTA - Tahun 2021 akan menjadi saat-saat yang berat bagi pemerintah daerah. Pasangan calon terpilih pada Pilkada 2020 diharapkan mempercepat adaptasi. Khususnya sosok yang baru masuk dunia politik dan birokrasi.

Direktur Eksekutif Komite Pemantapan Pelaksana Otonomi Daerah (KPOD) Robert Endi Jaweng menyatakan, ada dua tantangan berat yang dihadapi pemda. Pertama, tekanan fiskal akibat menurunnya aktivitas ekonomi. Dampak fiskal dari kegiatan ekonomi yang menurun tahun ini baru terasa

tahun depan. "Pajak akan sulit. Retribusi tidak akan seoptimal tahun-tahun sebelumnya," ujarnya dalam diskusi kemarin (23/12).

Imbasnya, alokasi dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tersedia akan menurun. Dengan penurunan pendapatan, lanjut Endi, kepala daerah dituntut memutar otak guna memastikan kebutuhan rutin, pelayanan publik, dan program-program prioritas berjalan maksimal. Kebijakan penanganan pandemi yang semakin berbasis lokal menjadi tantan-

gan kedua. Dengan pendekatan tersebut, penanganan pandemi lebih menuntut kiprah pemda.

"Pemda menghadapi situasi ketika kepala daerah harus bertindak cepat karena sudah berbasis lokal. Di sisi lain, pelurunya tidak banyak. Peluru dalam artian fiskalnya itu tidak kuat," imbuhnya.

Karena itu, Endi menyarankan untuk mulai mencari solusi atas tantangan tersebut. Dalam hal APBD anjlok, misalnya, paslon terpilih perlu menyiapkan langkah strategis dengan mencari sumber pembiayaan baru. Di antaranya, KPBU,

CRS, obligasi, dan pinjaman daerah. "Kalau kepala daerah bermental tukang belanja, artinya dia membelanjakan uang dan uang itu menunggu transfer dari pusat, mati daerah itu," ungkapnya.

Endi merekomendasikan paslon kepala daerah yang terpilih mulai menyiapkan diri secara maksimal. Sebelum pelantikan, masih ada waktu untuk belajar dan menyiapkan diri. Dengan begitu, adaptasi tidak membutuhkan waktu lama. "Pemerintah pusat memfasilitasi penguatan kapasitas, transfer pengetahuan, dan sebagainya," tuturnya.

Direktur Institut Otonomi Daerah (IOD) Djohermansyah Djohan menambahkan, ke depan, kepala daerah harus punya banyak akal. "Kalau dia tidak kreatif, tidak inovatif, tidak menggunakan pendekatan kolaboratif, ya game is over," kata mantan Dirjen Otda Kemendagri tersebut. Khusus kepala daerah baru, pria yang akrab disapa Prof Djo itu menyarankan untuk melakukan banyak kolaborasi. Birokrasi, kelompok masyarakat, hingga perguruan tinggi perlu diajak bicara untuk membantu mengambil kebijakan. (far/c19/bay)

Lintas

Periksa Saksi Kasus PDU

ARGA MAKMUR - Polres BU masih melakukan penyelidikan atas laporan Saul Alim yang melaporkan manajemen PT. Purnawira Dharma Upaya (PDU) ke polisi. Laporan tersebut soal dugaan perusakan dan penguasaan lahan tanpa hak sejak tahun tahun 1998 lalu.

Kapolres BU AKBP. Anton Setyo Hartanto, S.IK, MH melalui Kasat Reskrim AKP. Jery S Nainggolan, S.IK menuturkan polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi. Namun belakangan terkendala dengan tidak hadirnya saksi yang diundang.

"Kita masih penyelidikan untuk mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Namun ada beberapa saksi, baik warga maupun dari perusahaan yang masih berhalangan menghadiri pemeriksaan," jelas Jery.

Hal ini yang membuat penyidik belum bisa mendapatkan keterangan yang jelas terkait laporan dugaan perusakan dan penguasaan lahan tersebut. Sedangkan hal tersebut sangat penting bagi penyidik untuk mendapatkan keterangan dan data yang jelas untuk memastikan status hukum.

"Jika seluruh saksi sudah kita mintai keterangan, alat bukti sudah kita dapatkan, maka kita bisa memutuskan apakah laporan tersebut memenuhi unsur untuk di tingkatkan ke penyidikan atau tidak," beber Jery.

Ia memastikan polisi tidak akan pandang bulu terkait permasalahan ini. Apalagi sebelumnya Polres sudah menahan Kades Datar Lebar, Amir Mahmud atas laporan PT PDU terkait kasus perusakan portal yang dibuat oleh perusahaan. "Selagi ada dua alat bukti yang cukup, kita akan tingkatkan ke penyidikan dan kita cari orang yang disangka bertanggungjawab tindak pidana tersebut," terang Jery. (qia)

Dua Proyek Gagal Lelang

ARGA MAKMUR - Tahun ini, dari 82 proyek fisik yang dilakukan lelang pengadaan, dua diantaranya batal dikerjakan karena gagal lelang. Penyebabnya

keterbatasan waktu sehingga tidak ada penawar dalam lelang paket Proyek Masker Plant RSUD Arga Makmur Rp 190 juta dan pengadaan box infectious sample transport senilai Rp 282 juta.

Sekda BU Dr. Haryadi, MM, M.Si menjelaskan dua kegiatan tersebut gagal lelang dan tidak bisa dilaksanakan tahun ini lantaran waktu yang tidak cukup untuk dilakukan lelang ulang. Hal ini adanya beberapa perubahan anggaran terkait dengan penanganan Covid-19.

"Dua paket pekerjaan tersebut tahun ini tidak kita laksanakan karena keterbatasan waktu, karena ada beberapa perubahan anggaran," terangnya.

Haryadi memastikan tahun depan Pemkab BU sudah bisa menyesuaikan belanja daerah dengan penanganan Covid-19. Sehingga untuk pelaksanaan kegiatan tahun depan, saat ini sudah mulai dilakukan lelang pengadaan. "Terutama yang sifatnya perencanaan. Sehingga memang kita lakukan proses lebih awal," jelasnya.

Menurutnya, hal ini dilakukan agar seluruh kegiatan bisa dilaksanakan lebih cepat dan di awal tahun anggaran. Setelah perencanaan tuntas, maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang pekerjaan fisik. "Kita lakukan percepatan pelaksanaan pembangunan sehingga program yang dilaksanakan bisa segera dirasakan masyarakat," katanya.

Menurut Haryadi, seluruh OPD juga diminta menyelesaikan dokumen pekerjaan fisik untuk dilakukan lelang paling lambat awal Maret. Sehingga ada waktu jika harus dilakukan lelang ulang atau masa perpanjangan dan tidak terjadi lagi gagal lelang. (qia)

Ajukan Pembangunan Wilayah Dalam Kota

ARGA MAKMUR - Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur kemarin menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Acara dihadiri seluruh Ketua RW dan RT. Mereka menyampaikan aspirasi pembangunan yang akan diajukan pada pemerintah.

Lurah Purwodadi, Sugeng Harsono mengatakan mayoritas masyarakat masih mengajukan pembangunan

infrastruktur. Diantaranya fasilitas kawasan pemukiman. "Kita akan lanjutkan hasil Musrenbang ini ke Musrenbang tingkat kecamatan dan nantinya akan masuk dalam Musrenbang Kabupaten," katanya.

Camat Arga Makmur, Jon Kenedi menuturkan pembangunan wilayah kota tetap menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah. Apalagi Kelurahan Purwodadi salah satu kelurahan dari lima kelurahan di BU,



TEPRA: Bupati BU, Mian dan Sekda Haryadi saat memimpin rapat TEPRRA, Rabu (23/12).

Yakin Serapan di Atas 97 Persen

ARGA MAKMUR - Pemkab Bengkulu Utara (BU) menggelar rapat Tim Evaluasi dan Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA), kemarin (23/12). Masih ada tiga OPD yakni Dinas Kesehatan, Kantor Kesbangpol dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendapatkan laporan merah.

Ketiganya tercatat memiliki serapan anggaran di bawah 90 persen dari belanja anggaran masing-masing. Sedangkan masa aktif tahun anggaran 2020 hanya tinggal beberapa hari lagi.

Bupati BU Ir. H. Mian usai memimpin rapat meyakini serapan anggaran

akhir tahun nanti di atas 97 persen. Hal ini lantaran tiga OPD yang mendapatkan laporan merah tersebut hanya tinggal melakukan pembayaran termasuk diantaranya proyek fisik yang sudah tuntas namun masih dalam proses pembayaran.

"Jadi saya yakin di atas 97 persen serapan anggaran. Artinya memang program yang dianggarkan sampai ke masyarakat," terangnya.

Namun ia mengakui tahun ini terjadi beberapa kali perubahan dokumen anggaran. Hal ini karena adanya kebijakan dan keputusan dari pemerintah pusat untuk pengalihan anggaran terkait penanganan Covid-

19. "Sehingga beberapa pekerjaan harus kita ditunda lantaran dananya dialihkan untuk penanganan Covid-19," jelasnya.

Selain anggaran yang terserap, ia juga meminta seluruh OPD juga memperhatikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Sehingga selain terlaksana, pertanggungjawaban anggaran juga wajib sesuai dengan aturan.

"Seluruh pertanggungjawaban juga saya minta tuntas dalam bulan ini. Sehingga kita bisa fokus dalam pelaksanaan anggaran awal tahun 2021 nanti," harap Mian.

Untuk tahun depan, Pemkab BU

juga tetap menganggarkan untuk penanganan kesehatan. baik proses pencegahan maupun penanganan medis yang dilakukan oleh Pemkab BU dan Satgas Covid-19. Hal ini seiring dengan masih terus meningkatnya kasus Covid-19 secara nasional maupun di BU.

"Kita tetap siapkan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan kita harapkan tidak ada lagi perubahan kebijakan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19. Yang jelas kita berharap Covid-19 segera tuntas sehingga rencana pembangunan bisa berjalan normal," pungkas Mian. (qia)

Hanya Rawat 4 Pasien Covid-19

ARGA MAKMUR - Hingga saat ini ada 61 kasus Covid-19 aktif di Bengkulu Utara. Sebanyak 4 pasien dirawat di RSUD Arga Makmur dan 4 pasien lagi dirawat di rumah sakit di Kota Bengkulu.

Sedangkan sisanya warga yang positif Covid-19 melakukan isolasi mandiri di rumah.

Kadis Kesehatan yang Juru Bicara Satgas Covid-19 BU, Samsul Maarif, SKM, M.Kes menerangkan RSUD Arga Makmur bukan hanya rumah sakit rujukan tingkat provinsi, namun juga RS rujukan tingkat nasional. Sehingga ia memastikan dengan kondisi kasus seperti sekarang, RSUD Arma masih mampu dan bisa melakukan penanganan kasus Covid-19.

"Namun kebanyakan berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit, dan hanya perlu pengawasan medis dari rumah untuk isolasi mandiri," katanya.

Selain memiliki ruang rawat khusus bagi kasus Covid-19, RSUD Arga Makmur juga memiliki 8 unit ventilator. Ventilator ini sangat penting sebagai alat bantu pernafasan untuk pasien Covid-19. "Mulanya ventilator yang disiapkan enam unit, saat ini kita sudah beli lagi dan total ada 8 Unit, tidak termasuk yang ada di IGD. Ini semua khusus jika dibutuhkan untuk penanganan Covid-19," terangnya.

Samsu mengaku dalam dua bulan atau bersamaan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di BU, ventilator tersebut belum digunakan.

Sebab belum ada pasien yang membutuhkan bantuan ventilator dalam bernafas. "Rata-rata meskipun positif belum membutuhkan ventilator untuk bantuan pernafasan. Selain itu, memang mayoritas OTG atau kasus dengan gejala ringan," ujarnya.

Dengan terus meningkatnya kasus Covid-19 di BU, Samsu memastikan RSUD Arga Makmur siap melakukan penanganan pasien Covid-19. Bahkan saat ini alat pendeteksi seperti rapid test juga sudah tersedia di BU meskipun untuk swab masih harus dikirimkan ke Bengkulu.

"Untuk swab kita hanya mengambil sampel, selanjutnya untuk pengecekan kita kirimkan ke laboratorium provinsi," ucapnya. (qia)



PARIPURNA: Wabup BU, Arie Septia Adinata saat menyampaikan persetujuan pengesahan Raperda Jamkesda menjadi Perda dalam paripurna DPRD BU, Rabu (23/12).

Keluarga Pasien Dapat "Uang Saku"

Perda Jamkesda Disetujui

ARGA MAKMUR - Rapat paripurna DPRD BU mengesahkan Raperda Jamkesda menjadi Perda, kemarin. Raperda inisiatif DPRD ini disahkan dengan disetujui Pemkab BU untuk menjadi Perda dalam paripurna yang dihadiri Wabup BU, Arie Septia Adinata, SE, M.A.P.

Selain seluruh masyarakat wajib memegang jaminan kesehatan baik yang dibiayai APBD, APBN maupun dari dana Corporate Social Responsibility (CSR), perda tersebut juga mengatur bahwa anggota keluarga yang mendampingi keluarganya yang sakit untuk dirawat juga akan mendapatkan uang saku dari pemerintah atau CSR.

Ketua DPRD BU, Sonti Bakara, SH menjelaskan dengan disahkan perda tersebut maka seluruh masyarakat kurang mampu akan mendapatkan Jamkes. Selain itu keluarga yang menjaga juga akan mendapatkan uang saku selama menjaga pasien.

"Karena selama ini, meskipun sudah ada Jamkes, warga miskin sungkan berobat, apalagi dirawat. Hal ini karena mereka tidak memiliki uang selama menunggu keluarganya yang sakit," terangnya.

Ia memastikan pemberian uang saku tersebut tidak

mengubah format anggaran dalam APBD 2021 yang sudah disahkan. Pasalnya, pemberian uang saku dirancah dibiayai oleh CSR atau Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang juga sudah ada perdananya.

"Nantinya tinggal dijabarkan dalam Perbup yang dibuat Bupati. Yang jelas ini sangat membantu masyarakat dalam memudahkan mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan," jelas Sonti.

Ia juga berharap nantinya perusahaan-perusahaan yang ada di BU patuh dalam melaksanakan Perda TJSLP yang diantaranya digunakan untuk pembiayaan Jamkesda bagi warga tersebut. Dinilainya ini sebagai peran serta swasta dalam pembangunan masyarakat bidang kesehatan. "Jadi tidak perlu aturan khusus terkait TJSLP tersebut, cukup memasukkan daftar TJSLP yang diantaranya pembiayaan Jamkesda," ujar Sonti.

Sementara itu, Wabup mengemukakan Pemkab melihat memang ada kemudahan yang akan didapatkan masyarakat terutama di bidang kesehatan sehingga menyetujui raperda tersebut untuk disahkan menjadi perda. "Kita sangat mendukung. Selain itu kita juga akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan DPRD dalam penerapannya," pungkas Arie. (qia)



MUSRENBANG: Warga menyampaikan aspirasinya dalam Musrenbang Kelurahan Purwodadi.

selain Gunung Alam, Pasar Lais, Kemumu dan Lubuk Durian.

"Namun tentunya nantinya akan kita bahas dalam Musrenbang Kecamatan dan melihat skala prioritas anggaran," terangnya.

Jon mengakui saat ini anggaran pemerintah terbatas, sedangkan tanggung jawab pembangunan yang besar, termasuk di wilayah Kota Arga Makmur. Di Kota Arga Makmur cukup banyak permintaan pembangunan masyarakat terutama pembangunan fisik. "Pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah sangat merata. Tahun ini juga kita lakukan perbaikan beberapa titik jalan, baik di kawasan umum maupun kawasan pemukiman," beber Jon. (qia)

HUBUNGI DISTRIBUTOR HU - SENG Jl. Tenggiri No.20 Depan Pasar Ikan Kampung Cina Kota Bengkulu HP. 0821 8270 7707 Pesanan : Dalam kota diantar - luar kota dikirim

KORPRI IDAMAN ESTATE
Rumah Type 36 Subsidi
Lokasi: Jl. Korpri IV RT 08 RW 05 - BENTIRING
Milih Rumah Idaman Anda bersama Kami

PROMO BULAN INI 5 JUTA TERIMA KUNCI SKB
ANGSURAN MULAI Rp. 877.741
DIDUKUNG KPR Bank BTN

Segera Hubungi...!! 0852 6791 1112
0853 8431 2727 0821 8265 4441
PT. IDAMAN GRAHA MANDIRI
Kantor Pusat: Bako No. 8 - 9 J. Trilaksana - Kol. Cempaka Permai Telp. (0736) 2219 - BENGKULU

TELEPON PENTING

RSUD Tais	(0736) 91285
PLN	Tais (0736) 91291
Polres Seluma	081373849882
Kantor BPBD/PBK Seluma	(0736) 7391000

2021, Gaji Bidan PTT Dibayar Lewat APBD

SELUMA - Untuk mencegah kembali terjadinya permasalahan pembayaran gaji terhadap Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) seperti tahun ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Seluma akhirnya mengambil langkah pasti. Yaitu menganggarkan pembayaran gaji melalui APBD Kabupaten Seluma.

Sehingga dipastikan pembayaran gaji terhadap seluruh bidan PTT pada tahun 2021 nanti tidak akan terkendala seperti tahun ini. Yang mana untuk mekanisme pembayarannya sendiri masih direncanakan. Apakah pembayaran gajinya dilakukan perbulan atau pertrivulan.

Kepala Dinas Kesehatan Seluma, Rudi Syawaludin S.Sos mengatakan bahwa pembayaran gaji bidan PTT tahun 2021 nanti telah dianggarkan melalui APBD Seluma. Setidaknya, anggaran yang telah disiapkan dalam APBD itu untuk pembayaran gaji tersebut sekitar Rp 2 miliar.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian seperti tahun ini. Yang mana karena tidak adanya penganggaran gaji, para bidan PTT sempat tidak mendapatkan gajinya selama 11 bulan dari Januari lalu. Lantaran pada tahun 2020 ini sempat direncanakan pembayaran gaji bidan melalui Dana Desa.

"Iya kita anggar, jadi untuk pembayaran gaji tahun 2021 nanti sudah ada, sehingga kejadian seperti tahun ini dipastikan tidak akan terulang lagi," jelasnya.

Selain itu, Rudi menambahkan tidak ada perubahan untuk besaran gaji bidan PTT. Yaitu masih sama seperti tahun 2020 ini sebesar Rp 800 ribu perbulannya. Sedangkan untuk total bidan PTT sendiri akan dilakukan penyesuaian. Pada tahun 2021 nanti akan mengugaskan 1 bidan PTT di setiap desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Seluma. Adapun jumlahnya nanti diperkirakan akan sebanyak 202 bidan PTT sesuai jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Seluma.

"Itungannya sekarang itu disetiap desa/kelurahan ada 1 orang, jadi tidak bisa lebih dari dua atau tiga orang lagi," lanjutnya. (cup)

Satgas Tak Keluarkan Izin Keramaian

SELUMA - Saat ini, kegiatan keramaian yang mengumpulkan banyak massa tidak diperbolehkan. Bahkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 juga tidak pernah mengeluarkan surat izin. Diketahui, BPBD Seluma sama sekali tak pernah mengeluarkan izin keramaian ataupun surat rekomendasi izin keramaian.

"Kalau izin keramaian memang kita gak pernah mengeluarkan, selama ini yang kami keluarkan itu hanya izin akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)," sampai Kepala BPBD Kabupaten Seluma, Arben Muktiar, M. Si melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Pauzan Aroni SE.

Pauzan juga menerangkan, dalam mengeluarkan izin akan nikah pihaknya juga telah menentukan terkait dengan jumlah orang yang ikut di dalam acara akad nikah. Hal tersebut dilakukan guna untuk mencegah adanya keramaian pada saat pelaksanaan akad nikah. Adapun maksimal masyarakat yang hadir dalam kegiatan akad nikah itu berjumlah 10 orang. (cup)

Satu Pasien Covid, Meninggal Dunia

SELUMA - Kasus pasien positif Covid-19 meninggal di Kabupaten Seluma bertambah pada Rabu (23/12) kemarin. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Seluma mencatat terjadi penambahan satu kasus pasien meninggal dunia. Sehingga jumlah total pasien positif yang meninggal dunia sebanyak 10 kasus. Sedangkan untuk jumlah kasus aktif positif Covid-19 saat ini menjadi 17 orang.

Kepala Dinas Kesehatan Rudi Syawaludin, S.Sos melalui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Ahmad Tavip SIP membenarkan hal tersebut. Yang mana jumlah total pasien aktif saat ini sebanyak 17 orang. Lantaran terjadinya penambahan kasus pasien meninggal dunia. Adapun jumlah pasien meninggal dunia sebanyak 10 kasus yakni meninggal dunia sebanyak 8 pasien dan meninggal probable sebanyak 2 pasien.

Pasien tersebut tidak meninggal dunia di Kabupaten Seluma. Namun meninggal saat sedang menjalani perawatan di RSMY Kota Bengkulu. Bahkan, pemakaman pasien tersebut dilaksanakan di Kota Bengkulu.

"Meninggal saat sedang dirawat RSMY, dimakamkan di Kota Bengkulu, ini berdasarkan keterangan dan kesepakatan keluarganya," sampai Tavip.

Pasien yang meninggal dunia tersebut memiliki penyakit penyerta dan berusia 57 tahun. Untuk pemakamannya sendiri dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Sementara itu, untuk pasien lainnya yang tidak memiliki penyakit penyerta dan tanpa gejala menjalani isolasi mandiri. Sedangkan apabila memiliki penyakit dan membutuhkan perawatan maka akan dirawat di RSMY Kota Bengkulu.

"Laki-laki usia 57 tahun, warga Seluma, memiliki penyakit penyerta," pungkash Tavip. (cup)



SIDAK: Bupati Seluma bersama rombongan saat melakukan sidak ke sejumlah titik lokasi proyek di seputaran Kota Tais, kemarin.

YUDI/RB

2021, KBM Sekolah Tetap Daring

Seluma Masuk Zona Merah

SELUMA - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Seluma saat ini tengah menyiapkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan sistem tatap muka. Setelah sempat di rumahkan sejak Maret lalu, sempat direncanakan akan kembali dibuka pada bulan Januari 2021 mendatang.

Namun, dalam surat keputusan bersama (SKB) empat menteri, sekolah boleh melaksanakan tatap muka apabila berstatus zona hijau. Maka dari itu, Dispendik Kabupaten Seluma belum bisa memastikan kapan rencana KBM tatap muka di sekolah yang ada di Kabupaten Seluma bisa dilaksanakan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, Emzaili Hambali MPD membenarkan hal tersebut. Memang sempat direncanakan sekolah mulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD) hingga TK serta PAUD di Kabupaten Seluma akan kembali melakukan KBM

tatap muka pada Januari 2021 mendatang.

Namun setelah pihaknya menerima SKB dari 4 menteri yakni Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akhirnya rencana itu terpaksa dirubah. Dalam surat keputusan itu dicantumkan apabila sudah zona hijau baru diperbolehkan belajar dengan sistem tatap muka.

"Dalam surat menteri itu dicantumkan zona hijau yang diperbolehkan untuk bertatap muka, sementara untuk zona merah itu tetap belajar dari rumah," sampainya.

Lanjutnya, dengan masih terus bertambahnya kasus positif Covid-19 di Kabupaten Seluma maka di pastikan sampai waktu yang belum ditentukan proses belajar tatap muka belum bisa dilaksanakan. Diketahui, saat ini saja masih ada 18 pasien positif aktif yang ada di Kabupaten Seluma. Bahkan Bupati Seluma juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) larangan berkerumun.

"Kami sudah mengusulkan agar penetapan zona dibagi berdasarkan zona kecamatan, tapi itu tidak bisa karena itu aturan nasional, dan untuk sementara masih belajar dari rumah, belum tahu sampai kapan," terangnya.

Ditambahkannya, sebelumnya rencana proses belajar tatap muka kembali akan di mulai di awal September lalu namun hal itu dibatalkan karena Kabupaten Seluma kembali ke zona merah. Bahkan surat izinnya sudah siap. Kemudian, direncanakan kembali pada Januari 2021 namun tampaknya masih belum bisa terealisasi. Saat ini, seluruh sekolah telah siap dalam melaksanakan sistem KBM secara tatap muka.

Dimana kesiapan itu adalah telah menyediakan sarana dan prasarana dalam pencegahan penularan virus corona sesuai dengan protokol kesehatan. "Saat ini seluruh sekolah telah siap dalam melaksanakan sistem KBM secara tatap muka, sarana dan prasarana pendukung prokes juga telah siap, tapi karena kondisi terpaksa kembali ditunda," pungkashnya. (cup)



TUTUP: Sekolah yang ada di Kabupaten Seluma masih ditutup dan menerapkan sistem belajar di rumah.

YUDI/RB

Pulang DL, Wajib Lakukan Swab

SELUMA - Dengan semakin meningkatnya kasus positif Covid-19 di Kabupaten Seluma, Bupati Seluma meminta seluruh pejabat maupun ASN di lingkungan Pemkab Seluma harus melakukan swab setelah pulang dari dinas luar (DL). Bahkan, termasuk juga para anggota DPRD Seluma. Ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dikarenakan semua pihak harus mendukung dan bersinergi untuk mengembalikan Kabupaten Seluma menjadi zona hijau.

"Semuanya, ASN, Pejabat maupun anggota dewan, apabila pulang dari DL wajib untuk melakukan swab," sampai Bupati Seluma, H Bundra Jaya SH MH.

Bupati juga meminta agar semua pihak dapat mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dengan selalu memakai alat pelindung diri (APD) seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kegiatan berkerumun. Bupati mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dalam upaya pemutusan penyebaran Covid-19. Hal ini bisa terlaksana apabila semua lapisan bisa saling bersinergi.

"Untuk prokes juga kita harapkan bisa terus diterapkan dalam setiap aktifitas sehari-hari," lanjut Bundra. Di sisi yang sama, Ketua DPRD Seluma, Nofi Erian Andesca, S.Sos menyampaikan bahwa pada prinsipnya memang pihaknya sudah menerapkan hal demikian. Dirinya selalu menyarankan apabila ada anggota DPRD yang baru pulang dari DL untuk menjalani swab maupun rapid tes. Terutama apabila ada anggota DPRD



SWAB: Bupati Seluma, Bundra Jaya saat melakukan swab antigen oleh petugas medis di ruang kerjanya, kemarin.

YUDI/RB

maupun staff yang ikut mengalami penurunan kesehatan.

Selain itu, DL yang dilakukan juga tidak sembarangan karena dipilih dengan melihat kepentingan dan urgensinya.

"Memang waktu mengugaskan selalu

melihat kepentingan dan urgensinya dan juga zona daerah yang akan dikunjungi, jadi sudah lama kita sarankan apabila ada anggota maupun staff yang baru pulang DL untuk melakukan cek kesehatannya," tutup Nofi. (cup)

DI JUAL RUKO 2 LANTAI

Lokasi Strategis

Lokasi: Jl. M.T. Haryono Penggantungan, Kec. Ratu Samban, Ruko 2 tingkat di dekat simpang Sentiong, Kota Bengkulu. UK. 3,7m x 14m Harga nego Minat Hub. April 0813 7347 7299

JUAL RUKO

Dijual Ruko letak strategis depan RS DKT Kompi Bengkulu (pas di depan poliklinik RS DKT) sebelah kiri RIM padang dan sebelah kanan warung Bakso

fasilitas : 1 kamar, kamar mandi, ruang masak, sumur bor & tedmon, cocok untuk usaha apa saja. Harga 360 juta nego Minat hubungi : 082179363606 / 082375706151

JUAL TANAH/RUMAH

Luas Tanah 634 M2, SHM, Rumah Fas : 1 R. Tv/Keluarga, 3 Kmr Tidur, 1 R. Tamaru, 2 Teras Muka dan Belakang, 1 R. Makan, 2 K. Mandi, 1 R. Masak Tanah Sudah Dipagar Keliling, Pagar Besi dan Tembok Alamat : Jl. Kapuas 3 Dalam Rw. 05/ Rt. 17 No. 34 Kel. Padang Harapan Bkl Hubungi : 0878 9496 1917 0819 1931 8688 (Berminat silahkan cek lokasi)



SAHKAN: Pengesahan RABPD Bengkulu Selatan (BS) Tahun Anggaran 2021 menjadi APBD selesai dilakukan oleh DPRD BS dan Pemda BS beberapa waktu lalu.

APBD Rp 900 M, Pilih Program yang Strategis

KOTA MANNA -Pengesahan APBD tahun 2021 baru saja digelar, oleh sebab itu DPRD Bengkulu Selatan (BS) mendorong agar pemerintah daerah bisa menjalankan program yang benar-benar menjadi skala prioritas, sebab dengan anggaran yang turun menjadi Rp 900 miliar tentu harus diasiasi dengan baik. Meski mengalami devisa hingga Rp 31 miliar namun pengesahan APBD

tahun 2021 baru saja digelar oleh DPRD dan Pemkab BS. Dalam pengesahan APBD ini, DPRD berharap dengan anggaran yang turun menjadi Rp 900 miliar, harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjalankan program strategis. Ketua DPRD BS, Barli Halim mengatakan, devisa hingga Rp 31 miliar ini disebabkan pandemi Covid-19, sehingga dirinya berpesan agar pemerintah daerah bisa

tetap mensaving anggaran guna menangani Covid-19, di BS. Namun demikian Barli meminta pemerintah daerah tidak mengesampingkan skala prioritas pembangunan fisik ditahun 2021. Sebab pihak DPRD BS selama tahun 2020 melihat belum ada kegiatan fisik yang bermanfaat untuk masyarakat. Bahkan dalam beberapa kali sidang DPRD BS banyak bangunan yang

wajib diperbaiki tahun depan, mulai dari jalan hingga jembatan. "Optimalkan skala prioritas, utamanya penanganan Covid-19 yang belum selesai dan beberapa kegiatan fisik yang urgent," terang Barli. Selain itu, Pemkab BS juga wajib melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pada sektor pendidikan. Karena pihak DPRD BS menilai pengembangan SDM di du-

nia pendidikan sangat penting bagi kemajuan daerah. Sebagai contoh, Barli menyebutkan Pemda harus memperhatikan betul anak-anak prestasi disekolah agar dibina dengan baik. Selain itu guru-guru harus sejahtera. Selain itu sekolah-sekolah harus dapat bantuan agar tidak ada lagi sekolah yang tidak layak huni. "SDM penting, majunya daerah karena SDM yang mumpuni," cetus Barli. (tek)

Dewan Dukung Tunda KBM Tatap Muka

KOTA MANNA - Masih meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) menjadi perhatian semua pihak, termasuk DPRD BS. Anggota Komisi III DPRD BS mendukung langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang menunda rencana untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di tahun 2021 dengan sistem tatap muka.

Ketua Komisi III DPRD BS Holman, SE mengatakan, saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi dan terus mengalami peningkatan. Bahkan berbagai acara yang mengundang kerumunan tidak lagi diperbolehkan oleh Pemda BS. Oleh sebab itu dewan sangat mendukung langkah Pemkab BS melalui Dikbud yang belum berani memastikan KBM secara tatap muka akan dibuka tahun 2021.

Menurut Holman proses belajar masih bisa dilakukan meskipun tidak melalui KBM tatap muka. Yakni dengan cara proses

daring. Apabila pemerintah dekat membuka KBM secara tatap muka dikawatirkan terjadinya cluster baru di sekolah. "Dikbud lebih tahu yang terbaik, jadi apapun langkah pemerintah kami dukung terus KBM yang belum dilakukan secara tatap muka," terang Holman

Hal yang sama juga disampaikan toko masyarakat dan juga mantan anggota DPRD BS Junaidi, ia menilai keselamatan pelajar menjadi fokus utama ditengah pandemi. Oleh sebab itu dia berharap pemerintah tidak gegabah untuk membuka KBM. "Tetap ambil langkah terbaik, kalau memang belum mau KBM tatap muka maka jangan dulu," ujarnya.

Sebelumnya, pihak Dikbud BS menyatakan Januari 2021 belum dipastikan KBM dilakukan secara tatap muka. Karena saat ini Dikbud menilai kasus covid di BS dalam zona yang tingkat tinggi. Oleh sebab itu Dikbud belum bisa memastikan kapan sekolah akan kembali normal. (tek)

Lintas Kondisi Wabup Membaik

KOTA MANNA - Kondisi kesehatan Wakil Bupati Bengkulu Selatan (B) Rifa'i Tajuddin pasca dinyatakan positif Covid-19 terus menunjukkan grafis membaik. Bahkan Wabup saat ini melakukan isolasi mandiri di Kota Bengkulu.

Meminimalisir sebaran Covid-19 sekaligus memutus mata rantai pandemi Covid-19 di BS, Wabup akhirnya memilih isolasi mandiri di kediaman keluarganya di Kota Bengkulu. Kepastian isolasi di luar Kabupaten BS ini disampaikan oleh kepala Dinas Kesehatan BS Siswanto, S.Sos, M.Si

Dikatakan oleh Siswanto, kondisi Wabup masih dalam pengawasan, baik keluarga maupun tim medis. Bahkan kondisi Wabup pun terus menunjukkan grafis membaik. Selain itu selama menjalani isolasi mandiri di kediaman keluarganya di Kota Bengkulu Wabup BS juga intens melakukan komunikasi melalui selluler.

"Ya pengawasan terus dilakukan, Wabup memilih pergi ke Kota Bengkulu untuk isolasi mandiri. Kondisinya juga terus membaik," jelas Siswanto

Sebelumnya Wabup dinyatakan positif Covid-19 pada Jum'at malam (18/12), kala itu ia baru pulang dari Jakarta dalam rangka urusan kedinasan. Sementara itu Bupati BS Gusnan Mulyadi mendukung penuh untuk kesembuhan Wabup. Untuk itu Bupati meminta doa pada masyarakat BS agar Covid-19 cepat hilang dan masyarakat dapat beraktifitas normal.

Bupati mengajak warga BS untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Baginya, keselamatan masyarakat nomor satu oleh sebab itu segala aktifitas yang mengundang orang banyak masih dilarang saat ini. "Doakan semua orang yang terpapar dapat melaluinya dengan sabar, dan kita semua harus mendukung langkah pemerintah," ajak Gusnan. (tek)



DIGIRING: EK (16), tersangka Curanmor saat digiring ke Mapolres BS.

Residivis Curanmor juga Beraksi di Luar BS

KOTA MANNA - Setelah diamankan Tim Opsnal Polres Bengkulu Selatan (BS) tersangka curanmor yakni EK (16) warga Desa Karang Agung, Kecamatan Kedurang diketahui bukan hanya terlibat di wilayah hukum Polres BS. EK diketahui pernah beraksi di wilayah Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.

EK merupakan residivis 10 TKP di wilayah hukum Polres BS. Meskipun baru berusia 16 tahun, namun keahlian EK dalam melakukan pencurian motor tidak diragukan lagi. Dengan hanya memutus kabel-kabel motor dia bisa menghidupkan setiap motor yang ia curi.

Namun setelah diamankan Tim Opsnal Polres BS, EK mengakui dirinya tidak hanya terlibat Curanmor di BS saja. Dia mengakui dirinya sempat mencuri motor di Ketahun Bengkulu Utara. Kapolres BS,

AKBP. Deddy Nata, S.IK melalui Kasat Narkoba Iptu. Edi Herwanto Purba mengakui pihaknya sempat mencari Tsk pencurian motor di wilayah Ketahun saat ia menjabat sebagai Kapolsek ketahun tahun 2019 lalu.

Namun demikian pihaknya sempat kehilangan jejak. Dan benar saja, EK kabur ke BS. "Ya benar orang ini, dia pernah beraksi di Ketahun saat saya menjabat Kapolsek," terang Edi. Sedangkan EK mengaku saat itu dirinya sedang berada di wilayah Ketahun lantaran berkebun. Melihat ada kesempatan, ia mencoba menggosak motor milik warga. Dan setelah itu dia pulang ke BS menghilangkan jejak. "Ia pak satu kali, setelah itu saya balik ke BS," ungkap EK.

Sementara itu Kasat Reskrim AKP. Rahmat Hadi Fitrianto, SH, S.IK menyampaikan pelaku

telah melanggar pasal 363. Di jelaskan Rahmat, EK adalah residivis curanmor. Selama beraksi EK menggosak motor yang kurang pengamanan dari para korban. Bahkan untuk menghidupkan motor curian, EK sangat mahir dengan hanya memutus kabel kabel.

Namun demikian, Kasat Reskrim tidak langsung percaya pengakuan pelaku yang hanya beraksi di 10 TKP dan seorang diri. Untuk itu pihaknya masih akan melakukan pengembangan.

"Ancaman 5 tahun penjara, ini residivis. Kami akan lakukan pengembangan lagi terhadap EK," ujar Kasat Reskrim.

Diketahui, EK berhasil diamankan oleh tim Totaici Polres BS di rumahnya (23/12). EK berhasil dibekuk lantaran mencuri beraksi mencuri motor di Kecamatan Air Nipis 04 Desember lalu. (tek)



TATA: Penataan median jalan dan wajah Kota Manna terus dilakukan Pemkab BS.

Sulap Wajah Kota

DLHK Siapkan 30 Bibit Pohon

KOTA MANNA - Ingin tampilan wajah Kota Manna lebih berseri dan hijau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) menyiapkan ribuan bibit tanaman yang akan dibagikan ke masyarakat.

DLHK BS terus berinovasi agar wajah kota terasa sejuk dan nyaman dengan menanam sejumlah pepohonan penghijauan di jalan protokol maupun taman kota. Terlebih selain penanaman penghijauan, pihak DLHK BS juga berinovasi menanam tanam di sepanjang jalan lintas di kota berupa tanaman rempah-rempah.

Untuk tanaman rempah-rempah di median jalan saat ini mulai dirasakan masyarakat manfaatnya. Sedangkan tahun 2021, pihak DLHK BS telah menyiapkan ribuan bibit tanaman yang rencananya akan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan.

Kepala DLHK Kabupaten BS Ir H. Jonior Hafis mengatakan, pihaknya akan terus berinovasi untuk daerah khususnya menata tanaman dan taman kota yakni dengan di tanam penghijauan di median jalan baik tanaman rempah-rempah maupun yang lainnya. Ini dilakukan tak lain agar wajah kota terlihat sejuk dikelilingi oleh tumbuhan hijau.

Sebagai bentuk inovasi, ditahun 2021 pihaknya akan mengadakan pembagian bibit gratis sebanyak 30 ribu yang nantinya akan dibagikan serta sebagian ditanam di median jalan dengan berbagai jenis. Sedangkan untuk dana pengadaan bibit sama sekali tak menyentuh dana APBD melainkan bibit tersebut diusulkan melalui pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI.

Jonior menyebutkan, bantuan dari Kementerian ini sangat membantu Pemkab BS, sebab apabila harus menggunakan dana dari daerah maka akan menguras dana hingga Rp 600 juta an. Namun dengan adanya bantuan dapat membantu DLHK BS.

"Jika dikalikan dari 30 ribu bibit bisa menghabiskan anggaran Rp 600 juta pertahun. Namun karena usulan bantuan dari pihak kementerian, maka bisa menekan anggaran daerah. Dan bisa menyulap wajah kota lebih hijau dan berseri," terang Jonior.

Ditambahkan Jonior, DLHK setiap tahunnya selalu melakukan penataan serta perawatan tanaman penghijauan guna menciptakan lingkungan yang asri. Bahkan permasalahan sampah saat ini mulai teratasi, meskipun diakui Jonior masih kekurangan armada pengangkut sampah.

"Tinggal bagaimana dukungan masyarakat agar BS tetap sehat dengan kebersihan yang terjaga," jelas Jonior. (tek)

Diduga Dendam Lama, Tewas di Tangan Teman

KOTA MANNA - Warga Desa Keban Jati, Kecamatan Air Nipis selasa malam (22/12) dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di kantor desa Keban Jati. Aksi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial IC (25) warga desa Keban Jati diduga karena dendam lama kepada korbannya, Hadi (24) warga desa Babatan Ulu, Kecamatan Seginim.

Aksi pembunuhan ini membuat heboh warga di Kecamatan Air Nipis dan Seginim, sebab dua orang pemuda yang saling kenal

ini terlibat aksi perkelahian yang berujung kematian. Hadi harus merenggang nyawa usai mendapat luka tikaman dari temannya sendiri. Dan aksi pembunuhan ini terjadi tepat di halaman teras kantor Desa Keban Jati.

Dari data yang berhasil dihimpun, saat itu korban mendatangi kantor desa untuk menggunakan jaringan internet desa, namun tak lama berselang korban sudah ditemukan bersimbah darah usai terlibat cekok mulut dengan pelaku.

Hal ini juga dipertegas oleh salah seorang warga Keca-



TUNJUKKAN: Warga setempat menunjukkan TKP pembunuhan di Desa Keban Jati, Kecamatan Air Nipis Selasa malam (22/12).

matan Seginim, Wadimin, mang sudah saling mengenal satu sama lain dan kan-

SH. TRUSS

RANGKA ATAP
BAJA RINGAN / KUDA - KUDA METAL
PENGANTI KAYU

- SH. TRUSS bebas perawatan
- SH. TRUSS Kuat, Ringan, dan Anti Gempa
- SH. TRUSS terbuat dari ZINCALUME / ALUZINC
- SH. TRUSS di jual batangan

Hubungi **SINAR HARAPAN**
Jl. Kiriwalu No.87 Kebun Tebeng Bengkulu
Tlp. (0736) 21653, Hp. 0822 7838 6870

KUPVA
KURANG PANGGILAN
VALASIA

PT. NURTANI JAYA
Jual Beli Mata Uang Asing

Alamat: Jl. Soeprapto No.1
Telp: 0736- 343017
"Depan Bank UOB"

LINTAS

Waspada, Jelang Tahun Baru Rawan Lakalantas

KOTA BINTUHAN - Mendekati pergantian tahun dari tahun 2020 ke tahun 2021 jumlah laka lantasi di Kaur terus meningkat. Baik itu laka tunggal atau pun tabrakan di wilayah Kabupaten Kaur. Bahkan dalam tempo dua hari ini sudah dua kejadian laka lantasi di Kaur. Sebelum Truk Box dengan Honda Jazz tabrakan di jembatan Luas Tanjung Iman pada Selasa sore (22/12). Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini namun mobil Honda Jazz mengalami kerusakan di bagian depan dan samping.

Kemarin (23/12) sekitar pukul 10.00 WIB laka tunggal terjadi di Tebing Latihan Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan. Laka ini menimpa truk warna kuning nopol BD 8786 AR yang dikemudikan Wiwid (31) warga Desa Ulak Pandan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur. Truk yang mengangkut sawit tersebut nyaris saja masuk ke dalam jurang akibat laka tunggal yang terjadi kemarin.

Truk bermuatan sawit tersebut masuk ke dalam siring setelah banting setir menghindari terjadinya laka lantasi. Peristiwa itu terjadi kemarin, akibat berusaha menghindari mobil Toyota Innova yang melintas dari arah Lampung menuju Bengkulu. Truk yang melaju dari arah Bengkulu ke Lampung terpaksa mengelak hingga nyaris terbalik.

"Saat ini kendaraan yang melintas mulai ramai dan dengan kecepatan tinggi untuk itu kita himbau kepada masyarakat dan pengguna jalan untuk waspada. Apalagi jelang tahun baru ini jumlah laka terus meningkat, karena banyaknya kendaraan melintas dari Bengkulu ke arah Lampung dan sebaliknya. Bahkan ini laka tunggal yang kedua di Kaur sebelumnya di Tanjung Kemuning dan pada Selasa yang lalu di Tanjung Iman laka lantasi. Untuk itu kita himbau pengendara waspada saat melintasi Kaur," terang Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK, MH melalui Wakapolsek Tanjung Kemuning Ipda Perangin Angin kemarin.

Dengan terus meningkatnya laka ini jelang tahun baru yang akan datang, dipastikan jumlah pengendara yang masuk ke Kaur akan terus meningkat. Untuk itu para pengendara motor untuk waspada saat di jalan raya. Terutama di wilayah yang padat penduduk dan berada di jalur lintas yang ada di Kaur. Peningkatan kendaraan akan terjadi pada saat hari terakhir tahun 2020 dan hari pertama tahun 2021 yang akan datang.

"Pada malam pergantian tahun biasanya peningkatan jumlah kendaraan di Kaur sangat padat terutama motor. Untuk itu kita himbau untuk tetap waspada jangan sampai nantinya jadi korban laka lantasi," pungkaskan Waka Polsek Tanjung Kemuning. (cik)



NYARIS: Truk pengangkut kelapa sawit nyaris terbalik karena berusaha mengelak mobil Innova yang melaju kencang.

Tiga Perwira Naik Pangkat

KOTA BINTUHAN - Pada Januari tahun 2021 sejumlah perwira di jajaran Polda Bengkulu naik pangkat. Termasuk juga di jajaran Polres Kaur ada tiga perwira yang naik pangkat. Mereka terdiri dari dua Kapolsek dan Kasat di Mapolres Kaur.

Kapolsek Muara Sahung, Ipda. Yevi Mulyadi dari pangkat Ipda naik pangkat menjadi Iptu. Kemudian Kapolsek Kaur Selatan, Iptu. Johnny Silain naik pangkat menjadi AKP. Dan yang terakhir Kasat Narkoba, Iptu Rasi Ginting Samura naik pangkat menjadi AKP.

Kapolres Kaur, AKBP. Dwi Agung Setyono melalui Kabag Ops, AKP. Fahrul Ikhwan saat dikonfirmasi membenarkan kalau ada sejumlah perwira dan bintang akhir tahun ini naik pangkat. Untuk upacara kenaikan pangkat akan dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2020. Dengan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi diharapkan personil Polres Kaur dapat bekerja lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Ada tiga perwira naik pangkat. Untuk upacara kenaikan pangkat biasa akhir tahun ini di Mapolda Bengkulu untuk perwira dan di Polres Kaur untuk bintang biasanya," ungkap Kapolres Kaur, AKBP. Dwi Agung Setyono melalui Kabag Ops, AKP. Fahrul Ikhwan. (cik)



PNS: Nampak PNS di lingkungan Pemkab Kaur yang mendapatkan pengarahan Sekda saat pelantikan fungsional beberapa waktu yang lalu.

PNS Diminta Tak Nambah Libur

KOTA BINTUHAN - PNS di lingkungan Pemkab Kaur diminta untuk tidak nambah Libur Natal dan Tahun Baru. Apalagi sampai kebablasan tidak lagi masuk kerja sejak libur Natal hingga awal tahun 2021 yang akan datang. Hal ini sudah terlihat dari berbagai kantor yang ada di Kaur saat ini yang nampak sudah mulai sepi. Dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru yang jaraknya berdekatan Sekda Kaur Nandar Munadi meminta agar PNS tidak nambah-nambah libur nantinya.

Untuk diketahui mulai tanggal 24 Desember 2020 PNS di lingkungan Pemkab Kaur mulai cuti bersama. Pasalnya Jumat tanggal 25 Desember libur nasional karena hari Natal tahun 2020. Sementara hari Sabtu dan Minggu, PNS di Kabupaten Kaur memang libur. Karena Pemkab Kaur telah lama menerapkan lima hari kerja setiap minggunya.

Sementara pada hari Senin tanggal 28 Desember

berhingga tanggal 30 Desember 2020 kembali aktif kerja seperti biasanya. Libur kembali mulai tanggal 31 Desember 2020 cuti bersama tahun baru dan Jumat tanggal 1 Januari 2021 libur nasional. PNS Kaur baru aktif kembali pada tanggal 4 Januari 2021 yang akan datang.

Dengan waktu liburan Natal dan tahun baru yang hanya berjarak tiga hari. Dipastikan banyak PNS nantinya bolos kerja, apalagi pada akhir tahun banyak kegiatan yang tidak bisa lagi dikerjakan. Kendati demikian Pemkab Kaur memastikan PNS tetap masuk kerja pada tanggal 28 sampai 30 Desember 2021 yang akan datang.

"Kita cuti bersama Natal dan Tahun Baru hanya satu hari namun cukup panjang liburannya karena Sabtu dan Minggu kita tidak kerja. Untuk itu kita tetap himbau kepada semua PNS untuk tetap aktif. Apalagi yang bertugas dibagikan pelayanan dan juga keuangan yang saat akhir tahun ini banyak pekerjaan," kata Sekda

Kaur Nandar Munadi kepada RB.

Kendati libur baru dimulai tanggal 24 Desember namun sudah banyak PNS di Kaur yang sudah bolos duluan. Bahkan dipastikan pada tanggal 28 sampai 30 Desember 2020 yang akan datang sudah banyak tidak aktif kerja lagi. Untuk mengantisipasi hal ini Sekda Kaur meminta agar semua kepala OPD dapat mengecek kehadiran semua PNS di OPD nya masing-masing. Dan melaporkan kehadiran tersebut kepada Sekda Kaur nantinya.

"Kita akan meminta Satpol PP atau juga kepala OPD untuk mengecek kehadiran semua pejabat dan PNS di lingkungan kerjanya masing-masing. Karena jangan sampai banyak pengaduan pelayanan tidak bisa dilakukan karena PNSnya nambah libur nantinya. Dan kita himbau agar semua pekerjaan yang belum tuntas di akhir tahun ini semuanya bisa tuntas sesuai target," pungkaskan Nandar Munadi. (cik)

Misa dan Natal, Jemaat Diminta Patuhi Prokes

KOTA BINTUHAN - Kalau tak ada halangan Kamis sore hingga malam (24/12), umat nasrani di Kabupaten Kaur akan mulai menggelar kegiatan Misa bersama di beberapa gereja yang ada di Kaur. Sementara besok (25/12) kegiatan akan dilanjutkan dengan perayaan Natal tahun 2020 di berbagai gereja Protestan dan juga Katolik di Kaur. Karena jumlah jemaat di Kaur tidak terlalu banyak, maka tidak ada pembatasan jumlah jemaat untuk datang ke gereja nantinya.

Namun demikian para jemaat yang akan mengikuti malam Misa dan juga puncak Natal nantinya tetap harus menggunakan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Salah satunya adalah mengatur jarak



BERSIAP: Pengurus gereja nampak mulai bersih-bersih untuk menyambut perayaan Natal dan Misa tahun 2020.

dalam gereja saat melaksanakan kegiatan baik itu Misa dan Natal. Kemudian menggunakan masker dan lain sebagainya untuk menghindari penyebaran Covid-19 pada saat perayaan natal nantinya.

"Untuk pelaksanaan Misa dan Natal kita sudah sampaikan kepada semua jemaat khususnya jemaat Katolik di Kaur untuk tetap datang ke gereja. Namun karena ini dalam wabah virus corona kita pun tetap harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dan ini sudah kita sampaikan semuanya agar jemaat membawa masker dan lain sebagainya. Karena jemaat kita tidak terlalu banyak di Kaur ini maka tidak ada batasan jumlah jemaat yang datang ke gereja," ungkap salah satu tokoh agama Kristen di Kaur, Sihombing.

Tidak hanya itu saja, ada juga gereja yang jemaat banyak dan mencapai 200 jemaat tidak melaksanakan natal dan misa di gereja namun menggu-

nakan Natal secara online melalui live streaming akun FB. Hal ini juga untuk menghindari penyebaran Covid-19, namun yang datang ke gereja hanya pengurus intinya saja. Salah satu gereja yang akan melaksanakan Misa dan Natal secara live streaming adalah Gereja Gekesia yang ada di Parda Suka Kecamatan Maje.

Kemudian Pospel Gekesi di Dusun Talang Jawa Desa Sumber Harapan Kecamatan Nasal tidak melaksanakan kegiatan misa dan natal untuk mengantisipasi penyebaran Covid. Namun jemaat telah melaksanakan kegiatan pada tanggal 17 Desember lalu.

Sementara 4 gereja lainnya masih melaksanakan kegiatan di gereja terdiri dari Gereja HKBP Padang Kempas, dengan jemaat sekitar 20 orang. Kemudian Gereja GPDI juga di Parda Suka dengan jemaat 25 orang. Gereja GPDI di Kecamatan Maje dengan jemaat sekitar 40 orang. Dan yang terakhir Gereja Katolik Santo Benethditus yang berada di Parda Suka dengan jemaat 74 orang. (cik)



DIAMANKAN: Tersangka penadah motor curian saat diamankan Unit Pidum Polres Kaur.

Buron Setahun, Penadah Motor Curian Diamankan

KOTA BINTUHAN - Setelah sempat lolos saat dikejar oleh Unit Reskrim Polres Kaur dan anggota Polsek Kaur Selatan pada bulan Agustus tahun 2019 yang lalu. Selasa malam (22/12) salah satu komplotan penadah motor hasil curian berinisial HD (26) warga Kaur berhasil diamankan oleh anggota Unit Pidum Polres Kaur. HD diamankan di rumahnya dan langsung digelandang ke Mapolres Kaur setelah sempat buron satu tahun lebih.

Kapolres Kaur, AKBP. Dwi Agung Setyono, S.IK, MH didampingi Kasat Reskrim, AKP. Apriadi melalui Kanit Pidum, Ipda. Joko Susanto membenarkan penangkapan tersebut. Bahkan saat akan ditangkap HD ingin kabur namun dengan mudah ditangkap oleh petugas yang sudah siap menangkap tersangka.

"Untuk tersangka penadah motor hasil curian dari pengembangan LP bulan Agustus tahun 2019 sudah kita amankan. Dan saat ini masih terus kita periksa lebih lanjut, karena saat ini kondisi tersangka juga sedang sakit," ungkap Joko Susanto.

Untuk diketahui HD terlibat karena menampung motor hasil curian dari ter-

sangka berinisial BA (41) Kecamatan Kaur Selatan yang telah diamankan. Tidak hanya BA mengamankan penadah lainnya saat itu yaitu Ku (25) warga Muara Sahung. Dari hasil pemeriksaan dari BA dan Ku ini terdapat tersangka lainnya termasuk HD yang sempat kabur saat akan diamankan polisi saat itu.

Dalam menjalankan aksinya komplotan pencuri dan penadah ini kompak, sehingga setiap hasil curian langsung hilang dan dimodifikasi. Dan para pelaku biasanya menjual motor hasil curian kepada warga untuk ke kebun sehingga sulit diungkap. Karena pada pengungkapan pada Agustus 2019 BB yang diamankan berupa motor ada yang sudah dicopot bodynya oleh para tersangka.

"Untuk saat ini kami juga masih memburu para pelaku lainnya yang masih belum terungkap. Jelang tahun baru kita minta warga untuk waspada, karena biasanya aksi pencurian motor meningkat. Jika ada kejadian segera lapor sehingga kita bisa melakukan pengejaran nantinya," pungkaskan Kanit Pidum Ipda Joko Susanto kemarin. (cik)

PERUMAHAN CLUSTER TENGAH PADANG RESIDENCE
Lokasi: Jl. Iskandar, 50m dari Masjid Jamik Depan SMPN 3

PERUMAHAN BATANG HARI PERMAI II
Lokasi: Jl. Batang Hari Kel. Nusa Indah

PERUMAHAN MINIMALIS AHSANI RESIDENCE
Lokasi: Jl. Dempo 4 Kebun Tebeng Kota Bengkulu

BENTIRING PERMAI III
Lokasi: Jl. Darma Wanita Kel. Bentiring

PEMATANG PERMAI
Lokasi: Jl. Perintis Kel. Pematang Gubernur

SURABAYA PERMAI V
Lokasi: Jl. Nakau - Air Sebakul Kel. Surabaya

Miliki Segera Perumahan Subsidi :
KPR Bisa Melalui Bank **BTN**
Hubungi: **PT. AHSANI KARYA**
Jl. Fatmawati No. 16 A Penurunan (Depan SD 2) Kota Bengkulu
Telp. 0736-24996, HP. 085279648787, 082175712286, 082371305405

H.Prabowo Subianto
KETUA UMUM DPP GERINDRA

Keluarga Besar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya GERINDRA PROVINSI BENGKULU

Mengucapkan Selamat

Hari NATAL & Tahun Baru 2021

25 Desember 2020
1 Januari

SUSY MARLENY BACHSIN
Wakil Ketua DPP Partai Gerindra Pusat
Ketua DPD Gerindra Provinsi Bengkulu
Anggota DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu

SUHARTO
Wakil Ketua DPRD Provinsi
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu
Fraksi Gerindra

SOLIHIN ADNAN
Bendahara DPD Partai Gerindra
Anggota DPRD Kota Bengkulu
Fraksi Gerindra

Waspada Bencana, Tanam Lagi 300 Pohon

DALAM rangka memperingati hari Bulan Menanam Nasional dan Hari Juang TNI AD 2020, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Ketahun menggandeng TNI AD melakukan penghijauan. Yaitu dengan menanam sebanyak 300 pohon di lokasi markas Denzipur Kodam II/Sriwijaya, di Kabupaten Bengkulu Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan Rabu (23/12).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BPDASHL Ketahun, Irpana Nur, S.Hut, M.Sc dan dihadiri oleh Danton Tim Aju Denzipur, Kapolsek Taba Penanjung dan Kepala DLHK yang diwakili oleh Kasi Penyuluhan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat, komitmen dan budaya menanam dan memelihara pohon oleh seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Tahun 2020 BPDASHL Ketahun telah melaksanakan Rehabilitasi Hutan Lindung seluas 2.000 hektare, menyediakan 1.400.000 bibit serta mempersiapkan bibit sebanyak 36.000 batang ditahun 202. (and/prw)

PENANAMAN: Danton Tim Aju Denzipur ikut serta dalam penanaman pohon.

SAMBUTAN: Kepala BPDASHL Ketahun, Irpana Nur, S.Hut, M.Sc memberikan sambutan.

DUKUNG: Sebagai bentuk dukungan penghijauan, Kapolsek Taba Penanjung ikut serta menanam pohon.

IKUT SERTA: Kasi Penyuluhan DLHK, Gulien ikut serta melakukan penanaman pohon.

TANAM: Kepala BPDASHL Ketahun, Irpana melakukan penanaman pohon secara langsung.

KOMPAK: Foto bersama jajaran BPDASHL Ketahun dengan tamu undangan dan jajaran TNI AD.

<p>INFO KULINER BENGKULU</p>	<p>FORTUNA CAFÉ DAN RESTO</p> <p>Alamat: Jl. Rafflesia Kel. Nusa Indah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Reservasi: HP. 0813-9841-5974</p>	<p>SOTO #CAKHAFI</p> <p>Alamat: Jalan Batanghari Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Hub: HP. 08117321511</p>	<p>SAMBEL MERCON 3</p> <p>Alamat: Simpang Bumi Ayu Kec. Selear Kota Bengkulu</p>	<p>KEDAI KOPI GADING CEMPAKA</p> <p>Alamat: Jalan Batanghari Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Hub: HP. 08117321511</p>
	<p>Reunion Resto</p> <p>Alamat: Jalan Pariwisata Pantar Panjang Kota Bengkulu Reservasi Hub : HP. 085366962224</p>	<p>Bakso O' Boss</p> <p>Jl. Raya Rafflesia No.42 Nusa Indah - Kec. Ratu Agung - Kota Bengkulu</p>	<p>dailyicious all things delicious</p> <p>Alamat: Jln. Merapi Raya No.107 Kebun Tebeng - Kota Bengkulu HP. 08233338251</p>	<p>KING BAKSO RAJANYA BAKSO</p> <p>Alamat: Jln. Soeprato No.92 Kebun Geran - Kota Bengkulu</p>
<p>Ivarah BAKERY</p> <p>Alamat: Jln. Mahakam 4 Lingkar Barat No.15 Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu HP. 081367285252</p>	<p>LIVE MUSIC</p> <p>BUKA MULAI PUKUL 10.00 WIB SD 22.00 WIB</p> <p>Alamat: Jln. Jenggala 1 Ujung Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu HP. 082374702196 / 081273487999</p>	<p>Dapur Senandung</p> <p>OPEN NEW NORMAL</p> <p>Jl. ADAM MALIK (SAMPING BENGKEL BLEBONG) PAGAR DEWA KOTA BENGKULU</p>	<p>Ruang Promosi Kuliner</p>	<p>Ruang Promosi Kuliner</p>

YAMAHA

WZR 155R
THE REAL ADVENTURE PARTNER

Digital SPEEDOMETER

SUSPENSİ DEPAN PANJANG & LEBAR

MESIN 155cc DENGAN VVA

KAPASİTAS TANGKI 8,1 LİTER

Thamrin

yamaha.thamrin.bengkulu

JOIN US NOW !!!

Turkey Explore 1904

Rp. 13.800.000

Dapatkan Dlc Khusus Dan Souvenir Cantik Untuk Yang DP 1/d 17 Agustus 2020 !!!

GRAND MARQUEE - GEMER MOSQUE & TOMBS - SILE

MARKET - ELESNESE ANCHOR CITY - TURKISH LEATHER BUTTLE - KOTTOWCASTEL - MEYKANA

BERSEKUTU - TERBILAK LINDUNGROUND CITY - BERSEKUTU

POTTERY VILLAGE - SALT LAKE - ARKUT MAUSOLEUM

CARLIKAHILL - BOSSPHORUS CRUISE - GRAND BAZAAR - HAGIA SOPHIA - TOPKAPI PALACE

12-21 Oct 2020
09-18 Nov 2020
25 Nov - 02 Des 2020
24 Nov - 03 Des 2020 (Khusus Group Nusatour)

Contact Person :
0812 9296 976 (Rose), 0813 7783 8875 (Yenny)



SUZUKI **GEMERLAP SUZUKI**

Hadiah Langsung Emas LM 2 s.d 10g*
Gratis Olie - Sparepart s.d 50.000km*

DP Mulai 20Jtan*
DP Mulai 20Jtan*
DP Mulai 15Jtan*
DP Mulai 12Jtan*

PT. KANGAROO MOTOR MANDIRI

Head Office : Jl. Mayjend Sutuyo No. 88 Kota Bengkulu. Telp : (0736) 28888/ 085 2222 11 767
Outlet Penarik : Jl. Lintas Bengkulu Padang Ds. Sidodadi Penarik. Telp. 0852-6835-8888
Outlet Camp : Jl. Durian Depan (Simpang Merigi) Kab. Kepahang. Telp. 0821-7595-8529
Outlet Mania : Jl. Ahmad Yani Kec. Ibu Kota Mania. Telp. 0821-2314-9543

Jam Kerja Bengkul :
Senin - Jumat : 08.30wib - 18.30 WIB
Sabtu : 08.30wib - 12.30 WIB
Hotline Service : 0821-7573-6233

Dispendik Pastikan Seragam Gratis Sesuai Perwal

BENGKULU – Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Bengkulu, Dra. Rosmayetti, MM menepis tuduhan Ketua PGRI Kota Bengkulu, Nawardi yang mengatakan bahwa penyaluran bantuan baju seragam gratis tidak sesuai Peraturan Walikota (Perwal) dan petunjuk teknis

(Juknis). Menurut Rosmayetti, penyaluran telah sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

"Itu informasi yang keliru, kalau memang ada informasi seperti itu, kita akan lihat dan klarifikasi informasi itu. Tim kita juga akan turun ke sekolah mana dan

orang tua mana yang tidak terima uang. Artinya semua orang tua terima uang, nanti orang tua yang akan membelikan pakaian seragam untuk anaknya," kata Rosmayetti.

Terkait informasi yang menyebutkan bahwa baju seragam gratis tersebut

telah disediakan dan diantar ke sekolah masing-masing, ia juga membantah hal itu. "Itu yang kita luruskan, artinya orang tua yang ke sekolah meminta informasi ke sekolah. Nanti sekolah kan ada usaha kecil menengah untuk penjahit kusus dia, mungkin dia diarahkan," jelasnya.

Terpisah, Direktur Utama PT BPRS Fadhilah, Dendy Prasetya mengatakan, pihaknya telah menyalurkan uang tunai bantuan baju seragam gratis melalui buku rekening orang tua siswa masing-masing penerima.

☞ Baca **DISPENDIK**. Hal 15



CV. CENTRAL ELEKTRO

JALAN SALAK RAYA NO. 99 LINGKAR TIMUR, KOTA BENGKULU

0736 7324 996 central_elektro.bkl
0811 7360 422 centralelektobengkulu.com

- PENGADAAN AC HIKVISION
- PENJUALAN AC
- SERVICE AC
- SPARE PART AC
- RENTAL AC DAN KIPAS EMBUN
- CCTV & SECURITY SYSTEM

DAIKIN

Lintas Online

Gelar Ops Lilin Nala, Polres Bagi-bagi Jamu

BENGKULU – Polres Bengkulu melaksanakan Ops Lilin Nala 2020 dalam rangka pengamanan perayaan Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 dimulai sejak 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021 mendatang. Ada yang unik dalam Ops Lilin Nala 2020 yang digelar Satuan Polisi Lalu lintas (Satlantas) Polres Bengkulu di Simpang 5 Ratu Samban Kota Bengkulu, Rabu (23/12) pagi.

Untuk menyosialisasikan peraturan lalu lintas serta membina masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) personel Lantas Polres Bengkulu menarik perhatian dengan menggunakan pakaian adat bujang gadis Bengkulu, menghadirkan Da'i Lantas serta Polwan Lantas bagi-bagi jamu kepada pengguna lalu lintas. (**)




TOKO UD PARNASON JR Menjual Alat dan Bahan Bangunan

- PROMO KERAMIK Ukuran 40 x 40, Hanya Rp. 43.000, Saja
- PROMO SENG WARNA Hanya Rp. 850.000

Bisa Kredit Melalui Home Credit, Bunga 9%

Info Pemesanan : 082371728128, atau 082281510870
Alamat Jl. RE. Martadinata, PG Dewa (Depan SPBU Bumiayu,) Kota Bengkulu



PENGADAAN

Pusat Jendela Pabrik UPVC, Papan Gypsum, Papan PVC, Baju Hanger

Jl. Lintas Bengkulu - Murni ELS Sd. Bantaran Kec. Sukorojo Kota. Sukarno. Telp. 082281510870



ASTRA MOTOR member of ASTRA

Motor kamu pake Honda? Pake oli, AHM OIL!

Matic
Bebek
Sport

Mau Servis atau Beli Motor Hub. 0819-2-500-989



Honda Care

MENGALAMI KENDALA DI JALAN? ATAU MAU SERVICE DI RUMAH?

HUBUNGI LAYANAN 0819 2500 989 ATAU 1 500 989

LEBIH MUDAH LEWAT BOOKING SERVICE DI APLIKASI: MOTORKUX

DOWNLOAD DI PLAYSTORE REFERAL CODE: HNBKBL



RAPAT: Asisten II Setdaprov Bengkulu Yuliswani saat memimpin rapat optimalisasi sinergi PD Bimex dengan mitra kerja di ruang Raflesia Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin.

PD Bimex Harus Berbenah

BENGKULU – Asisten II Setdaprov Bengkulu, Yuliswani mengatakan PD Bimex yang merupakan BUMD milik Pemprov Bengkulu harus dapat memberikan kontribusi terbaik bagi daerah. Baik dari sisi BUMD sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari sisi pemberi peluang kesempatan

kerja. "Ada 2 hal penting yang harus menjadi perhatian PD Bimex sehingga bisa berkontribusi aktif terhadap mendukung kemajuan Bengkulu," ujar Yuliswani.

Dua hal penting itu, yakni, sambung Yuliswani, pertama badan hukum PD

Bimex harus segera diselesaikan supaya PD Bimex dapat bergerak lebih mudah dan luasa. Kedua, terhadap bisnis-bisnis yang akan dilakukan.

"Ini tadi sudah dikoordinasikan dengan masing-masing pihak calon investor," terang Yuliswani.

Lanjut Yuliswani, dari pertemuan

bersama beberapa OPD teknis, beberapa perusahaan, Asosiasi Pengusaha Batubara Bengkulu (APBB) anak perusahaan PT Pelindo II Bengkulu, disimpulkan bahwa PD Bimex harus melakukan penguatan pada beberapa penunjang perusahaan.

☞ Baca **PD BIMEX**. Hal 15



PELAYANAN: Kemenag Kota Bengkulu mengeluarkan SE tentang pelaksanaan akad nikah dan ibadah di masjid. Bila masih melanggar Prokes, maka proses akad nikah akan dibatalkan.

Langgar Prokes, Proses Akad Nikah Dibatalkan

BENGKULU – Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Protokol Kesehatan (Prokes) Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Pengurus Masjid se Kota Bengkulu. Dalam SE tersebut mengatur tentang

pelaksanaan akad nikah maupun pelaksanaan ibadah.

Hal ini disampaikan Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kota Bengkulu, H. Rolly Gunawan, M.HI. Dikatakannya, dalam SE itu menyebutkan, proses akad nikah di KUA hanya boleh dihadiri 10 orang dan tetap menerapkan

protokol kesehatan. "Jika tidak mengindahkan itu, petugas pencatatan nikah bisa membatalkan proses akad nikah tersebut," jelasnya.

Dikatakannya, pernikahan di rumah atau di masjid boleh dilakukan namun dibatasi 20 persen dari kapasitas 30 orang.

☞ Baca **LANGGAR**. Hal 15

Lelang Jabatan Sekda Mulai Januari

BENGKULU – Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bengkulu, saat ini masih diduduki pejabat sementara (Pjs) Bujang HR. Diketahui, izin untuk melakukan seleksi Sekda sudah disampaikan Pemkot Bengkulu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), namun izin tersebut belum keluar.

Namun demikian, diperkirakan pada Januari 2021

nanti, proses lelang Sekda sudah bisa dimulai. Sebagaimana yang dikatakan Pjs Sekda Kota Bengkulu, Bujang HR. Dikatakannya, jika tidak ada hambatan rekomendasi akan turun di akhir bulan ini. Dan pelaksanaan lelang jabatan sekretaris bisa dilakukan pada bulan Januari.

"Pada bulan Januari mulai dilakukan lelang Sekda," ujarnya.

☞ Baca **LELANG**. Hal 15

Pelaporan Dana BOS dan DD Belum Optimal

BENGKULU – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Bengkulu Ismed Saputra mengatakan, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Provinsi Bengkulu sudah 96,3 persen per 14 Desember. Sayangnya, pelaporan realisasi penggunaan dana BOS ini masih belum optimal. "Kalau penyaluran dana BOS dari rekening kas negara itu sudah hampir 100 persen. Dan kita yakin itu juga sudah digunakan oleh sekolah, tapi tinggal lagi kita minta laporan penggunaannya," kata Ismed.

☞ Baca **PELAPORAN**. Hal 15

Terapkan Budidaya dengan Sistem Bioflok

PPTTG 2020, Tebar Bibit Lele

BENGKULU - Budidaya lele dengan sistem bioflok, sangat menjanjikan. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, beternak lele bisa memberikan hasil berkali lipat dengan menekan biaya produksi. Khususnya untuk pemberian pakan.

Rabu (23/12), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melalui Program Studi (Prodi) Ilmu Kelautan Universitas Bengkulu menyelurkan Program Penerapan Teknologi Tepat Guna (PPTTG) pada masyarakat tahun 2020.

Program dilakukan dengan penebaran bibit lele dan serah terima paket teknologi budidaya ikan dengan sistem bioflok. Bantuan ini diserahkan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dalam rangka menghadapi masa pandemi Covid-19.

"PPTTG adalah program nasional yang sudah berlangsung sejak 2018," kata Ketua Pelaksana PPTTG 2020 Kemristekdikti Dr. Ir. Deddy Bakhtiar, M. Si yang menjadi satu-satunya dosen peraih PPTTG tingkat nasional disela kegiatan yang berlangsung di RT. 18 Kelurahan Bentiring Permai.

Deddy mengungkapkan, selama ini penelitian yang dilakukan oleh para peneliti masih kerap tidak sampai ke masyarakat. Padahal jika diterapkan secara langsung,

hasilnya bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Budidaya lele dengan sistem bioflok diterapkan dengan memanfaatkan limbah sisa pakan. Yakni memanfaatkan kotoran ikan lele untuk diolah kembali dengan menggunakan mikroorganisme/bakteri pembentuk flok/gumpalan. Sehingga lele bisa menghasilkan pakan sendiri.

"Dengan mengurangi limbah menjadi makanan, peternak bisa menghemat biaya operasional. Misalnya kalau biasanya untuk pakan dialokasikan 5 persen dari total operasional, dengan teknologi ini alokasi pakan bisa 2 persen saja," jelas Deddy.

Manfaat lainnya dari teknologi memanfaatkan limbah adalah kondisi air yang lebih jernih. Selain itu ikan bisa ditebar dengan kepadatan tinggi. Bahkan hingga lima kali lipat. Dari biasanya hanya 100 bibit per meter kubik, menjadi 500 ekor per meter kubik.

Sementara pada delapan kolam bantuan PPTTG kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Lele Sapu Jagat dan Lembaga Pemberdayaan Wanita (LPW) Melati, budidaya ikan bisa mencapai 24 ribu bibit. "Perkolam bisa menampung 3.000 bibit lele. Dengan memanfaatkan lahan yang sempit pun, budidaya bisa maksimal," ungkap Deddy.

Selain memberikan bantuan dalam bentuk peralatan, juga ada pendampingan dalam bentuk pelatihan teknis. Bagaimana kelak olahan dan

teknologinya bisa diterapkan oleh peternak tradisional. Kemudian ada pula pembinaan organisasi sebagai penguatan kelompok, pendampingan sistem dan managemen keuangan.

Manajemen keuangan bagi peternak, lanjut Deddy, tidak kalah penting. Budidaya akan berkelanjutan jika peternak bisa mengelola berapa untuk modal, biaya operasional dan berapa keuntungan yang digunakan, agar budidaya lele bisa memberikan manfaat ekonomi yang baik. "Saya berharap kegiatan ini bisa menginspirasi bagi masyarakat sekitar dan kelompok budidaya lele lainnya," harap Deddy.

Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Lele Suparno menuturkan, dirinya sangat berterima kasih atas bantuan program Kemristekdikti. Sebelumnya ia merupakan peternak tradisional yang menggunakan media tanah dan terpal untuk menampung benih. Dengan adanya kolam permanen, Suparno optimis panen yang dihasilkan bisa lebih banyak. Terutama dengan pendampingan yang dilakukan Prodi Ilmu Kelautan Unib. Setelah benih dilepas, ia menargetkan bisa panen dalam waktu 80 hari.

"Permintaan lele memang sempat turun diawal pandemi Covid-19. Tapi setelah itu sampai sekarang, pemasaran lancar. Kami biasa menjual ke pasar, produsen salai dan pemilik rumah makan pecel lele," ujar Suparno. (ken)



TEBAR BENIH: Kapolsek Muara Bangkahulu Chusnul Qomar bersama Ketua Pelaksana PPTTG 2020 Deddy Bakhtiar, Babinsa, perwakilan Kelompok Sapu Jagat, LPW Melati melepaskan ratusan benih lele secara simbolis, Rabu (23/12).

Dispendik Pastikan Seragam Gratis ...

Sumbangan dari hal 9

Pembagian tersebut sudah dimulai dari minggu lalu ke sekolah masing-masing, orangnya siswa diundang ke sekolah diberikan uang tunai, berserta bukunya.

"Kami diamanahkan dari dinas sebagai bank penyalur yang memang sudah kewajiban kami untuk menyalurkan dalam bentuk tunai ke pada setiap penerima bantuan," terangnya.

Terkait laporan orangtua

siswa bahwa uang tersebut tidak masuk ke dalam buku rekening, ia menjelaskan, pembukuan dilakukan setelah dilakukan perlengkapan berkas, perlengkapan tanda tangan orangtua siswa, pihaknya juga memastikan yang datang orangtua dari siswa tersebut.

"Kita transaksi langsung, mereka tanda tangan untuk registrasi, kita cetak di bukunya. Itu nanti uangnya sudah masuk semua di rekening

masing-masing penerima sejumlah yang ditetapkan. Untuk pengambilan memang kita belum cetak karena perlu tanda tangan dislip penarikan," jelasnya.

Terkait informasi yang menyebutkan kalau uang tersebut diantarkan ke sekolah, Dendy mengatakan itu sudah diluar kewenangannya. "Kalau itu di luar kewenangan kami, kami hanya menyalurkan dan tidak ada rekening sekolah di kami. Kami hanya membuka rekening untuk

yang menerima bantuan dan kita serahkan langsung kepada yang penerima bantuan," ujarnya.

Sementara itu Ketua PGRI Kota Bengkulu, Nawardi tetap bersikukuh bahwa informasi yang diterimanya terkait adanya dugaan pelanggaran Perwal dalam penyaluran seragam sekolah gratis ini, bukanlah informasi semua SD yang ada di Teluk Segara dan tempat lain," ujarnya. (juu)

Lelang Jabatan Sekda Mulai ...

Sumbangan dari hal 9

Beberapa nama pun sudah mulai bermunculan untuk mengikuti lelang jabatan Sekda ini. Di antaranya, seperti Hadianto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bapenda. Lalu ada Eddyson yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kop-

erasi dan UMKM. Dikatakan Bujang, kedua nama tersebut sudah memiliki cukup syarat, untuk mengikuti seleksi lelang jabatan Sekda.

Dimana salah satu syaratnya adalah pernah mengikuti Diklat PIM tingkat nasional. Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP)

Kota Bengkulu, Muklis mengatakan, pihaknya akan melakukan pembentukan tim Seleksi Sekda.

"Jika perlu kita surati KASN dan Kemendagri terkait ini. Karena Pilkada sudah selesai jadi tidak perlu lagi ke KASN. Kita sudah siapkan semua, Insya Allah pada Januari dimulai," jelasnya.

Dijelaskannya, di masa pandemi Covid-19 ini, kemungkinan seleksi tidak terlalu lama. Dimana yang biasanya digelar selama 15 hari, namun karena pandemi mungkin hanya dilakukan 10 hari saja. Sedangkan tim seleksi terdiri dari akademisi, DPRD dan ASN sendiri. (juu)

PD Bimex Harus Berbenah

Sumbangan dari hal 9

Selain itu, dalam perjalanannya jika PD Bimex memerlukan fasilitas dari Pemda, maka Pemprov Bengkulu siap melakukan pendampingan.

"Nantinya kalau perlu pendampingan, OPD teknis akan memfasilitasi dari PD Bimex ini," tegas Yuliuswani.

Sementara itu, Direktur PD Bimex Bengkulu Frentindo menambahkan, pihaknya akan terus melakukan

optimalisasi di berbagai aspek. Sehingga bisa semakin fokus terhadap apa yang dilaksanakan, untuk pengembangan usaha. PD Bimex akan mengupayakan agar banyak investor yang masuk.

"Dan juga PD Bimex akan memberikan PAD untuk daerah. Sedangkan untuk pengembangan bisnis, kami akan bekerja sama dengan Bulog dan juga pihak pelabuhan," demikian Frentindo. (key)

Langgar Prokes, Proses Akad Nikah ...

Sumbangan dari hal 9

Inikah untuk menghindari kerumunan. Sedangkan untuk menggelar pesta pernikahan, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi SE kepala daerah yang melarang adanya pesta per-

nikahan.

"Kalau cuma akad nikah boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di KUA tetapi wajib menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari kerumunan," ujarnya.

Sementara itu, untuk pelak-

sanaan ibadah di masjid atau mushallah juga wajib menerapkan protokol kesehatan serta menyediakan fasilitas pengecek suhu, tempat cuci tangan menggunakan sabun serta mengatur jarak antar jamaah dalam melaksanakan ibadah yakni 1 sampai 1,5

meter. Selain itu harus rutin melakukan penyemprotan disinfektan di area masjid.

"Setiap jamaah wajib menggunakan masker, jika kegiatan melibatkan banyak orang dan berpotensi terjadi kerumunan terlebih dahulu izin ke gugus tugas," demikian Rolly. (juu)

Pelaporan Dana BOS dan DD Belum ...

Sumbangan dari hal 9

Berdasarkan monitoring DJPb dari laporan penggunaan dana BOS, hingga pertengahan desember kemarin penyaluran dari rekening umum kas negara kepada

kabupate/kota sudah 96,3 persen dari total pagu Rp 464,268 miliar untuk Provinsi Bengkulu. Sedangkan pencairan dari total penyaluran ini baru 52,4 persen atau Rp 234,236 miliar, atau dengan kata lain total realisasi ang-

garan yang sudah dilaporkan sekolah.

"Kalau belum dilaporkan belum bisa diupdate data pencairannya, belum terpantau. Untuk itu kita minta pemda melalui dinas pendidikannya masing-masing

dapat mengingatkan sekolah agar seger melaporkan penggunaan dana BOS," beber Ismed. Begitupun dengan DD, sambung Ismed, masih banyak desa belum melaporkan realisasi penggunaan DD

(key)

AHASS Tetap Layani Konsumen di Hari Libur

BENGKULU- Menyambut libur Natal yang akan tiba, layanan AHASS di Provinsi Bengkulu tetap buka untuk

dapat melayani konsumen dalam melakukan perawatan sepeda motor. Tentu saja layanan AHASS dipastikan telah menggunakan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah.

Kepala Bagian Technical Service Astra Motor Bengkulu, Ranga Noviar mengatakan sesuai imbauan pemerintah agar masyarakat Bengkulu tidak melakukan perjalanan keluar kota atau Provinsi kecuali keperluan yang mendesak. Hari libur saat ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan perawatan sepeda motor di AHASS.

Khusus sepeda motor matik, Astra Motor Bengkulu memberikan gratis oli gear dengan melakukan servis lengkap dan ganti oli mesin. "Adapun Astra Motor Bengkulu juga menyediakan paket servis 11 point senilai Rp 99.000 dan paket



TETAP LAYANI: Menyambut libur Natal 24-25 Desember 2020 Bengkel resmi Honda Motor AHASS tetap melayani service bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu sekaligus dengan promo menarik .

servis 7 point senilai Rp65.000 yang tentunya bisa dipilih untuk merawat sepeda motor Honda di AHASS," jelasnya.

Ia menambahkan Astra Motor Bengkulu juga mempunyai layanan Honda Care. Dimana layanan ini memberikan pelayanan servis mendadak ketika ada permasalahan

pada sepeda motor di jalan terkhusus di Kota Bengkulu. Untuk menghubungi layanan Honda Care, masyarakat bisa menghubungi langsung nomor 08192500989 dan dengan tanggap AHASS akan melayani permasalahan pada sepeda motor konsumen.

(iks)

Bantuan untuk Mantan Atlet Berprestasi

BENGKULU - Sejatinya olahragawan tidak ada bedanya dengan seorang pahlawan. Dengan kegigihan dan semangatnya mampu mengharumkan nama daerah dan bangsa. Sayangnya, banyak mantan atlet berprestasi kondisi kehidupannya masih jauh dari kata

sejahtera meskipun sudah mengharumkan nama daerah.

Dilatarbelakangi inilah, Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah yang juga mantan atlet sepbak bola tergugah untuk membentuk Yayasan Anak Peduli Bengkulu (YAPB). Sebagai suatu wadah yang dapat menampung aspirasi para mantan atlet berprestasi Bengkulu. "Kita ingin, para Atlet mendapatkan penghargaan yang layak setelah mereka berjuang mengharumkan nama daerah," ujar Joni Ardi Sekretaris Yayasan Anak Bengkulu Peduli (YABP) di Sekretariat YAPB, Rabu (23/12).

Lebih lanjut, Joni menjelaskan sudah terjalin komunikasi yang baik bersama PT. Mitra Puding Mas Ipuh yang merupakan Perusahaan kebun sawit terbesar di Provinsi Bengkulu dibawah Manajemen PT. Anglo Eastern Plantation Management Indonesia di Medan, terkait bagaimana mekanisme sistem yang akan dilakukan untuk membantu kehidupan para mantan atlet.

"Terimakasih kepada bapak Ronald sebagai pimpinan, yang telah peduli akan nasib para pahlawan olahraga kita. Semoga proses ini dapat berjalan lancar," beber Joni yang juga sebagai Sekretaris Badan Perlindungan Atlet dan Mantan Atlet Nasional Indonesia (Bapensi).

Menurutnya, salah satu contoh yaitu Suratun atlet atletik Bengkulu yang pernah dipanggil Pelatnas Sea Games di Jakarta. Yang sekarang kehidupannya cukup

memperhatikan, dimana ia saat ini masih berstatus honorer dan menghidupi 3 orang anak. Kemudian, ada Alfian mantan atlet jalan cepat yang saat ini masih menyandang prestasi sebagai pemegang rekor Yunior Nasional. Saat ini berprofesi sebagai penjual mie, dan masih banyak lagi atlet yang kehidupannya susah.

"Banyak mantan atlet kita yang ekonominya masih jauh dari layak, untuk itu semoga langkah Wagub ini dapat meringankan beban mereka (mantan atlet)," tutup Joni yang juga pernah menjadi pengurus PSSI Bengkulu. (key/rls)

Advertisement for PDAM Kota Bengkulu. It features the logo of PDAM Kota Bengkulu and text stating: 'LAYANAN SMS PDAM KOTA BENGKULU'. Below the logo, it says 'Menghimbau pelanggan PDAM Kota Bengkulu membayar tagihan sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari sanksi hingga pemutusan.' It also mentions 'Menghimbau melakukan pembayaran pada LOKET RESMI untuk menghindari penipuan.' There is a section for 'UNTUK KELUHAN LAYANAN (HANYA SMS) Mohon SMS kan ke 0821 8613 4569 sbb: a. Nama /No.SL Pelanggan b. Alamat lengkap dan nomor Hp c. Laporan /keluhan' and a note 'Mohon informasi ini disampaikan kepada pelanggan yang lain "Kepuasan Pelanggan Komitmen Kami"'

Advertisement for PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK PASAR TRADISIONAL PROVINSI BENGKULU. It lists various commodities and their prices. Below the list, it says 'PERKEMBANGAN HARGA BARANG STRATEGIS KOTA BENGKULU' and lists more commodities. At the bottom, it says 'Sumber : Pantauan Pasar Minggu, Pasar Panorama dan Pasar Barukoto'.

Advertisement for bank bengkulutanggung dan tumbuh. It features the bank logo and text: 'Kantor Pusat : Jl. Basuki Rahmat No.6 Telp. 21503, 21751, 22144 Bengkulu'. Below that, there is a table for 'TABUNGAN' and 'DEPOSITO'. The 'TABUNGAN' table shows options for Tabot, Simpeda, and Tabunganku with various interest rates. The 'DEPOSITO' table shows interest rates for 1, 3, 6, and 12 months.

TELEPON PENTING

Polres	087877170691
Kantor PBK	085378635859
Rumah Sakit	0737 71148
PLN	0737 71154



H. MUSTARANI ABDIN

Insentif Guru Sungai Lisai, Baru Rencana

PELABAI - Sempat dikecewakan setelah dijanjikan sejak 2017, para tenaga guru yang bertugas di Desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis kembali diiming-iming dapat insentif. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong telah mengusulkannya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 yang hingga kemarin (23/12) belum juga ketok palu.

Bahkan angin segar itu tidak hanya dihembuskan untuk guru saja. Para tenaga kesehatan, baik bidan, perawat dan dokter yang bertugas di desa yang masuk daerah terencil itu juga akan diberikan insentif. "Sengaja kami mengusulkan insentif itu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian guru dan tenaga kesehatan yang mengabdikan di daerah yang jauh dari keramaian," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.

Diakutinya, jumlah guru maupun tenaga kesehatan di Desa Sungai Lisai masih sangat terbatas. Itu karena banyak PNS bidang pendidikan dan kesehatan yang tidak siap bertugas di desa itu. "Makanya kami berencana berikan insentif agar tidak ada lagi alasan guru atau tenaga kesehatan menolak tugas ke Desa Sungai Lisai," ungkap Sekda.

Selain itu, Pemkab Lebong juga berencana akan menyekolahkan gratis bagi warga Desa Sungai Lisai yang siap mengabdikan sebagai tenaga honorer pendidikan maupun kesehatan di desanya. Bentuknya dengan memberikan beasiswa kepada lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ingin melanjutkan kuliah dengan jurusan pendidikan atau kesehatan. "Syaratnya setelah lulus harus mengabdikan di Desa Sungai Lisai," jelas Sekda.

Program insentif kepada guru, tenaga kesehatan serta beasiswa kuliah gratis kepada warga Desa Sungai Lisai itu sebagai upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah terencil. Dengan semakin banyak tenaga guru yang bertugas di Desa Sungai Lisai, diharapkan SDM warga setempat meningkat. Termasuk pelayanan sekaligus pemahaman di bidang kesehatan. "Ini sekaligus mengkalikan keterbatasan kuota PNS yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah," papar Sekda.

Soalnya keterbatasan jumlah tenaga guru dan kesehatan di Desa Sungai Lisai juga berkaitan dengan jumlah PNS di Lebong yang sangat minim. Dari kebutuhan normal PNS 5 ribuan, saat ini baru terpenuhi 2 ribuan. Sementara kuota CPNS dari pusat sangat terbatas. (sca)

H. Rosjonsyah, S.J.P, M.Si
(Bupati)

Wawan Fernandez, SH, M.Kn
(Wakil Bupati)

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

AYO MULAI DARI DIRI SENDIRI JAGA LEBONG DARI PENYEBARAN COVID-19

Kami Mengimbu Masyarakata
Tidak Menggelar Pesta
yang Mengundang Kerumunan
Demi Mencegah Timbulnya Klaster Baru
Penyebaran Covid-19
serta Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan

Sekda Leborg
H. Mustarani Abidin, SH, M.Si



DIALIHKAN: Lahan sawah produktif di Kecamatan Amen ini, sementara waktu dialihkan menjadi kolam ikan karena petani hanya tanam padi setahun sekali.

Hanya Dapat Bantuan Renovasi 86 Rumah

Untuk Dua Desa, Talang Leak dan Tebeak Blau

PELABAI - Tahun depan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong kembali mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Namun kuotanya hanya untuk merenovasi 86 unit Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di dua desa. Masing-masing 46 unit rumah di Desa Tebeak Blau, Kecamatan Lebong Atas dan 40 unit rumah di Desa Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning.

D disampaikan Kabid Pembinaan Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Lebong, Puji Warno, S.Pd. Saat ini tengah dilakukan verifikasi calon penerima. Ditargetnya, Januari 2021 kegiatan fisik sudah berjalan. "Ini kuota sesuai

yang diakomodir pusat untuk program T-1," ujar Puji.

Nilai bantuan yang akan diterima masing-masing Rumah Tangga Sasaran (RTS) Rp 17,5 juta. Rinciannya Rp 15 juta untuk membeli material bangunan, Rp 2,5 juta disiapkan untuk membayar upah tukang. "Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bantuan diberikan dalam bentuk barang, bukan uang," terangnya.

Khusus untuk tukang yang mengerjakan, Disperkim akan membentuk kelompok dengan jumlah 10 orang dari masyarakat sekitar. Termasuk penentuan toko yang ditunjuk menyediakan bahan bangunan, juga ditentukan oleh kelompok bersangkutan. "Jadi penemunya benar-benar akan merasakan manfaat bantuan itu," sebutnya.

Terpisah, tokoh masyarakat Lebong, Arjuna meminta Dis-

perkim benar-benar profesional dalam merealisasikan BSPS. Belajar dari pengalaman sebelumnya, kecurangan kerap terjadi untuk bentuk material bangunan yang disediakan. Tidak jarang masyarakat yang menerima justru terbebani karena material bangunan yang diterima tidak sesuai yang dibutuhkan. "Misalnya butuhnya besi dan semen, tetapi ditukar dengan bata atau pasir dengan alasan barangnya kosong," kata Arjuna.

Justru itu, Disperkim diminta tidak mengintervensi kelompok pekerja dalam menentukan toko penyedia materialnya. Tidak bisa dipungkiri, program BSPS ini dicurigai menguntungkan pengusaha toko bangunan. "Kami akan terus memantau realisasi program ini, khususnya untuk jenis material bangunan yang diperbantukan," tegasnya. (sca)

Imbangi Bantuan dengan Pelatihan

PELABAI - Anggota DPRD Kabupaten Lebong, Sriwijaya, SH meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong memaksimalkan bantuan bidang pertanian yang disalurkan pusat. Soalnya beberapa bantuan pertanian yang selama ini disalurkan ke Lebong tidak terkelola maksimal. Bukan karena bibit atau peralatan pertanian yang buruk, namun karena pemahaman petaninya yang belum optimal.

"Misalnya yang diberikan itu bibit unggul padi varietas A. Namun karena petaninya tidak paham cara tanam yang dianjurkan, maka hasil panennya tidak maksimal," kata Sriwijaya. Agar tidak mubazir dan

memberikan manfaat maksimal bagi petani, Sriwijaya berharap Pemkab Lebong melalui Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperkan) bisa memberikan pelatihan atau bimbingan teknis cara bertanam yang baik. Teknisnya bisa dengan mendatangkan ahli pertanian dari kementerian yang mementingkan ahli pertanian yang disaring dari kelompok tani untuk belajar ke pusat.

"Saya yakin salah satu faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya bantuan pertanian karena minimnya pengetahuan para petani dalam mengelola bantuan," tutur Sriwijaya. (sca)

Minim Desa Laporkan Tangani Gizi Balita

PELABAI - Dari 93 desa di Kabupaten Lebong yang menerima Dana Desa (DD) tahun ini, tidak sampai separuhnya yang menjalankan program penanganan gizi kepada kalangan gizi keputihan (balita). Bahkan dari jumlah itu, hanya 23 desa yang membuat laporan pencegahan stunting atau masalah gagal tumbuh terhadap bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi dalam realisasi DD tahun ini.

Atas kondisi itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) Kabupaten Lebong, Reko Haryanto, S.Sos, M.Si mengingatkan seluruh desa mulai memperhatikan masalah gizi balita. Mulai 2021, masalah pencegahan kekurangan gizi wajib dilaporkan karena menjadi syarat pencairan DD tahap akhir. "Tadinya kami berharap desa sudah memulai program ini sejak tahun ini," kata Reko.

Terlebih kewajiban desa memperhatikan masalah gizi balita itu sudah diinstruksikan pemerintah pusat sejak 2019. Regulasinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) untuk Tahun 2019. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan stunting itu, dian-

taranya pemberian gizi tambahan kepada balita. "Termasuk pembuatan sanitasi, yakni penyediaan fasilitas mandi cuci dan kakus (MCK) yang memadai," papar Reko.

Diakutinya, beberapa desa telah memulai kegiatan pencegahan stunting sejak 2019. Bentuknya berupa pemberian gizi tambahan kepada balita yang disanding dengan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dilaksanakan Dinas Kesehatan (Dinkes). Diharapnya untuk laporan tahap akhir tahun ini juga dilaporkan. "Untuk desa yang tahun ini belum menggunakan anggarannya untuk pencegahan stunting, kami harap sudah mampu menjalankannya tahun depan," tegas Reko.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si meminta para camat dan kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mengecek kondisi gizi balita di masing-masing wilayahnya. Itu untuk memastikan tidak ada balita yang gagal tumbuh kembang akibat kekurangan gizi. Jika masih ditemukan, artinya Puskesmas harus lebih maksimal menjalankan tugasnya. "Termasuk pemdesnya harus ikut memperhatikan kondisi gizi balita di wilayahnya," tutup Mustarani. (sca)

Tambah Titik, Perda Parkir Direvisi

PELABAI - Minimnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir, tidak hanya dipengaruhi tarif yang rendah. Jumlah titik tepi jalan raya yang ditetapkan sebagai objek retribusi parkir juga sangat sedikit. Dari puluhan potensi yang ada, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong hanya menetapkan 3 titik.

Ketiganya, tepi jalan Pasar

Muara Aman di Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara dan tepi jalan Pasar Rakyat Lebong di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen. Termasuk tepi jalan Taman Smart City Karang Nio di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai. "Kami akan mengusulkan tambahan titik parkir untuk realisasi 2021," kata Kabid Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan

Perhubungan (PUPRHub) Kabupaten Lebong, Amirudin Iskandar.

Beberapa titik strategis yang bakal menyusul dijadikan area parkir itu, jalan raya Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Lebong Utara dan sepanjang jalan Kelurahan Amen, Kecamatan Amen. Di sepanjang titik itu berjejer usaha perdagangan yang banyak mengundang pelanggan. Termasuk sejumlah kawasan



POTENSI: Tepi jalan Masjid Agung Sultan Abdullah di Kelurahan Tanjung Agung ini sempat diusulkan sebagai titik parkir, namun tak disetujui bupati.

objek wisata.

"Selain itu, kami juga akan mengusulkan revisi perda (peraturan daerah, red) tentang retribusi parkir di tepi jalan raya karena tarifnya sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini," tukas Amirudin.

Sesuai regulasi yang masih berlaku saat ini, tarif parkir motor hanya Rp 500. Sedangkan tarif parkir mobil Rp 1 ribu. Direncanakan tarif

motor naik menjadi Rp 1 ribu dan mobil Rp 2 ribu. Dengan kenaikan tarif, jelas akan berdampak ke peningkatan target dan realisasi.

"Tahun ini kami ditarget parkir Rp 40 juta. Itupun realisasinya hanya Rp 30 juta. Kendalanya kebijakan Pemkab Lebong yang sempat menggratiskan retribusi parkir 5 bulan di tengah pandemi Covid-19," tutup Amirudin. (sca)

FREE ANGSURAN 3 BULAN
Khusus Tipe Mobilio

DP 19^{*Juta} MULAI **DP 20^{*Juta} MULAI**

ARISTA
Terbaik dan Terpercaya

Info lebih lanjut kunjungi:
<https://honda.arista-group.co.id/dealer/honda-arista-bengkulu>

FREE PAKET HEMAT SERVICE
Untuk semua tipe

Jam Buka Showroom
Penjualan : Senin-Sabtu Jam 08.00-19.30 WIB Bengkel : Senin-Sabtu Jam 08.00-17.00 WIB
Minggu Jam 08.00-16.00 WIB Minggu Jam 08.00-16.00 WIB

Honda Arista
@hondaarista
www.honda-arista.co.id

HONDA ARISTA BENGKULU
JL. ADAM MALIK RT 01 RW 01 PAGAR DEWA KOTA BENGKULU
TELP: 0736-5511888



HILANG: Personel kepolisian turut terlibat membantu warga melakukan pencarian, atas adanya warganya yang hilang.

Pamit Mandi di Irigasi, Nenek 75 Tahun Hilang

VKOTO - Warga Desa Lubuk Cabau dan sekitarnya di Kecamatan V Koto, heboh. Ini setelah seorang nenek berusia sekitar 75 tahun, tidak kunjung pulang. Padahal saat itu diketahui pihak keluarga, ia pamit mandi di Bendungan Manjuto.

Nenek bernama Rupi'ah ini pamit sekitar pukul 05.00 WIB kemarin (23/12) pagi. Namun sampai matahari terbit, hingga siang hari, sang nenek tidak kunjung pulang ke rumah.

Informasi ini dibenarkan Kapolres Mukomuko AKBP. Andy Arisandi, SH, S.IK, MH melalui Kasubbag Humas, AKP. Anwar Efendi. "Sampai sore tadi warga yang bernama Rupi'ah belum ditemukan," kata Anwar.

Pencarian warga ini tidak hanya dilakukan Kades Lubuk Cabau bersama pihak keluarga dan warga desa. Tapi juga dibantu kades dan warga Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto. Polres Mukomuko juga menerjunkan personel Polsek V Koto untuk membantu warga menemukan Rupi'ah.

"Anggota sudah diperintahkan membantu pencarian warga Desa Lubuk Cabau yang pergi dari rumah, yang sampai sekarang belum kembali dan belum ditemukan," kata Anwar.

Saat itu terang Anwar, nenek Rupi'ah pamit dengan orang di rumah, pergi mandi di air aliran irigasi Bendungan Manjuto. Lantaran masih cukup pagi, sekitar pukul 05.00 WIB, anggota keluarga yang mendengar itu, tidak mempermasalahkannya.

Namun setelah pagi hari, Rupi'ah tidak kunjung pulang. Keluarga pun makin gelisah, setelah menyadari bahwa tidak ada air aliran irigasi Bendungan Manjuto. Sebab, sedang dilakukan program pengeringan irigasi untuk perbaikan oleh pemerintah.

Baru kemudian panik. Dengan meminta bantuan warga, untuk dapat menemukan keberadaan nenek Rupi'ah. Upaya penelusuran irigasi, persawahan hingga kebun dilakukan warga bersama polisi dan juga Babinsa Kodim 0428/Mukomuko. Namun sampai berita ini disusun, sang nenek belum kunjung ditemukan dan belum juga diketahui lokasi pastinya. "Belum kembali ke rumah dan belum juga ditemukan. Pencarian masih akan dilanjutkan warga, sampai sang nenek ini ditemukan," pungkasan Anwar. **(hue)**



PEMULSARAN: Dandim 0428/Mukomuko dan Kapolres Mukomuko mengawal langsung proses pemulsaran dan pemakaman 1 warga Mukomuko, kemarin.

Kategori Probable, Pakai Prosedur Prokes Covid-19

Pemakaman 1 Warga

MUKOMUKO - Satu warga Kota Mukomuko dikebumikan dengan mengikuti prosedur protokol Covid-19, kemarin. Ini setelah warga tersebut sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko. Dan ia pun dikategorikan pasien probable atau kasus probable.

Dimaksud dari kasus probable, bahwa orang tersebut masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala infeksi saluran pernapasan (ISPA) berat, gagal napas, atau meninggal dunia. Namun yang bersangkutan belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya positif Covid-19.

Dan untuk memastikan atau mengonfirmasi kasus Covid-19 atau tidak, orang tersebut masih perlu menjalani pengambilan sampel dahak atau swab tenggorokan. Namun belum sempat dilakukan, yang ber-

sangkutan sudah meninggal dunia.

"Hari ini, ada satu lagi pasien berstatus probable, meninggal dunia sebelum sempat dites swabnya," kata Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Mukomuko, Bustam Bustomo, SKM, kemarin.

Sesuai ketentuan, lanjut Bustam, meskipun belum ada hasil yang menyatakan warga itu positif terpapar Covid-19, namun penanganan jenazahnya hingga pemakamannya, harus melalui prosedur protokol pemakaman pasien positif Covid-19.

Sempat ditentang oleh pihak keluarga. Apalagi jenazah sudah harus melewati prosedur pemulsaran di RSUD Mukomuko. Namun setelah mendapat penjelasan dari Satgas, pihak keluarga pun akhirnya bersedia menerima. "Setelah diberikan penjelasan, akhirnya pihak keluarga bersedia memakamkan dengan protokol Covid-19," kata Bustam.

Kegiatan pemulsaran jenazah tersebut di RSUD Mukomuko, mendapat pengawalan langsung dari personel Kodim 0428/Mukomuko dan Polres Mukomuko. Bahkan, Dandim 0428/Mukomuko Letkol. Inf. YM. Teguh Edi Pamungkas dan Kapolres Mukomuko AKBP. Andy Arisandi, SH, S.IK, MH turut memonitor langsung proses di RSUD Mukomuko hingga pemakaman jenazah.

"Ini bagian dari Operasi Aman Nusa II, yakni melaksanakan pengamanan Dan pengawalan pemulsaran jenazah Covid-19. Kegiatan pengamanan berlangsung di RSUD Mukomuko, kemudian dilanjutkan pengawalan pemulsaran jenazah Covid-19 menuju tempat pemakaman," sampai Kapolres.

Pelaksanaan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Personel yang terlibat pengawalan, wajib menggunakan masker dan sarung tangan. Serta tidak lupa dilengkapi dengan

hand sanitizer bagi personel yang terlibat dikegiatan tersebut.

"Khusus petugas yang mengurus langsung jenazah sampai dengan pemakaman, semuanya diharuskan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap. Artinya sudah prosedur, mereka juga harus mengenakan baju azmat," demikian Kapolres.

Dengan adanya kegiatan tersebut, kini Kabupaten Mukomuko mencatat ada 12 orang yang pemakamannya melalui prosedur demikian. Sebelumnya kondisi yang sama diperlakukan dengan salah satu warga Kecamatan Terawang Jaya. Sebelumnya lagi, satu warga Kecamatan Air Dikit, juga mendapat perlakuan yang sama. Hanya saja, jenazahnya tidak boleh dibawa pulang ke Mukomuko, melainkan harus dimakamkan di Padang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Karena saat itu, ia tengah menjalani penanganan medis di daerah tersebut. **(hue)**



Pemerintah Desa Bumi Mulya Kecamatan Penarik Mukomuko

Karsiman
Kades Bumi Mulya

Widanu Hadi Susilo
Sekdes Bumi Mulya

Pembangunan Desa Tetap Berhasil

MESKIPUN pandemi Covid-19 melanda Kabupaten Mukomuko, namun pembangunan di desa tetap sukses berjalan. Ini ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Bumi Mulya

dibawah kepemimpinan Karsiman yang dibantu Sekretaris Desa, Widanu Hadi Susilo dan perangkat desa lainnya.

Tahun 2020, Kades Bumi Mulya Karsiman berhasil mewe-

judkan harapan masyarakat berupa pembangunan gedung PAUD, pembangunan jogging track dan pembangunan tembok penahan tanah. **(hue/krn)**



TUNTAS: Kades dan perangkat Desa Bumi Mulya foto bersama Camat Penarik, Suranto, di gedung PAUD yang tuntas dibangun.



ARAHAN: Camat Penarik memberikan arahan. Tampak hadir Pendamping Pemberdayaan Desa Irawan, SH dan Pendamping Teknis Kecamatan, Riki Soleman.



MONEV: Kegiatan monitoring dan evaluasi dari kegiatan fisik yang tuntas dibangun.

Rp 50 Juta Untuk Musnahkan 150 Ekor Anjing

MUKOMUKO - Siap-siap bagi warga yang memiliki hewan ternak anjing, namun terkesan dilepasliarkan. Tahun 2021 yang hanya hitungan hari lagi, akan dilakukan pemusnahan atau eliminasi anjing liar.

Pagu dana Rp 50 juta sudah dialokasikan, untuk pelaksanaan program eliminasi anjing. Dengan dana sejumlah itu, ditarget bisa memusnahkan setidaknya sekitar 150 ekor anjing, tahun depan. Sebagaimana tidak ditampaik Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Mukomuko, Warsiman.

"Target kita, bisa mengeliminasi sekitar 150 ekor anjing. Anggaran kegiatan eliminasi sudah kami ajukan di APBD tahun 2021 sebesar Rp 50 juta," sampainya.

Wilayah sasaran dari program tersebut, direncanakan diprioritaskan untuk di wilayah Kecamatan Penarik, Lubuk Pinang, Kota

Mukomuko, XIV Koto, dan Air Manjuto. "Target kita fokus di lima kecamatan itu dulu. Belum sampai di 15 kecamatan," kata Warsiman.

Warsiman mengakui jumlah populasi anjing liar di wilayah ini sudah sangat luar biasa banyaknya. Hal itu wajar saja, lantaran sejak tahun 2019 - 2020 ini kegiatan eliminasi anjing liar ditiadakan. Disebabkan minimnya ketersediaan dukungan anggaran.

"Tidak ada kegiatan eliminasi lantaran ketersediaan anggaran tidak cukup. Kami sempat mengajukan anggaran di APBD Perubahan tahun 2020 ini, namun tidak diakomodir lantaran terjadi pandemi Covid. Di APBD murni ada Rp 20 juta, tapi kita nilai, itu tidak cukup sehingga kita kembalikan lagi," sampainya.

Selama kegiatan eliminasi belum dilakukan, Warsiman

mengimbau kepada masyarakat supaya dapat berhati-hati terhadap keberadaan anjing liar. Dan kegiatan ini, untuk mengantisipasi penyakit rabies akibat gigitan dari hewan penular rabies (HPR).

"Mudah - mudahan usulan anggaran kegiatan eliminasi anjing liar dapat diakomodir. Sehingga mampu mengurangi jumlah populasi anjing liar yang ada di Kabupaten Mukomuko," kata Warsiman.

Sementara itu, untuk ketersediaan vaksin rabies, terbatas. Hanya cukup untuk memvaksinasi sebanyak 3.500 ekor HPR. "Kalau target vaksinasi HPR minimal 70 persen dari total populasi HPR sebanyak 11 ribu ekor. Cuma dari jumlah vaksin yang tersedia, tidak sampai sebanyak itu. Sehingga masih ada HPR yang belum tervaksin," demikian Warsiman. **(hue)**

Pria 58 Tahun Ditemukan Tewas



DITEMUKAN: Jasad Salwit dievakuasi warga dari lokasi ditemukan menuju ke rumah duka, kemarin.

SELANGAN RAYA - Salwit (58) ditemukan sudah tidak bernyawa di pinggir sungai. Dia warga Desa Lubuk Bangko Kecamatan Selagan Raya, Mukomuko. Baru berhasil ditemukan, meskipun sudah dalam kondisi meninggal dunia, sekitar pukul 08.00 WIB kemarin (23/12). Padahal upaya pencarian sudah dilakukan sejak sore Selasa (22/12) hingga kemarin (23/11) pagi.

"Baru ditemukan sekitar pukul 08.00 WIB tadi pagi (kemarin). Kondisinya sudah meninggal dunia. Jenazah ditemukan di anak sungai dekat ladang korban," kata Kapolres Mukomuko AKBP. Andy Arisandi, SH, S.IK, MH melalui Kasubbag Humas, AKP. Anwar Efendi.

Butuh perjuangan yang tidak mudah untuk mengevakuasi jasad korban. Pasalnya, jarak ladang tempat korban ditemukan ke permukiman warga membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam menggunakan sepeda motor.

Dengan medan yang dilintasi tanah dan terjal.

"Baru sekitar pukul 13.11 WIB tiba di kediaman rumah duka. Jenazah langsung dimakamkan hari ini (kemarin) juga," kata Anwar.

Bermula pada Selasa (22/12), sekitar pukul 07.00 WIB korban berangkat dari rumah di Desa Lubuk Bangko bersama istrinya, Delis (45). Mereka pergi untuk mengecek kebun atau ladangnya yang terletak di Sungai Tering, Desa Lubuk Bangko.

"Dari rumah pasutri ini mengendarai satu motor. Karena akses ke lokasi ladang tidak memungkinkan, sang istrinya ini ditinggal di areal persawahan bersama motor," cerita Anwar.

Saat itu, korban berjanji akan pulang dari kebun sekitar pukul 14.00 WIB. Namun sampai lewat jam tersebut, sang suami tidak kunjung muncul. Sementara sang istri tidak punya keberanian untuk menyusul suaminya, sendirian ke lokasi kebun.

"Sekitar pukul 14.00 WIB, karena korban tidak kunjung pulang, istrinya ini pulang ke desa dan menceritakan dengan warga mengenai suaminya yang tidak kunjung pulang," kata Anwar.

Heboh lalu sekitar pukul 19.00 WIB warga Desa Lubuk Bangko melakukan pencaharian ke kebun korban. Lantaran jarak yang jauh dari pemukiman, sehingga diputuskan pencarian pun sampai pagi harinya.

Apa hendak dikata, sekitar pukul 08.00 WIB kemarin, warga yang melakukan pencarian menemukan korban sudah tergeletak di pinggir sungai. Melihat kondisinya, diduga kuat korban saat itu tergelincir dan kepalanya membentur batu sungai. Sebab didapati luka robek di pelipis sebelah kanan, dan tangan tangan sebelah kanan bekas lecet.

"Tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun diserang binatang buas. Ditaksir, kejadian korban tergelincir ini sekitar pukul 15.00 WIB, hari Selasa itu," sampai Anwar.

Jasad korban pun dievakuasi dengan cara dimasukkan ke dalam kain. Lalu dipikul bersama-sama, menggunakan kayu. "Jarak antara rumah korban dengan ladang sekitar 1 jam naik Motor. Korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dikebumikan," demikian Anwar. **(hue)**

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS KETAHANAN PANGAN Jalan Terminal Simpang Nangka Air Merah Atas CURUP - 39153			
Rekap Daftar Harga Bahan Pokok Di Tingkat Pengecer Pasar Atas Curup			
1. Bayam	2.500	10. Terong Ungu	3.000
2. Bawang Daun	6.000	11. Sawi Manis	3.000
3. Cabe Rawit Hijau	32.000	12. Koli	5.000
4. Cabe Merah Besar	35.000	13. Bawang Merah	36.000
5. Cabe Keriting	40.000	14. Bawang Putih	23.000
6. Buncis	8.000	15. Kangkung	2.000
7. Tomat	5.000	16. Kentang	12.000
8. Kacang Panjang	5.000	17. Timun	4.000
9. Wortel	5.000	18. Koli Kembang	10.000
		19. Daging Sapi	120.000
		20. Daging Kerbau	120.000
		21. Ikan Nila	26.000
		22. Ikan Mas	30.000
		23. Ikan Laut Sarden	26.000
		24. Ikan Lele	24.000
		25. Telur Ayam Ras	22.000
		26. Daging Ayam Ras	32.000
		27. Beras Premium	10.250

LINTAS

Kembali Gelar Latdastar

CURUP – SMK Negeri 3 RL memastikan akan segera kembali menggelar kegiatan Latihan Dasar Ketrampilan (Latdastar) bagi siswa/siswi mereka. Dimana untuk kegiatan tahun 2020 ini terkendala karena sedang pandemi Covid-19. Sehingga direncanakan akan dilaksanakan pada awal tahun 2021.

Kepala SMKN 3 RL Asep Suparman, M.Pd mengatakan kegiatan Latdastar yang sudah rutin mereka gelar setiap tahun ajaran baru ini bekerjasama dengan Kodim 0409/RL dan Batalyon Infanteri 144/Jaya Yudha. "Pelaksanaannya tetap bekerja sama dengan Kodim dan Batalyon. Jadwal awal tahun 2021," sampai Asep.

Dilanjutkan Asep, meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pelaksanaan tetap digelar dengan wajib disiplin protokol kesehatan (prokes). Apalagi jumlah total siswa kelas 1 di SMKN 3 RL mencapai 150 orang yang harus dirancang dalam beberapa sesi dan tahapan pelaksanaan Latdastar.

"Latdastar sudah menjadi agenda rutin yang dilaksanakan di sekolah kita untuk peserta didik baru. Karena ini penting untuk pembentukan karakter anak terutama sikap mereka. Ditambah lagi siswa saat ini harus belajar secara daring, sehingga pembentukan karakter bagi siswa nyaris tidak ada. Maka dengan adanya Latdastar ini nanti menjadi salah satu cara kita membantuk karakter anak-anak didik kita," papar Asep. (dtk)



DOORPRIZE: Direktur PDAM Tirta Dharma Kabupaten RL, Orin Retnowati menyerahkan doorprize untuk pelanggan terbaik.

PDAM Bagikan Hadiah Untuk Pelanggan Terbaik

CURUP – PDAM Tirta Dharma Rejang Lebong (RL) memenuhi janjinya memberikan hadiah menarik di penghujung tahun bagi pelanggan terbaik. Khususnya pelanggan yang rutin dalam melakukan pembayaran.

Hadiah atau doorprize tersebut dibagikan kemarin oleh Direktur PDAM Tirta Dharma RL, Orin Retnowati di halaman Kantor PDAM Tirta Dharma. Hadiah utamanya adalah satu unit mesin cuci sekaligus mangkok makanan. "Ada 30 pelanggan yang kita berikan hadiah menarik di penghujung tahun 2020 ini. Untuk doorprize atau hadiah utamanya satu unit mesin cuci dan sudah kita serahkan beserta empat hadiah doorprize pelanggan lainnya," kata Orin kemarin.

Dilanjutkan Orin, untuk 25 pemenang lainnya akan diantar langsung oleh petugas mereka ke rumah masing-masing. Pemberian hadiah atau doorprize pagi pelanggan yang lancar dalam pembayaran rekening ini sebagai bentuk dan upaya untuk memotivasi pelanggan. Agar bisa tetap lancar dan tidak menunggak setiap bulannya dalam pembayaran tagihan rekening air mereka. (dtk)

Misa Natal Secara Virtual

CURUP – Perayaan Natal yang akan dilaksanakan umat Kristiani salah satunya di Gereja Kristen Injili Indonesia (GKII) Kabupaten RL. Pendeta GKII Pasar De Curup, Frans Ludji mengatakan dalam pelaksanaan misa Natal, mereka melaksanakannya secara virtual guna mencegah penyebaran Covid-19.

Dipastikan tidak ada yang hadir di gereja demiantisipasi penyebaran Covid-19. Baik hari ini dan besok termasuk pada tutup tahun serta tahun baru nantinya, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan di gereja. Kegiatan misa Natal, sambung Frans, akan mereka laksanakan secara virtual. Dimana jemaat akan mengikutinya dari rumah masing-masing yang dilaksanakan melalui media sosial atau secara virtual.

"Jadi ini sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan anjuran pemerintah yang tidak memperbolehkan adanya pengumpulan massa dalam jumlah banyak," sambung Frans. Kegiatan kunjungan dari rumah ke rumah oleh pengurus gereja maupun jemaat atau kegiatan 'open house' juga tidak diperbolehkan. Karena ini juga berpotensi akan terjadinya penyebaran Covid-19. (dtk)



CEGAH COVID: Polres RL melakukan penyemprotan disinfektan di sejumlah lokasi di Kota Curup menggunakan mobil water cannon.

Polres Semprot Disinfektan

CURUP – Tidak hanya melakukan kegiatan pengamanan dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Polres Rejang Lebong (RL) juga tetap fokus membantu pemerintah dalam penanganan dan antisipasi penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan kegiatan penyemprotan disinfektan di berbagai titik seputar Kota Curup.

Diungkapkan Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH, kegiatan penyemprotan disinfektan yang dilakukan dengan menurunkan armada mobil water cannon. Kegiatan dipimpin langsung Kabag Sumda AKP Dodi Cahyadi J, SE. Titik-titik yang dilakukan penyemprotan yaitu perkantoran Polri dan asrama Polri.

Selain itu, lanjut Kapolres, penyemprotan juga dilakukan di beberapa wilayah jalan protokol seputaran Kecamatan Curup dan

sekitarnya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Kabupaten RL. "Selain pengamanan menyambut perayaan Nataru, kita juga tetap fokus pada penekanan protokol kesehatan Covid-19. Termasuk kegiatan penyemprotan disinfektan sebagai langkah untuk antisipasi," jelas Kapolres.

Selain itu, tambah Kapolres, mereka juga dalam melaksanakan Operasi Lilin Nala 2020, mendapat tugas tambahan. Yaitu melakukan upaya pendisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes) Covid-19. "Khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas di luar rumah harus dan wajib menggunakan masker. Selain mengamankan perayaan Nataru, kita juga tetap melakukan pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait prokes Covid-19," jelasnya. (dtk)

Pelayanan SIM Diliburkan

CURUP – Satuan Lalu Lintas Polres RL terhutang hari ini (24/12) meliburkan pelayanan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Libur dilakukan selama empat hari atau sampai 27 Desember 2020 dalam rangka hari Natal tahun 2020. Hal ini disampaikan Kapolres RL AKBP Puji Prayitno, S.IK, MH melalui Kasat Lantas Polres RL Iptu Aan Setiawan, S.Sos, MM kepada RB.

"Sesuai dengan kebijakan penetapan hari libur dalam rangka perayaan hari Natal tahun 2020, pelayanan SIM libur selama empat hari. Atau mulai besok (hari ini, red) hingga 27 Desember 2020. Namun setelahnya, pelayanan akan kita buka kembali seperti biasanya," jelas Aan.

Dilanjutkan Aan, bagi pemegang SIM yang habis masa

berlaku pada rentang waktu 24-27 Desember 2020 tetap bisa diproses. Mereka memberikan kesempatan pengurusan perpanjangan SIM dalam rentang waktu 28-30 Desember 2020. "Jadi mereka yang masa berlaku SIMnya habis direntang waktu saat libur, tetap bisa memperpanjang SIM dan diurus dalam rentang waktu 28-30 Desember 2020," sambung Aan.

Ditambahkan Aan, bagi mereka yang tidak melakukan perpanjangan SIM dalam kurun waktu yang sudah diberikan, maka akan diberlakukan mekanisme pengurusan SIM baru. "Makanya kita imbau bagi yang memiliki SIM habis masa berlaku di tanggal 24-27 Desember 2020, datanglah ke pelayanan SIM Polres Rejang Lebong di jadwal yang sudah kita tetapkan yaitu 28-30 Desember 2020," terang Aan. (dtk)



PUJI PRAYITNO

Minta Anggarkan Program Pemberdayaan

CURUP – Peran perempuan dalam membantu perekonomian keluarga sangat penting. Dimana saat ini sudah banyak wadah perempuan yang memfasilitasi agar mereka juga bisa berperan dalam membantu ekonomi keluarga. Salah satunya para perempuan yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Desa Sekitar (JPDS) Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) di Kabupaten RL.

JPDS TNKS saat ini sudah beranggotakan 5 kelompok perempuan desa sekitar TNKS. Yakni KPPL Maju Bersama Desa Pal VIII dengan anggota 25 orang, KPPL Karya Mandiri Desa Tebat Tenong Luar dengan anggota 15 orang, KPPL Sumber Jaya Desa Karang Jaya dengan anggota 49 orang, KPPL Sejahtera Desa Sumber Bening



TNKS: Para perempuan desa sekitar TNKS di Kabupaten RL melaksanakan pertemuan.

dengan anggota 46 orang, dan KPPL Karya Bersama Desa Sambirejo dengan anggota 20 orang.

Mereka berharap, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk tidak lupa menganggarkan program pemberdayaan bagi mereka. Agar tidak dianggap melanggengkan perlakuan tidak adil terhadap perempuan desa sekitar TNKS.

"Menganggarkan program pemberdayaan, berarti Pemkab Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu berlaku adil terhadap perempuan desa sekitar TNKS," kata anggota JPDS TNKS yang juga Sekretaris KPPL Maju Bersama, Feni Oktaviani.

Khusus program pemberdayaan, JPDS TNKS merekomendasikan agar diprogramkan kegiatan penguatan kapasitas mengenai peluang dan tahapan bermitra dengan Balai Besar TNKS. Serta program pengembangan ekonomi produktif terkait pemanfaatan kawasan dan potensi di TNKS, penguatan kelompok perempuan, pengembangan produk dari pemanfaatan potensi di

417 Warga Positif Covid-19 Sembuh

Tersisa 21 Kasus Positif

CURUP – Satgas Penanganan Covid-19 RL mencatat hingga kemarin jumlah konfirmasi positif Covid-19 yang masih dalam pengawasan tersisa 21 kasus lagi. Dimana total keseluruhan konfirmasi positif mencapai 438 kasus dengan jumlah selesai konfirmasi atau sembuh sudah mencapai 417 kasus.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) RL, Syamsir, S.KM, M.KM, kemarin. "Sebanyak 21 kasus masih dalam pengawasan," sampai Syamsir.

Diungkapkan Syamsir, kemarin mereka mencatat ada dua tambahan kasus positif baru. Yakni kasus 437 bocah perempuan berusia 5 tahun asal Kecamatan Selupu Re-

jang dan kasus 438 perempuan usia 38 tahun asal Kecamatan Curup Selatan. "Kedua kasus positif baru ini sudah melakukan isolasi mandiri," jelas Syamsir.

Ditambahkan Syamsir, kemarin mereka juga mencatat ada tambahan selesai konfirmasi atau sembuh sebanyak ada 15 kasus. Masing-masing dari Kecamatan Curup yaitu kasus 355, 415, 418 dan kasus 424. Kemudian dari Kecamatan Selupu Rejang masing-masing kasus 404, 410, 412 dan kasus 413.

Selanjutnya, konfirmasi selesai atau sembuh dari Kecamatan Curup Timur yaitu kasus 351 dan kasus 417, asal Kecamatan Curup Selatan yaitu kasus 352 dan kasus 421. Serta dari Kecamatan Curup Tengah kasus 414 dan kasus 423. Ditambah satu kasus sembuh dari Kecamatan Binduriang yaitu kasus 416. (dtk)

TNKS, dan penguatan manajemen usaha kelompok seperti pemasaran dan keuangan. "Namun sampai saat ini dari berbagai rekomendasi yang pernah kita sampaikan tersebut, sepertinya belum satupun direalisasikan. Padahal Pemkab maupun Pemprov harus melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak-hak perempuan desa sekitar TNKS atas lingkungan hidup dan hutan, dan menganggarkan program pemberdayaan untuk perempuan desa sekitar TNKS," tambah Koordinator JPDS TNKS yang juga Ketua KPPL Maju Bersama Rita Wati. (dtk)

Wahana Mini BERDAYA MAKSI
Tarif MURAH dengan Jangkauan LEBIH LUAS
Tarif iklan Rp 5.500 per baris. Minimal 3 baris, maksimal 10 baris.

KOTA BENGKULU :
GRAHA PENA,
Jl. P. Natadiri No. 69 Km 7
Telp (0736) 22060 & (0736)-20882

CURUP :
DEPOT KORAN YANTO (samp wrg Kopi Ria),
Jl. Merdeka No. 219 Telp (0732) 23516
MANNA : WAHAB ANANG AGENCY, Jl. Jend. Sudirman
Simpang Tiga Rukis, Telp (0739) 21407

• JUAL TANAH •

LT 10x20, Lok. Prumnas Pinang Mas, SHM, Hrg Nego. Tanpa Perantara. Hub. 085228004888

• KEHILANGAN •

SERTIFIKAT, Tanah Wakaf No. 00001/TjAgung, NIB 07.06.11.1200002, Ah. Drs. Buyung Jurdan, Ahli Desa Tj. Agung Kec. Ulu Tabo Kab. Seluma

• RUANG USAHA •

DUJUAL, 2Ruko Skala, co. uk. kntor, JS Parman No. 19 Kota BK, Mesing 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

• JUAL MOBIL •

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK Menjual Daihatsu Ayla D Plus 1.0 MT Th 2015 BD1654DA, Honda All New Jazz IVTECH RS 1.5 MT Th 2013 BD11557JZ, Hub Telp. 0736-347820/ 081271246545

Pengurusan Perizinan Menurun

Selama Pandemi Hanya 1.045 Izn Terbit

KEPAHIANG - Pandemi Covid-19, tak hanya memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat saja, namun juga berdampak pada proses pengurusan perizinan yang dilakukan masyarakat di Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kepahiang.

Bahkan selama tahun 2020 ini, DPM-PTSP Kepahiang hanya menerbitkan 1.045 izin. Angka ini menurun drastis dibanding tahun 2019 lalu yakni kisaran 1.600 izin dari sejumlah bidang usaha masyarakat di Kabupaten Kepahiang.

Kabid Perizinan dan non Perizinan DPM-PTSP, Dedi Mulyadi, S.Hut mengatakan, penurunan yang drastis untuk tahun 2020 memang disebabkan wabah Covid-19 yang mempengaruhi sektor usaha dan kegiatan masyarakat.

"Tahun 2019 lalu perizinan yang diterbitkan didominasi adanya pendirian perumahan oleh pengusaha, tapi tahun 2020 ini nampaknya hanya sedikit saja. Dilihat dari proses perizinan yang kita terbitkan yang paling saat ini hanya perizinan dari masyarakat yang mendirikan perumahan," kata Dedi.

Disampaikan Dedi, total izin yang diterbitkan dari berbagai jenis izin, ada yang bidang kesehatan, ada juga IMB dan sejumlah izin lainnya. Dirinya tetap berharap masyarakat Kepahiang bisa melakukan pengurusan izin ketika mendirikan usaha, karena perizinan sangat dibutuhkan dalam hal kelengkapan administrasi.

"Tahun 2021 mendatang kita akan dorong masyarakat yang belum mengantongi izin supaya melakukan pengurusan, karena proses pengurusan izin ini tidak lagi membutuhkan biaya," sampai Dedi.

Terkait perizinan yang dipungut retribusi, Dedi mengatakan, hanya 3 jenis perizinan yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin reklame dan beberapa izin kesehatan.

"Hanya 3 izin itu saja yang kita layani terkait retribusi, dan itu pun retribusinya langsung ke OPD teknis masing-masing. Seperti IMB itu langsung ke Dinas PUPR, reklame ke BKD Keuangan dan sektor kesehatan ke Dinkes. Retribusinya juga tidak besar dan dipastikan sesuai dengan aturan yang berlaku," demikian Dedi. (sly)

Terindikasi Berencana Membunuh Sepupu



EKSPOSE: Kapolres Kepahiang AKBP. Suparman, S.IK, M.AP didampingi Kabag Ops dan Kasat Reskrim, saat menggelar ekspo perkara pembacokan sepupu di aula Vicon Polres Kepahiang kemarin (23/12).

Terancam Pidana 15 Tahun Penjara

KEPAHIANG - Kendati masih anak dibawah umur, namun AS (16), warga Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang yang sudah menikah, berkemungkinan terancam huku-

man berat. Terkait pembacokan yang dilakukannya terhadap Ar (12), warga Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang, tak lain adalah sepupunya sendiri.

Disampaikan Kapolres Kepahiang AKBP Suparman, S.IK, M.AP dalam ekspo perkara di hadapan sejumlah awak media, kemarin (23/12).

Tersangka AS dijerat pasal 340 jo pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan pembunuhan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Itu lantaran tersangka diduga sudah berniat sejak awal membacok sepupunya. Terindikasi dari alat yang digunakan melukai korban yakni i sebilah parang yang dibawa

tersangka dari rumah.

"Untuk sementara, itu hasilnya. Sebagaimana penyelidikan, pemeriksaan saksi dan pengakuan tersangka. Maka diketahui tersangka memang awalnya benar-benar berniat mencelakai korban dengan senjata tajam. Jadi kita sangkan dengan pasal 343 KUHP jo pasal 53 KUHP, kendati kita tetap berkoordinasi nantinya dengan Bappas terkait status tersangka yang masih anak dibawah umur," terang Kapolres.

Dijelaskan Kapolres, berdasarkan penuturan tersangka yang baru 7 bulan menikah ini, aksi nekat tersebut dilakukan lantaran kesal karena korban marah-marah ketika orang tuanya menagih utang kepada orang tua korban.

"Sebenarnya antara tersangka dan korban ini masih ada hubungan keluarga, yakni sepupu. Sebelum kejadian, kedua keluarga ini sempat sudah damai di kantor Desa Pelangkian. Namun tersangka sepertinya masih kesal terhadap korban, dan mencari korban dengan membawa sajam jenis parang, kemudian terjadilah aksi pembacokan tersebut," jelas Kapolres.

Untuk kondisi korban saat ini, sambung Kapolres, masih kritis dan masih mendapatkan penanganan medis akibat luka bacok di kepala dan tubuhnya. Bahkan korban sudah dirujuk RSUD Kepahiang ke RSMY Bengkulu untuk penanganan medis lebih lanjut.

"Informasi yang kita terima saat ini, korban sudah dirujuk ke RSMY oleh pihak RSUD Kepahiang, lantaran kondisinya yang semakin kritis," beber Kapolres. (sly)

PPK dan PPS Berakhir Januari 2021

Siapkan Dokumen Gugatan Pilgub

KEPAHIANG - Kendati tahapan Pilkada 2020 sudah selesai, namun bukan berarti kerja jajangan Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), sudah berakhir. Para penyelenggara ini tetap harus menyelesaikan pekerjaannya menyusun dokumen laporan, khususnya terkait pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk disampaikan ke KPU RI. Ini sebagai bahan penjelasan dari gugatan yang dilayangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Agusrin Najamudin - Imron Rosyadi.

Komisioner KPU Kepahiang Supran Efendi, S.Sos.I, M.Pd mengatakan, dokumen yang akan disiapkan seperti jumlah surat suara (Susu) ketika pencoblosan, jumlah C6 atau undangan yang dibagikan kepada masyarakat dan sejumlah dokumen lainnya. Memang KPU Kepahiang menunggu register dari Mahkamah Konstitusi (MK) tapi itu harus disiapkan sejak sekarang.

"PPK dan PPS supaya menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan ketika pencoblosan. Karena yang menjadi objek protes ketika pleno di Kepahiang itu terkait undangan dan surat suara," kata Supran.

Disampaikan Supran, masa jabatan PPK dan PPS akan berakhir 31 Januari mendatang. Artinya masih tersisa kinerja selama 1 bulan tahun 2021 mendatang dan waktu itulah akan digunakan untuk bekerja dalam rangka persiapan dokumen, sehingga ketika dilakukan pembubaran seluruh dokumen telah siap.

"Memang informasi dari website terkait gugatan sudah kita dapatkan, tapi kita tetap menunggu pengumuman resmi dari MK melalui register. Yang jelas ketika gugatan benar-benar teregister nanti, KPU Kepahiang sudah siap menyerahkan alat bukti ketika memasuki tahapan persidangan," demikian Supran. (sly)



HANGUS: Rumah yang dihuni oleh karyawan PT SMKI di Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang usai dilalap api.

Gudang Minyak Proyek SMI Ludes Dilalap Api

KEPAHIANG - Masyarakat Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang, pukul 08.45 WIB kemarin (23/12) dihebohkan kobaran api yang melalap salah satu rumah. Empat mobil pemadam kebakaran (Damkar) turun memadamkan api yang mengangas tersebut.

Data terhipun RB, kebakaran tersebut menghancurkan rumah milik Rumantak yang saat ini disewa

oleh PT Sarana Multi Karya Indonesia (SMKI), yang merupakan mitra kerja dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Perusahaan tersebut sedang mengerjakan proyek percepatan pembangunan di Kabupaten Kepahiang.

Rumah itu sebagai basecamp bagi beberapa pekerja proyek yang dibiayai PT SMI. Juga sebagai gudang penyimpanan bahan bakar minyak

(BBM) jenis solar untuk kebutuhan alat berat proyek pembangunan jalan. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran. Kerugian ditaksir sementara ini mencapai Rp 300 juta. Kapolres Kepahiang AKBP. Suparman, S.IK, M.AP melalui Kasat Reskrim Iptu. Welliwanto Malau, S.IK, MH membenarkan perihal peristiwa tersebut. Menurutnya, hingga saat masih melakukan penyelidikan

dari kejadian yang menghancurkan beberapa mebel dan dokumen PT SMKI tersebut.

"Kita sudah lakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi termasuk tiga orang yang berada di rumah tersebut saat kejadian. Belum bisa kita ketahui pasti penyebabnya, karena masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut," demikian Welliwanto. (sly)

JUAL & ISI ULANG
TABUNG ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) | **GUARANTEED**

CEGAH KEBAKARAN DI RUMAH ANDA???

GUNAKAN APAR

- Aman
- Praktis
- Ekonomis

Kami Siap Antan Ke Rumah Anda

-0813 6778 7901
-0812 6169 4484
-0823 76 777776
-0736 52881

PROMO PALING MURAH
DISKON PALING BESAR | Agung TOYOTA

Agya Angsuran 2,6 Jt
Calya Angsuran 2,7 Jt
Avanza Angsuran 3,5 Jt
Pick Up Hilux Angsuran 4,9 Jt
Dyna Dump Truck Angsuran 8 Jt
Rush Angsuran 4,4Jt
Innova Angsuran 5,6Jt
Fortuner Angsuran 8,5Jt

Promo Paling Murah | Discon Paling Besar | Buruan Hanya dibulan ini!

Jangan Malu Bertanya Yaa...
Melayani Pemesanan Mobil, Booking Service dan info Spare Part
Proses Cepat & Mudah Bertabur Hadiah

Minat...??? Hubungi Anto, S.Sos
HP/WA : 0852 6869 8619
Facebook : Irwanto SSOS

Lima OPD Minim Serapan Anggaran

KEPAHIANG - Dari 36 OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang, hingga saat ini masih ada OPD yang serapan anggarannya minim. Jauh dari target yang ditetapkan, yakni 92 persen.

Terhitung 30 November 2020, ada lima OPD yang tak memenuhi target. Diantaranya, Kecamatan Kepahiang serapan anggaran hanya 65,06 persen. Kemudian Badan Keuangan Daerah (BKD) 49,92 persen, RSUD Kepahiang 48,61 persen, Dinas PUPR 27,64 persen dan BPBD 24,19 persen.

Untuk itu, menjelang Rapat pimpinan (Rapim) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Ang-

garan (TEPRA) tahun 2020 ini, seluruh OPD diberi tenggat waktu hingga 29 Desember 2020 untuk memaksimalkan serapan anggarannya. Minimal 92 persen.

Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pembangunan Setkab Kepahiang Herwin Noviansyah, S.Sos. MM mengatakan, ketika Rapim terakhir yang dilaksanakan tidak ada lagi OPD Kepahiang yang beralasan anggaran yang tidak terealisasi. Karena sudah diberikan waktu selama 1 tahun. "Sesuai instruksi atasan, anggaran seluruh OPD wajib di atas 92 persen. Artinya ke depan tidak ada lagi OPD Kepahiang yang mendapatkan rapor merah," kata

Herwin.

Menurut Herwin, bila masih ditemukan OPD Kepahiang mendapatkan rapor merah, haruslah memberikan alasan yang tepat. Biasanya, lantaran masih adanya pekerjaan fisik. Tapi untuk Rapim terakhir nanti, sambung Herwin, seluruh kontrak pekerjaan fisik OPD sudah tuntas dan laporan keuangannya juga wajib tuntas.

"Kita berharap menjelang Rapim ini, seluruh OPD menyerahkan realisasi anggaran dengan kita. Sehingga bisa diketahui sejauh mana realisasi keuangan Kabupaten Kepahiang," pungkasnya. (sly)

Salurkan Dana BOP PAUD Rp 838 Juta

BENTENG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp 838 juta. Dana BOP ini merupakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Kepala Disdikbud Benteng, Saidirman, SE, MM melalui Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan PNF Disdikbud Benteng, Sri Rusniati, SE mengatakan, dalam dana BOP ini diberikan kepada 114 PAUD dengan total anggaran sebesar Rp 838 juta. Khusus dana BOP kepada PAUD, ada satu PAUD yang tidak mendapatkan dana tersebut.

"Khusus di Benteng terdapat 115 PAUD dan satu PAUD yang tidak mendapatkan BOP, sehingga hanya 114 PAUD yang mendapatkan dana BOP. Satu PAUD yang tidak mendapatkan dana BOP yakni PAUD Cenderawasih Desa Tengah Padang, Kecamatan Talang. PAUD tersebut tidak mendapatkan dana BOP disebabkan tidak mengajukan proposal kepada kita untuk mendapatkan dana BOP," ungkapnya.

Dia menambahkan PAUD yang mendapatkan dana BOP tertinggi sebesar Rp 15 juta. Besaran setiap PAUD yang mendapatkan dana memang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan berdasarkan jumlah peserta didik di setiap PAUD. Semakin banyak jumlah PAUD, maka akan tinggi juga dana BOP yang akan diterima.

"Untuk PAUD yang mendapatkan BOP ini, minimal peserta didik berjumlah 12 orang. Apabila kurang, maka tidak akan mendapatkan dana BOP. Selain itu PAUD harus mengajukan berkas kepada Disdikbud, kemudian akan diverifikasi. Apabila dalam verifikasi pemberkasan yang kita lakukan sesuai dengan data Dapodik, maka akan dinyatakan berhak menerima dana BOP," bebernya.

Lanjutan Sri, kemarin semua PAUD sudah mengurus persyaratan untuk kelengkapan pencairan ke Badan Keuangan Daerah (BKD), seperti penandatanganan NPHD. Setelah semuanya sudah mengurus proses pencairan, Senin dan Selasa mendatang semua dana BOP ini akan ditransfer ke masing-masing rekening PAUD yang menerima.

"Untuk BOP ini setiap anak akan mendapatkan bantuan Rp 50 ribu setiap satu bulan atau selama satu tahun mendapatkan Rp 600 ribu. Pencairan dana BOP pada saat ini merupakan pencairan pada tahap kedua. Tahap pertama sudah dilakukan pencairan pada bulan Juni lalu," jelasnya.

Diakui Sri, dalam pencairan tahap kedua ini sebenarnya sudah mengalami keterlambatan. Sebab ada keterlambatan beberapa PAUD yang menyerahkan berkas ke Disdikbud. "Sehingga dengan keterlambatan ini, maka verifikasi kita juga baru bisa diproses pada bulan Desember. Sedangkan kita sudah menunggu sejak bulan September untuk melakukan verifikasi. Kita juga sudah meminta ke depannya jangan lagi terlambat," pungkasnya. (jee)

Ajukan Tujuh Raperda

BENTENG - Menyambut tahun 2021, Pemkab Benteng mengajukan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD Benteng untuk dibahas. Sekretaris Daerah (Sekda) Benteng, Edy Hermansyah, S.Si, M.Sc, Ph.D menerangkan 7 raperda tersebut yakni raperda tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Benteng yang merupakan usulan dari Satpol PP.

Selanjutnya, raperda tentang penyelenggaraan terminal usulan dari Dinas Perhubungan, raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum usulan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop dan UKM), raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha usulan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, raperda tentang kawasan tanpa rokok usulan dari Dinas Kesehatan, raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman usulan dari Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan. Serta raperda tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman usulan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Menurutnya, tahun 2020 ini raperda yang sudah selesai dibahas ada 11 raperda. Yakni raperda tentang rencana pembangunan industri kabupaten, raperda tentang Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), raperda tentang perubahan atas perda nomor 13 tahun 2016, raperda tentang perubahan atas perda nomor 04 tahun 14, raperda tentang penyertaan modal Pemkab Benteng kepada Bank Bengkulu.

Selanjutnya, raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran tahun 2021, raperda tentang perubahan atas perda nomor 15 tahun 2015, dan raperda tentang perubahan perda RPJMD. (jee)



RAZIA: Saat Tim Satgas Covid-19 melaksanakan razia di komplek perkantoran Pemkab Benteng di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi.

Razia di Area Pemkab, 15 Orang Terjaring

Tidak Patuhi Prokes

BENTENG - Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) terus melaksanakan razia yustisi penegakan peraturan bupati (perbup) nomor 37 tentang penegakan hukum kedisiplinan masa pandemi Covid-19. Kemarin (23/12), ada 15 orang yang terjaring dalam razia yang dilaksanakan di lingkungan perkantoran Pemkab Benteng di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi.

Kepala Satpol PP Benteng, Gunawan R, SE, MM menjelaskan, dalam razia yang digelar di lingkungan perkantoran Pemkab ini, tim Satgas mendapatkan 15 orang dan pelaku usaha yang tidak taat dalam melaksanakan prokes. Dari 15 yang melanggar ini, teguran lisan sebanyak delapan orang dan tujuh orang

teguran tertulis.

"Selama 13 kali digelar razia selama bulan Desember ini, sudah 193 yang terjaring. Dari 193 ini terdiri dari sanksi teguran lisan sebanyak 127, teguran tertulis 63 dan sisanya dikenakan denda administratif. Yang dikenakan sanksi tersebut merupakan pelaku usaha yang tetap tidak taat dalam penerapan prokes sehingga diberikan sanksi denda Rp 500 ribu," jelasnya.

Gunawan menambahkan, khusus bulan Desember ini memang difokuskan pada kawasan wisata, pelaku usaha dan fasilitas umum lain yang memang banyak dikunjungi masyarakat. Serta perkantoran tidak luput harus digelar razia. Semua ini harus dilaksanakan karena saat ini kasus Covid-19 di Benteng meningkat.

"Sejak bulan November hing-

ga Desember ini kita gelar razia, kesadaran masyarakat masih sangat minim untuk disiplin memakai masker. Kami selalu meminta dan mengimbau kepada masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan prokes demi kesehatan bersama," imbaunya.

Lanjutnya, dengan sudah 26 kali digelar razia selama bulan November dan Desember ini, maka untuk pelaksanaan razia sudah selesai untuk tahun 2020. "Razia pada tahun 2021 mendatang kita masih menunggu perintah lanjutan dari Ketua Satgas Covid-19 dalam hal ini Bupati Benteng. Akan tetapi apabila kita mengacu selama dua razia ini, razia penerapan prokes harus digelar kembali. Karena kesadaran masyarakat masih sangat minim terhadap penerapan prokes," ungkapnya. (jee)



TOL: Pengerjaan pembangunan jalan tol yang berada di zona dua yakni di Desa Jumat hingga Desa Penanding.

Bahas Ganti Rugi Lahan Warga Sukarami

Musyawarah Tahap Kedua, Awal Tahun

BENTENG - Kantor Pertanahan Bengkulu Tengah (Benteng) memastikan untuk musyawarah tahap kedua perihal nilai ganti rugi lahan 90 Warga Terdampak Pembangunan (WTP) tol di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung akan digelar awal tahun 2021. Bila dalam musyawarah tahap kedua ini masih ada WTP yang keberatan dan tidak menerima, maka

akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Arga Makmur, Bengkulu Utara.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Benteng, Ir. Hazairin Masrie, MM. Ia menegaskan saat ini Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sudah menyelesaikan semua penilaian ulang terhadap lahan 90 WTP di Desa Sukarami yang menolak nilai ganti rugi pada musyawarah tahap pertama. 90 WTP ini menolak dikarenakan mereka menilai, jika penilaian yang dilakukan tidak sesuai dan merugikan mereka.

"Setelah 90 WTP ini menolak, mereka meminta KJPP untuk melakukan penilaian ulang. Penilaian ulang sudah dilaksanakan, nilai ganti ruginya akan kita keluarkan pada 4 Januari 2021 sekaligus dengan dilaksanakannya musyawarah tahap kedua," ungkapnya.

Dia menambahkan, apa-

bila dalam musyawarah tahap kedua masih ada WTP yang keberatan dan tidak menerima nilai ganti rugi yang dikeluarkan KJPP, maka pihaknya akan menyerahkan penyelesaian ganti rugi lahan tersebut kepada pengadilan. Namun, bagi WTP tol yang nantinya sudah menyetujui besaran ganti rugi yang kita tetapkan, maka akan langsung dapat kita proses pencairannya di bank.

"Total keseluruhan lahan terdampak pembangunan tol di Desa Sukarami sebanyak 113 bidang lahan dan 23 diantaranya sudah setuju dengan nilai ganti rugi yang ditetapkan. Mengenai nilai setelah dilakukan penilaian ulang, kita belum mengetahui secara pasti ada kenaikan atau tidak, karena KJPP belum menyerahkan kepada kita," jelas Hazairin.

Lanjutnya, dalam melakukan penilaian ulang, pasti ada nilai ganti rugi yang naik, yang tetap atau ada nilai ganti rugi yang turun. Jadi dalam penilaian ulang ini, belum tentu bidang tanah yang ditinjau kembali itu harganya akan naik dari harga sebelumnya. Di desa Sukarami ini terdapat salah satu WTP atas nama Damayanti yang paling besar mendapatkan nilai ganti rugi sebesar Rp 17 miliar. (jee)

Warga Miskin 10.790 Jiwa

BENTENG - Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) diketahui persentase angka warga tergolong miskin di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) mengalami peningkatan 730 jiwa. Tahun lalu terdapat sebanyak 10.060 jiwa atau 8,80 persen. Sedangkan tahun 2020 naik menjadi 10.790 jiwa atau 9,30 persen.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Benteng, Teguh Iman Santoso, S.Si, M.Si. Ia menjelaskan, terjadinya peningkatan angka warga tergolong miskin dikarenakan dampak wabah Covid-19 yang saat ini melanda Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Benteng. Dengan adanya Covid-19, tidak bisa dipungkiri sangat berdampak pada perekonomian warga.

"Seperti banyaknya warga yang bekerja terkena imbas dirumahkan dan mengakibatkan menurunnya pendapatan warga. Kemudian yang memiliki usaha bangkrut karena pendapatan jauh menurun sebelum adanya Covid-19. Juga disebabkan faktor

alam lainnya seperti banjir berpengaruh pada hasil panen yang menurun," jelasnya.

Terpisah, Sekda Benteng, Edy Hermansyah, S.Si, M.Sc, Ph.D menjelaskan dampak dari Covid-19 ini memang sangat jelas terhadap perekonomian warga. Hal itu akan terlihat jelas dalam update data angka kemiskinan. Saat ini masyarakat hanya dapat menikmati sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Pemerintah memberikan bantuan modal, bantuan sosial, bantuan tunai kepada warga agar bisa mengatasi perekonomian yang saat ini dalam kondisi sulit. Tahun depan, pemerintah pusat juga sudah memerintahkan kepada pemerintah desa agar anggaran Dana Desa lebih diprioritaskan kepada pemulihan perekonomian masyarakat desa," jelas Edy.

Edy berharap langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam memulihkan perekonomian masyarakat ini bisa berhasil. Sehingga angka kemiskinan di Benteng bisa berkurang. (jee)

Siagakan 30 Personel Gabungan

BENTENG - Menyambut perayaan Natal dan tahun baru (Nataru), Polres Benteng saat ini telah mendirikan dua posko Operasi Lilin Nala tahun 2020. Dua posko tersebut berada di kawasan liku sembilan Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung dan Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa.

Total terdapat 30 personel gabungan yang ditempatkan. Kapolres Benteng, AKBP. Ary Baroto, S.IK, MH melalui Waka Polres Benteng, Kopol. Abdu Arbain, S.IK menjelaskan setiap posko terdapat masing-masing 15 personel. Rinciannya enam personel kepolisian, dua personel TNI, dua personel Dinas Perhubungan (Dishub), tiga personel Dinas Kesehatan (Dinkes) dan dua personel Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

"Kita bekerja sama dengan beberapa instansi untuk bertugas di posko yang sudah didirikan," jelasnya.

Dia menambahkan, personel yang ditempatkan bertugas untuk me-

mastikan kondisi wilayah berlangsung aman dan kondusif, mengatur jalur lalu lintas jika terjadi arus mudik yang tinggi, dan ikut melakukan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Diantaranya pengecekan suhu tubuh maupun penggunaan masker bagi pengendara yang melintas.

"Pantauan kita sejauh ini kondisi lalu lintas masih aman. Para pengendara yang melintas kita imbau untuk memakai masker. Kita cek kesehatan tubuhnya, ini semua demi memastikan tidak ada penyebaran Covid-19 di Benteng," kata Abdu.

Terpisah, Kepala Dinas Damkar Benteng, Bambang Irawan, S.Sos mengatakan, penempatan personel damkar sangat penting dilakukan, semua ini untuk mengantisipasi jika terjadinya kebakaran. "Sebab untuk peristiwa kebakaran tidak bisa kita prediksi, maka dari itu kita selalu stanbykan personel di posko, dan termasuk jika dibutuhkan untuk mobil damkar," ujarnya. (jee)



POS: Terlihat para petugas sudah siap menjaga posko Operasi Lilin Nala 2020.

GUNAKAN OLI YANG JELAS SUMBERNYA
 Hubungi :
PT. TRI GADING MAKMUR
 Distributor Resmi Pelumas Pertamina
 Jl. Seruni No. 33 Nusa Indah Kota Bengkulu
 Telp/Fax : 0736 - 22016 / 26531
 Email : tgm_bengkulu@yahoo.co.id

WHATEVER YOUR ENGINE
 PERTAMINA PELUMAS

SINAR HARAPAN ROOF
 GENTENG METAL ZINCALUME®
 Ready STOK

2 susun...?
 6 susun...?
 20 susun...?

Tidak Masalah...!!!
 Menyediakan Truss / Rangka Baja Ringan

* Kualitas Terbaik Dan Terjangkau
 * Ringan Dan Mudah Mengikuti Bentuk Atap
 * Anti Gempa Dan Angin Kencang
 * Jarak Reng Bisa Di Atur Sesuai Dengan Keinginan Anda
 Sehingga Anda Dapat Menghemat Reng

Hubungi SINAR HARAPAN
 Jl. Kintabalu No. 87, Kebun Tebing - Bengkulu
 Phone (0736) - 21653, Hr. 0822 7838 6870



LINTAS

Awasi Harga Swab Antigen

BENGKULU- Kementerian Kesehatan RI telah menetapkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen-swab sebesar Rp 250 ribu untuk pulau Jawa dan Rp. 275 ribu luar pulau Jawa. Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran No HK.02.02/1/4611/2020 yang dikeluarkan per tanggal 18 Desember 2020.

Kepala Dinkes Provinsi Bengkulu H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes, M.Si mengatakan penetapan batasan tarif tertinggi ini sebagai bentuk kepastian terhadap disparitas harga pemeriksaan rapid test antigen di fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun penetapan biaya rapid test antigen sudah dibahas bersama antara Kementerian Kesehatan dengan BPKP berdasarkan hasil survei dan analisa pada fasilitas pelayanan kesehatan. "Batasan tarif pemeriksaan ini sebagai bentuk kepastian tarif pemeriksaan rapid tes antigen melalui pengambilan swab bagi masyarakat dan pemberi layanan, serta memberikan jaminan kepada masyarakat agar mudah mendapatkan layanan pemeriksaan rapid test antigen oleh pihak swasta," jelasnya.

Seiring dengan ditetapkannya batas atas tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antigen melalui SE yang dikeluarkan per 18 Desember 2020, Herwan meminta agar ketetapan tersebut dapat diikuti oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terutama pihak swasta. (hkm)

ASN Diimbau Tidak Bepergian ke Luar Daerah

BENGKULU - Selama libur Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021, pemerintah melakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan pengetatan pemberian cuti bagi aparatur sipil negara (ASN). Begitupun ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu diimbau untuk tidak bepergian ke luar daerah.



HAMKA SABRI

"Sesuai dengan Surat Edaran (SE) MenPAN-RB dan SE Gubernur, untuk ASN Pemprov dan keluarga diimbau tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021," kata Sekdaprov Bengkulu, Hamka Sabri.

Imbauan tidak bepergian ke luar daerah ini terdapat dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 72/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Covid-19. SE tersebut berlaku sejak 21 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Namun, apabila terpaksa perlu bepergian ke luar daerah, terdapat empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Kedua, peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan daerah tujuan mengenai pembatasan keluar/masuk orang. Ketiga, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Keempat, protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

"Tidak ada sanksi, karena siapa tahu ada yang mendesak harus bepergian. Tapi bagi ASN yang tidak terlalu penting untuk melakukan perjalanan ke luar daerah, lebih baik di rumah saja. Liburan menghabiskan waktu bersama keluarga," papar Hamka.

Sedangkan untuk cuti bersama, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden No. 17/2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 23/2020. "ASN tidak boleh menambah cuti, terkecuali cuti melahirkan, sakit dan alasan penting lainnya. Larangan pengajuan cuti ini juga kita tuangkan dalam SE Gubernur terkait WFH," tegas Hamka. (key)

Klinik Prima Layani Rapit Test Antigen

BENGKULU- Sebagai upaya membantu pemerintah dalam menekan laju peningkatan kasus Covid-19, kini Klinik Prima yang beralamatkan di Jalan Hibrida Ujung bisa melakukan fasilitas pelayanan untuk melayani rapid test antigen bagi masyarakat.

Kepala Laboratorium Klinik Prima Bengkulu, Dedi Mirzan mengatakan rRapid test antigen atau swab antigen merupakan jenis tes yang sama untuk mendeteksi virus corona. "Hasil tes ini cepat," ujarnya.

Ia menjelaskan laboratorium Klinik Prima menyediakan layanan untuk rapid test antigen dengan harga Rp 275 ribu. Biaya rapid test antigen ini sesuai dengan imbauan pemerintah.

Dijelaskannya, bagi warga yang ingin melakukan rapid test antigen, bisa mengunjungi atau menghubungi kontak Klinik Prima di nomor 0852 6824 1700 terlebih dahulu untuk informasi lebih lanjut. "Klinik Prima membuka layanan Senin - Jumat pada pukul 08.00 - 16.00 WIB. Sedangkan hari Sabtu layanan dibuka pukul 08.00 - 12.00 WIB," jelasnya. (hkm)



NON TUNAI: Petugas SPBU melayani pembayaran non tunai pada konsumen yang membeli BBM. Transaksi non tunai dapat dilakukan melalui aplikasi MyPertamina.

Optimalkan Transaksi Non Tunai di SPBU

Minimalisir Penyebaran Covid-19

BENGKULU - Pertamina senantiasa mengedepankan pelayanan yang aman kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Unit Manager Communication, Relation & CSR MOR II Sumbagsel, Umar Ibnu Hasan mengatakan salah satu pelayanan yang dilakukan dengan mengoptimalkan layanan transaksi non tunai atau cashless melalui aplikasi MyPertamina yang dapat diunduh di playstore (android) dan appstore (iOS).

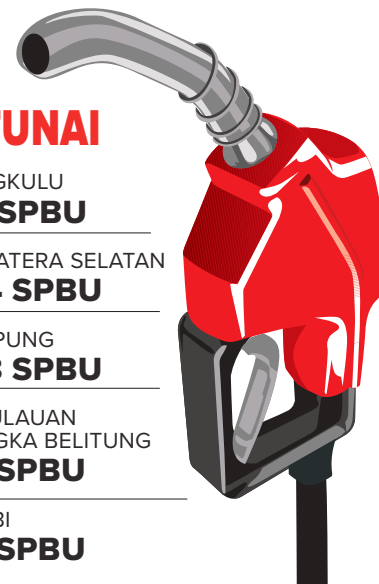
"Dengan transaksi non tunai melalui aplikasi MyPertamina terbukti sebagai metode transaksi keuangan yang praktis, aman dan efisien. Konsumen tidak perlu repot menyiapkan uang tunai atau uang kembalian, sehingga dapat mengurangi penyebaran Covid-19. Dengan kondisi wabah Covid-19 saat ini kita perlu menghindari penggunaan benda yang disentuh banyak orang, termasuk uang tunai," jelas Umar.

Dijelaskannya, saat ini terdapat 452 SPBU Pertamina di Sumbagsel yang wilayahnya meliputi

SPBU DI SUMBAGSEL MELAYANI

TRAKSAKSI NON TUNAI

	● BENGKULU 34 SPBU
	● SUMATERA SELATAN 134 SPBU
	● LAMPUNG 153 SPBU
	● KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 57 SPBU
	● JAMBI 74 SPBU



Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung bisa bertransaksi menggunakan aplikasi MyPertamina. "134 SPBU di Sumatera Selatan, 153 SPBU di Lampung, 57 SPBU di Kepulauan Bangka Belitung, 74 SPBU di Jambi, dan 34 SPBU di Bengkulu," ungkapnya.

Ia juga menerangkan berbagai upaya terus dilakukan Pertamina untuk mencegah penyebaran Covid-19 terutama di fasilitas bisnis seperti SPBU yang merupakan tempat publik, dimana banyak orang berlalu-lalang. Selain mengantisipasi penyebaran virus yang kian mengkhawatirkan, perlu juga melindungi petugas atau operator SPBU sebagai garda terdepan Pertamina yang bersentuhan dan memberikan pelayanan langsung dengan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan Pertamina untuk menekan penyebaran Covid-19 di SPBU antara lain seluruh petugas wajib mengenakan masker dan tetap menjaga jarak, rutin melakukan pemeriksaan suhu bagi operator yang bertugas, mengenakan sarung tangan karet saat bertransaksi dengan uang tunai, menghindari menyentuh wajah, SPBU menyediakan hand sanitizer dan rutin membersihkan sarana dan fasilitas SPBU dengan cairan disinfektan. "Untuk menambah kenyamanan konsumen, upaya-upaya ini juga diberlakukan di seluruh jaringan bisnis Pertamina termasuk agen dan pangkalan," paparnya. (zie)

Pilkada Sukses di Tengah Pandemi

BENGKULU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Provinsi Bengkulu, baik tingkat provinsi mau kabupaten/kota dinilai sukses menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember 2020. Atas hal itu, DPD RI mengapresiasi dengan memberikan piagam penghargaan.

Penyerahan piagam dilakukan anggota DPD RI Dapil Bengkulu, H. Ahmad Kanedi, SH, MH di kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Bengkulu, Padang Harapan Kota Bengkulu, kemarin (23/12). Dikatakannya, ada beberapa penilaian yang dilakukan pada pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Sebelumnya, ada beberapa kekhawatiran misalnya seperti tingkat kehadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun partisipasi pemilih di Bengkulu justru di atas rata-rata nasional. Selain itu, juga dalam penerapan protokol kesehatan (prokes) telah dilaksanakan dengan baik. Seperti pengaturan jarak saat di TPS, serta pengaturan jadwal pemilih untuk datang ke TPS. "Atas suksesnya KPU dan Bawaslu menyelenggarakan Pilkada serentak di Provinsi Bengkulu kita apresiasi dengan pemberian penghargaan," jelasnya.

Untuk penilaian sendiri, kata



PENGHARGAAN: Anggota DPD RI H. Ahmad Kanedi SH, MH menyerahkan piagam penghargaan kepada KPU Provinsi Bengkulu.

Kanedi, tim ahli dari DPD RI turun langsung ke kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan penilaian tim ahli dari DPD RI tersebut pelaksanaan demokrasi di Bengkulu berjalan sukses dan baik.

Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Darlinsky yang menerima penghargaan tersebut mengatakan ada beberapa variabel yang menjadi penilaian, diantaranya tingkat partisipasi pemilih yang awalnya dikhawatirkan rendah karena pada hari H pencoblosan Bengkulu dilanda hujan deras. Namun kenyataannya justru

partisipasi tinggi di atas angka rata-rata nasional.

Lonjakan Kasus Covid

Melonjaknya kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu pasca pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020, bukan karena pelaksanaan Pilkada. Hal ini ditegaskan Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Darlinsky kemarin (23/12).

Darlinsky menegaskan penambahan jumlah kasus Covid-19 hanya siklus saja yang kebetulan meningkatnya setelah pelaksanaan pilkada. (zie)

Tenaga Kesehatan Harus Terlatih

BENGKULU- Tenaga medis dari pihak swasta yang melakukan tes swab antigen secara mandiri harus sudah terlatih. Kepala Dinkes Provinsi Bengkulu H. Herwan Antoni, SKM, M.Kes, M.Si mengatakan idealnya boleh saja dilakukan oleh pihak swasta, karena orang pada umumnya tenaga kesehatan sudah tahu cara mengambil sampel yang benar seperti apa.

"Saat orang tidak terlatih melakukan swab, bisa saja yang terambil olehnya adalah bagian luar hidung saja. Padahal, bukan di sana virus corona berada, melainkan di bagian hidung dalam. Mungkin asal colok, sehingga hanya dapat sampel sekenanya saja. Jadi, hasilnya bisa saja tidak akurat," jelas Herwan.

Dijelaskannya, perlu diperhatikan tindakan pengujian rapid test antigen atau swab antigen ini dilakukan oleh tenaga terlatih dalam menggunakan peralatan dan meminimalkan risiko terpapar. "Hasil pemeriksaan harus disupervisi dan diinterpretasi oleh tim ahli," ucapnya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan swab antigen secara mandiri di rumah masing-masing. "Jika anda yang bukan tenaga kesehatan terlatih ingin melakukan swab mandiri, sebaiknya dipikirkan ulang risikonya. Jangan sampai kenekatan anda justru membahayakan diri sendiri dan orang lain," pesannya. (hkm)



HERWAN ANTONI